

Agus Suherman
Abdul Kohar Mudzakir
Dendy Umbara Hadi
Lukman Hadi

**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PENGAMBENGAN
(PROFIL DAN KINERJA)**



Diterbitkan oleh:
BADAN PENERBIT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
ISBN 978-979-097-734-1

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN (PROFIL DAN KINERJA)

Penulis : Agus Suherman, Abdul Kohar Mudzakir, Dendy Umbara
Hadi, Lukman Hadi
Penerbit : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Cetakan 1 : September 2020

ISBN : 978-979-097-734-1

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi diluar tanggungjawab percetakan

Ketentuan pidana pasal 72 UU No. 19 tahun 2002

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sambutan

**Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Diponegoro**

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro menyambut baik dan memberikan penghargaan atas diterbitkannya buku dengan judul **“Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Profil dan Kinerja)”**, karya dari Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si; Dr. Abdul Kohar Mudzakir, M.Si dari Departemen Perikanan Tangkap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, yang juga ditulis bersama saudara Dendi Umbara Hadi, S.P dan Lukman Hadi, S.St.Pi dari PPN Pengembangan.

Buku Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Profil dan Kinerja) ini merupakan sumbangsih dan karya nyata sebagai bagian dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan oleh staff pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Sekaligus, merupakan bagian dari proses pembelajaran dan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dari para mahasiswa. Di lain sisi buku ini diharapkan sebagai bagian dari sistem diseminasi keilmuan dan pengembangan teknologi.

Besar harapan kami buku ini dapat menjadi pemicu bagi penulis dan staff pengajar yang lain untuk mendharma baktikan dan meningkatkan pengabdian bagi Nusa dan Bangsa.

Semarang, September 2020

Dekan

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Diponegoro

Prof. Ir. Tri Winarni Agustini, M.Sc., Ph.d

NIP.196508211990012001

Kata Pengantar

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. PPN Pengambangan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, restoran dan lain-lain, juga merupakan tempat menampung aktivitas produksi, pengolahan dan pemasaran, serta pembinaan nelayan. Pelayanan terhadap kapal perikanan sebagai sarana produksi meliputi: penyediaan basis bagi armada penangkapan, menjamin kelancaran bongkar ikan hasil tangkapan, menyediakan suplai logistik bagi kapal-kapal ikan seperti air tawar, bahan bakar minyak, es untuk perbekalan dan lain-lain.

Buku dengan judul **“Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Profil dan Kinerja)”** ini memuat berbagai hal yang terkait dengan PPN Pengambangan seperti sejarah, fungsi, peranan, fasilitas serta kinerja PPN Pengambangan.

Penyusunan buku ini ditujukan sebagai bahan pengajaran dan referensi mengenai Pelabuhan Perikanan. Bagi masyarakat, khususnya yang belajar mengenai perikanan dalam bidang pemanfaatan sumberdaya perikanan buku ini dapat menjadi tambahan informasi untuk lebih memahami mengenai PPN Pengambangan.

Semarang, September 2020

Penyusun

Daftar Isi

Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Istilah	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II GAMBARAN TENTANG PELABUHAN PERIKANAN	5
2.1. Pelabuhan Perikanan.....	5
2.2. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan	8
2.2.1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) atau PP Tipe A.....	8
2.2.2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)/ PP Tipe B	8
2.2.3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)/ PP Tipe C	9
2.2.4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/ PP Tipe D.....	10
2.3. Fasilitas Pelabuhan Perikanan	14
2.4. Fungsi dan Peran Pelabuhan Perikanan.....	14
2.5. Manajemen Pelabuhan Perikanan	19
2.5.1. Ruang Lingkup.....	21
2.5.2. Operasionalisasi PP	22
2.5.3. Pelayanan Prima	23
2.5.4. Aparatur Pemerintah yang Berorientasi Pelanggan	25
2.5.5. Kewajiban Menetapkan Kebijakan Pelayanan.....	29
2.6. Pelayanan di Pelabuhan Perikanan	31
2.6.1. Pelayanan Langsung Kepada Nelayan/Pengusaha Perikanan.....	31
2.6.2. Pelayanan Ditujukan Kepada Masyarakat dalam Pelabuhan Perikanan.....	33

BAB III PROFIL PPN PENGAMBENGAN	35
3.1. Keadaan Umum Kabupaten Jembrana	35
3.2. Lokasi dan Sejarah Singkat	36
3.3. Landasan Hukum Pengelolaan	37
3.4. Organisasi dan Tata Kerja PPN Pengembangan.....	38
3.5. Jumlah Pegawai.....	49
BAB IV FASILITAS PPN PENGAMBENGAN.....	51
4.1. Fasilitas-Fasilitas di PPN Pengembangan.....	51
4.2. Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas.....	61
4.3. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas	67
BAB V KERAGAAN PPN PENGAMBENGAN	69
5.1. Kunjungan Kapal dan Pendaratan Ikan	69
5.2. Penyaluran Logistik	74
5.3. Nelayan.....	76
5.4. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).....	76
BAB VI KINERJA OPERASIONAL PPN PENGAMBENGAN.....	79
6.1. Kinerja Operasional Berdasarkan Parameter Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	79
6.2. Pendekatan <i>Structural Equation Model</i> (SEM) untuk Kinerja PPN Pengembangan	85
BAB VII DAMPAK SOSEK KEBERADAAN PPN PENGAMBENGAN ...	94
7.1. <i>Tangible Benefit</i> (Manfaat Nyata).....	94
7.2. <i>Direct Benefit</i> (Manfaat Langsung)	95
7.3. <i>Indirect Benefit</i> (Manfaat Tidak Langsung).....	98
7.4. <i>Intangible Benefit</i> (Manfaat Tak Berwujud)	100
BAB VIII PELAYANAN PPN PENGAMBENGAN	106
8.1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berorientasi Pelanggan	107
8.2. Pelayanan di PPN Pengembangan	108
8.2.1. Pelayanan Langsung Kepada Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan	108
8.2.2. Pelayanan Ditujukan Kepada Masyarakat	109
BAB IX WKOPP PPN PENGAMBENGAN.....	112
9.1. Analisis Wilayah Kerja Darat PPN Pengembangan.....	112

9.2. Analisis Wilayah Kerja Perairan PPN Pengembangan	114
BAB X FORMULASI STRATEGI PENGEMBANGAN PPN PENGAMBENGAN	120
10.1. Tahap Evaluasi Data Internal dan Eksternal	120
10.2. Tahap Pembuatan Matriks Internal dan Eskternal dan Matrik SWOT	121
10.3. Formulasi Strategi Pengembangan PPN Pengembangan.....	124
10.4. Tahap Pengambilan Keputusan	132
BAB XI PENUTUP	134
Daftar Pustaka	136
Lampiran I	142
Tentang Penulis	166

Daftar Tabel

1. Jumlah Pelabuhan Perikanan Menurut Lokasi	11
2. Penyebaran Pelabuhan Perikanan di 33 Propinsi Indonesia Tahun 2012	12
3. Penyebaran Pelabuhan Perikanan di 34 Propinsi Indonesia Tahun 2018	13
4. Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan.....	49
5. Faktor Daya Tampung Ruang (P) Menurut Jenis Ikan.....	66
6. Fasilitas di PPN Pengembangan.....	67
7. Evaluasi Kinerja PPN Pengembangan Januari 2019 – Januari 2020.....	83
8. Defenisi Operasional Variabel	87
9. Hasil Uji Model Faktor Konfirmatori Konstruk Full Model	89
10. <i>Regression Weight</i>	90
11. Hasil Uji <i>Standardized Regression Weights Construct Full Model</i>	90
12. Jenis Pelayanan Jasa di Kawasan PPN Pengembangan	95
13. Beberapa Jenis Manfaat Tidak Langsung PPN Pengembangan.....	101
14. Penyerapan Tenaga Kerja di PPN Pengembangan Tahun 2019.....	104
15. Nama Perusahaan Berbadan Hukum di Lingkup PPN Pengembangan.....	106
16. Tempat yang Merupakan Bagian Perairan yang Dipergunakan Secara Langsung untuk Kegiatan PPN Pengembangan.....	119
17. Hasil Analisis Strategi Pengembangan PPN Pengembangan Terhadap Penilaian Internal.....	129
18. Matrik SWOT Strategi Pengembangan PPN Pengembang an..	131

Daftar Gambar

1. Kerangka Umum Buku “Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Profil dan Kinerja)”	4
2. Kelas Pelabuhan Perikanan yang Telah ditetapkan di Indonesia.....	7
3. Sebaran Pelabuhan Perikanan yang Telah ditetapkan di Indonesia.....	7
4. Struktur Organisasi PPN Pengambengan	42
5. <i>Breakwater</i> di PPN Pengambengan.....	52
6. Dermaga di PPN Pengambengan.....	52
7. Kolam Labuh PPN Pengambengan	53
8. TPI di PPN Pengambengan.....	54
9. Jalan utama PPN Pengambengan.....	54
10. Tower air di PPN Pengambengan	55
11. Pabrik es di PPN Pengambengan.....	56
12. <i>Cold Storage</i> di PPN Pengambengan.....	56
13. SPBN di PPN Pengambengan	57
14. Genset PPN Pengambengan.....	57
15. Kantor PPN Pengambengan	58
16. Balai Pertemuan Nelayan di PPN Pengambengan.....	59
17. Rumah tinggal karyawan di PPN Pengambengan	59
18. Pos jaga di PPN Pengambengan.....	60
19. Pura di PPN Pengambengan.....	60
20. Mushola di PPN Pengambengan	61
21. Toilet di PPN Pengambengan.....	62
22. Kunjungan kapal perikanan dan aktivitas pendaratan ikan di PPN Pengambengan tahun 2003 – 2019.....	69
23. Produksi Ikan yang di daratkan di PPN Pengambengan Tahun 2003 – 2019	71

24. Nilai produksi ikan yang di daratkan di PPN Pengambengan Tahun 2003 – 2019	72
25. Produksi perjenis ikan yang di daratkan di PPN Pengambengan Tahun 2008 – 2019	72
26. Nilai Produksi perjenis ikan yang di daratkan di PPN Pengambengan Tahun 2008 – 2019	73
27. Harga rata-rata ikan Lemuru di PPN Pengambengan Tahun 2008 – 2019	74
28. Penyaluran ES di PPN Pengambengan Tahun 2007 – 2019.....	75
29. Penyaluran BBM di PPN Pengambengan Tahun 2007 – 2019	76
30. Penyaluran garam di PPN Pengambengan tahun 2007 – 2019.....	77
31. Penerimaan negara bukan pajak PPN Pengambengan Tahun 2009 – 2019	85
32. Grafik Kinerja PPN Pengambengan Januari 2019-Januari 2020.....	85
33. <i>Model Path Diagram</i>	87
34. Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.....	118
35. Posisi Strategi PPN Pengambengan dalam Proses Perencanaan KKP	123
36. Skema Tahapan Formulasi Strategi.....	123

Daftar Istilah

Analisis SWOT	Metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan organisasi baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan tertentu
APIEP	Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah
Armada	Sekelompok kapal-kapal yang terorganisasi untuk melakukan beberapa hal secara bersama-sama seperti kegiatan penangkapan ikan
<i>Breakwater</i>	Penahan gelombang, atau suatu bangunan yang berfungsi khusus untuk melindungi pantai atau daerah sekitar pantai terhadap pengaruh gelombang laut.
<i>Docking</i>	Merupakan posisi di mana kapal akan melalui proses pemeliharaan atau perbaikan Daerah pemasaran ikan.
<i>Fish marketing</i>	
<i>Fishing effort</i>	Ukuran kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dalam periode waktu tertentu.
<i>Fishing ground</i>	Daerah penangkapan ikan, suatu perairan di mana ikan yang menjadi sasaran penangkapan diharapkan dapat tertangkap secara maksimal, tetapi masih dalam batas kelestarian sumber dayanya. Daerah penangkapan ikan bisa juga didefinisikan sebagai suatu daerah perairan tempat ikan berkumpul di mana penangkapan ikan dapat dilakukan.
<i>Input</i>	Indikator masukan adalah segala sesuatu

	yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
<i>Log Book</i>	Laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan dan landing declaration dari nakhoda
Matriks SWOT	Menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dari matriks ini akan terbentuk empat kemungkinan alternatif strategi.
<i>Maximum Sustainable Yield (MSY)</i>	Produksi maksimum berkelanjutan secara biologi, jumlah suatu hasil tangkapan maksimum yang dapat dipanen dari suatu sumber daya ikan tanpa mengganggu kelestariannya.
<i>Multiplier effect</i>	Efek pengganda.
<i>One day fishing</i>	Operasi penangkapan dilakukan nelayan dalam satu hari saja
<i>Outcomes</i>	Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan.
<i>Output</i>	Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik.
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
<i>Slipway</i>	Merupakan salah satu jenis bangunan galangan kapal (<i>shipyard</i>) yang menggunakan sistem rel sebagai struktur utamanya di mana kapal yang dibuat atau akan diperbaiki dinaikkan pada suatu

		”kereta” diatas rel kemudian dilepas atau ditarik ke atau dari laut.
<i>Total Allowable Catch</i> (TAC)		Jumlah tangkap yang diperbolehkan, lihat JTB.
Zona Ekonomi Eksklusif		Adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya

BAB I

Pendahuluan

Pengertian Pelabuhan Perikanan (PP) umumnya ditetapkan berdasarkan fungsinya, mengacu ke Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, PP merupakan tempat yang terdiri daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu. Dalam pasal tersebut dijelaskan dua fungsi utama PP yaitu: sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan bisnis perikanan. Kegiatan bisnis perikanan yang dimaksud adalah sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pengertian serupa juga tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan serta dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018.

Israel dan Roque (2000) memberikan pengertian yang lebih luas. Selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, PP juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai di sekitarnya. Pengguna dalam hal ini, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, restoran dan lain-lain.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, PP akan menjadi pusat aktivitas industrialisasi kelautan dan perikanan. Selanjutnya, diharapkan memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik dan pengentasan kemiskinan.

Apalagi fungsi-fungsi tersebut berjalan baik, akan menjadi titik temu yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi di darat (Dubrocard and Thoron, 1998; Lubis, 1999; Lubis dan Pane, 2012; Lubis dan Pane, 2017; Kusumastanto, 2002; dan Purnomo *et al.*, 2003; Suherman, 2007).

Selama ini keberhasilan pembangunan PP bukan ditentukan oleh proses pembangunan fisiknya saja, yang paling penting adalah pemanfaatannya yang berdampak positif terhadap pembangunan yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat dan nelayan di sekitar PP (Suherman, 2007).

PPN Pengambengan menampung aktivitas masyarakat perikanan di wilayah Bali Utara dan sekitarnya. Terutama aktivitas sarana produksi, pengolahan dan pemasaran, serta pembinaan nelayan. Pelayanan terhadap kapal perikanan sebagai sarana produksi meliputi: penyediaan basis (*home base*) bagi armada penangkapan, menjamin kelancaran bongkar ikan hasil tangkapan, menyediakan suplai logistik bagi kapal-kapal ikan seperti air tawar, bahan bakar minyak, es untuk perbekalan. Sedangkan pelayanan terhadap nelayan sebagai unsur tenaga produksi meliputi: pengolahan, pemasaran dan pembinaan nelayan. (Suherman dan Dault, 2009).

Buku **“Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Profil dan Kinerja)”** merupakan hasil survei dan kajian-kajian yang ditujukan untuk:

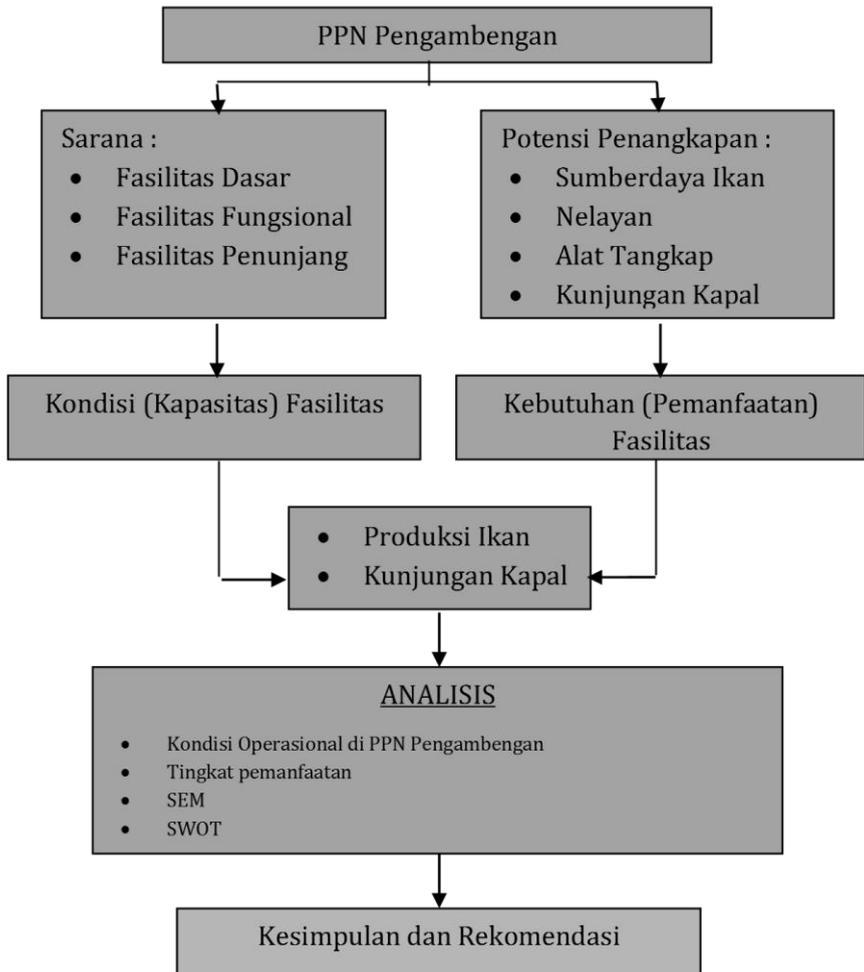
1. Menggambarkan kondisi ataupun keberadaan serta operasionalisasi PPN Pengambengan
2. Mengidentifikasi permasalahan operasional PPN Pengambengan.
3. Menggambarkan tentang perkembangan dan arah pengembangan dan aktifitas PPN Pengambengan
4. Status tata ruang menurut Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk PPN Pengambengan
5. Rekomendasi mencari strategi penyelesaian permasalahan dan

peningkatan operasional PPN Pengembangan

6. Tata pengelolaan/kelembagaan yang ideal untuk PPN Pengembangan

Secara umum pengembangan PPN Pengembangan telah berjalan dengan baik. Indikatornya, dimulai dari saat perencanaan pengembangannya, yang telah didasari kajian dari berbagai aspek. Mulai dari penentuan lokasi, penetapan tipe dan dimensi bangunan pelabuhan sesuai dengan keadaan sumberdaya alamnya, hubungan dengan rencana pengembangan wilayah setempat, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat pesisir setempat, dampak sosial ekonomi wilayah setempat dan sebagainya. Indikator lain ditunjukkan dengan telah berfungsinya berbagai fasilitas yang ada. Selain itu, juga dampak positif yang dirasakan oleh nelayan. Mulai jaminan ketersediaan sarana produksi dan pemasaran hasil perikanan pada tingkat harga yang paling menguntungkan bagi nelayan.

Kerangka umum buku **“Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Profil dan Kinerja)”** disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Umum Buku “Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Profil dan Kinerja)”

BAB II

Gambaran Tentang Pelabuhan Perikanan

2.1. Pelabuhan Perikanan

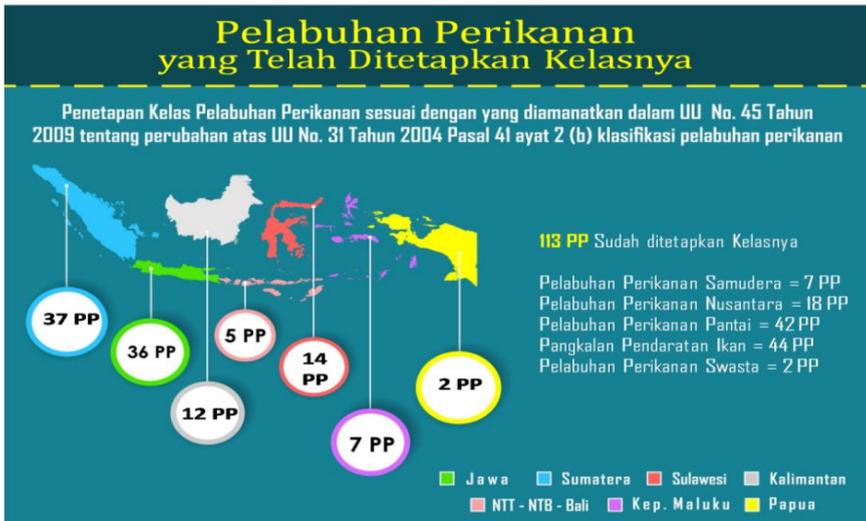
Sebagaimana dijelaskan di Bab I, PP merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu dengan fungsi utama sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan. Kegiatan sistem bisnis perikanan meliputi sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang PP. Sedangkan dalam penjelasan pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), dijelaskan pemerintah membangun dan membina PP dengan berbagai fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain: sebagai tempat tambat-labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, dan tempat pengumpulan data hasil tangkapan. Juga, sebagai tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan, dan tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.

Secara rinci, dalam pengelolaannya, pelabuhan perikanan menjalankan fungsi :

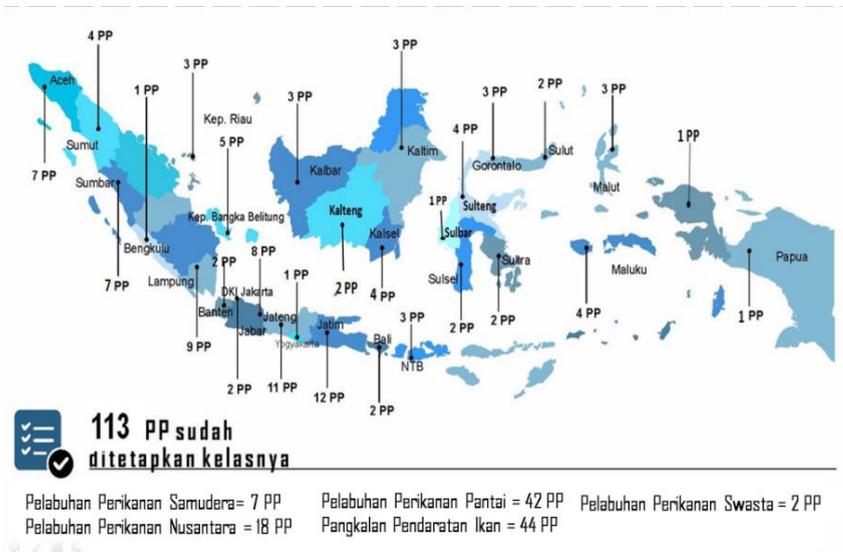
- a) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
- b) Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- c) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- d) Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book*;
- e) Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat Persetujuan Berlayar;
- f) Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- g) Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i) Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j) Pelayanan Jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k) Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l) Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- m) Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- n) Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
- o) Pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari.
- p) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Guna mendukung upaya pengembangan usaha perikanan tangkap di 34 Provinsi di Indonesia. Pemerintah telah membangun 592 buah PP yang terdiri dari PPS, PPN dan PPP serta PPI, yang

sebagian besar terdapat di Wilayah Indonesia bagian Barat, utamanya di Sumatera dan Jawa (Gambar 2 dan 3).



Gambar 2. Kelas Pelabuhan Perikanan yang Telah Ditetapkan di Indonesia



Gambar 3. Sebaran Pelabuhan Perikanan yang Telah Ditetapkan di Indonesia

2.2. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

2.2.1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) atau PP Tipe A

Kriteria yang harus dipenuhi sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) secara umum adalah:

- a) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut teritorial, ZEEI, dan perairan internasional.
- b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT.
- c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.
- d) Mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6000 GT kapal perikanan sekaligus.
- e) Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor.
- f) Terdapat industri perikanan.

PPS adalah PP Klas A, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial dan ZEEI dan wilayah perairan internasional. Ada tujuh PPS yang telah dibangun, yaitu: Lampulo (Aceh) Belawan (Sumatera Utara); Bungus (Sumatera Barat) Muara Baru (DKI Jakarta); Kendari (Sulawesi Tenggara); Bitung (Sulawesi Utara); dan Cilacap (Jawa Tengah). (<http://pipp.djpt.kkp.go.id/>).

2.2.2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)/ PP Tipe B

Kriteria yang harus dipenuhi sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) secara umum adalah:

- a) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut teritorial dan wilayah ZEEI.
- b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 *Gross Tonnage* (GT).
- c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m dengan

kedalaman kolam sekurang-kurangnya 3 m.

- d) Mampu menampung sekurang-kurangnya 75 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT kapal perikanan sekaligus.
- e) Terdapat industri perikanan.

PPN adalah PP Klas B, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial dan ZEEI. Menurut laman <http://pipp.djpt.kkp.go.id/> hingga tahun 2019 telah dibangun 18 PPN. Yaitu: Kejawanan (Jawa Barat); Brondong (Jawa Timur); Idi (NAD); Sibolga (Sumatera Utara); Kwandang (Gorontalo); Sungailiat (Bangka Belitung); Tual (Maluku); Pemangkat (Kalimantan Barat); Merauke (Papua); Muara Angke (DKI Jakarta); Palabuhanratu (Jawa Barat); Pekalongan (Jawa Tengah); Kejawanan (Jawa Barat); Brondong (Jawa Timur); Prigi (Jawa Timur); Bitung (Sulawesi Utara), Ternate (Maluku Utara); dan Ambon (Maluku).

2.2.3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)/ PP Tipe C

Kriteria yang harus dipenuhi sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) secara umum adalah:

- a) Melayani kapal perikanan yang mencakup kegiatan perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dan wilayah ZEEI.
- b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 *Gross Tonnage* (GT).
- c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 m.
- d) Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus.
- e) Memiliki lahan sekurang-kurangnya 15 ha.

PPP, adalah PP Klas C, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dan ZEEI. Sesuai data dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diunggah di <http://pipp.djpt.kkp.go.id/>, ada 40 lokasi PPP. Beberapa contoh PPP antara lain Sungai Rengas (Kalimantan Barat); Bacan (Maluku Utara); Blanakan (Jawa Barat); Bajomulyo (Jawa Tengah); Asem Doyong (Jawa Tengah); Paiton (Jawa Timur); Kota Agung (Lampung); Labuhan (Lombok).

2.2.4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/ PP Tipe D

Kriteria yang harus dipenuhi sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) secara umum adalah:

- a) Melayani kapal perikanan yang mencakup kegiatan perikanan di wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan.
- b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 *Gross Tonnage* (GT).
- c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 2 m.
- d) Mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus
- e) Memiliki lahan sekurang-kurangnya 2 ha.

PPI, adalah PP Kelas D, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah pedalaman dan perairan kepulauan. Jumlah pangkalan pendaratan ikan yang telah dibangun untuk menunjang operasional penangkapan di perairan setempat berjumlah 388 yang tersebar di seluruh Indonesia (<http://pipp.djpt.kkp.go.id/>).

Tabel 1. Jumlah Pelabuhan Perikanan Menurut Lokasi

Lokasi	Jumlah Pelabuhan Perikanan
WPPNRI-571	33
WPPNRI-572	62
WPPNRI-573	89
WPPNRI-711	16
WPPNRI-712	183
WPPNRI-713	60
WPPNRI-714	26
WPPNRI-715	36
WPPNRI-716	21
WPPNRI-717	6
WPPNRI-718	6
WPP Perairan Darat	54
Total	592

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018

Dari data yang tersaji pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa WPPNRI-712 memiliki lokasi PP terbanyak yaitu sebanyak 183 lokasi. Sedangkan WPPNRI-717 & 718 merupakan WPP dengan lokasi PP terkecil dengan jumlah masing-masing 6 PP. Penyebaran PP secara detil di 34 provinsi dapat diikuti pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Penyebaran Pelabuhan Perikanan di 33 Provinsi Indonesia Tahun 2012

No	Nama Provinsi	PPS	PPN	PPP	PPI	Total
1	Jawa Tengah	1	1	9	104	115
2	Jawa Timur	0	2	7	87	96
3	Jawa Barat	0	2	6	85	93
4	Kalimantan Barat	0	1	1	89	91
5	Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	1	81	83
6	Banten	0	1	1	37	39
7	Sulawesi Selatan	0	0	0	39	39
8	Sumatera Utara	1	1	1	32	35
9	Sumatera Barat	1	0	1	29	31
10	Nusa Tenggara Barat	0	0	1	28	29
11	Sulawesi Tenggara	1	0	0	26	27
12	Lampung	0	0	4	18	22
13	Yogyakarta	0	0	1	21	22
14	Maluku	0	2	0	20	22
15	Kalimantan Timur	0	0	1	19	20
16	Nusa Tenggara Timur	0	0	1	18	19
17	Papua	0	0	0	19	19
18	Papua Barat	0	0	1	18	19
19	Bengkulu	0	0	0	17	17
20	Sulawesi Tengah	0	0	0	17	17
21	Kepulauan Bangka- Belitung	0	2	0	14	16
22	Bali	0	1	0	15	16
23	Maluku Utara	0	1	1	12	14
24	Kepulauan Riau	0	0	1	10	13
25	Sulawesi Utara	1	0	2	10	13
26	Riau	0	0	0	11	11
27	Kalimantan Selatan	0	0	1	8	9
28	Gorontalo	0	0	1	8	9
29	Kalimantan Tengah	0	0	1	7	8
30	Sumatera Selatan	0	0	0	7	7
31	Sulawesi Barat	0	0	0	6	6
32	DKI Jakarta	1	0	0	4	5
33	Jambi	0	0	0	3	3
Total		6	14	43	919	985

Sumber: www.pipp.dkp.go.id/pipp2/kabkota.html

Tabel 3. Penyebaran Pelabuhan Perikanan di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2018

No	Nama Provinsi	PPS	PPN	PPP	PPI	Total
1	Aceh	1	0	0	101	102
2	Jawa Tengah	1	1	9	68	79
3	Jawa Timur	1	1	5	51	58
4	Jawa Barat	0	1	3	48	52
5	Banten	0	1	1	24	26
6	Bengkulu	0	0	0	25	25
7	Sulawesi Selatan	0	0	0	25	25
8	Kalimantan Barat	0	1	2	20	23
9	Sumatera Utara	1	1	0	19	21
10	DI Yogyakarta	0	0	1	16	17
11	Sulawesi Utara	1	0	1	10	12
12	Sulawesi Tenggara	1	0	0	11	12
13	Gorontalo	0	1	0	11	12
14	Sulawesi Tengah	0	0	0	11	11
15	Bali	0	1	0	9	10
16	Sumatera Barat	1	0	0	8	9
17	Lampung	0	0	0	9	9
18	Kep. Bangka Belitung	0	2	0	6	8
19	Kalimantan Timur	0	0	0	8	8
20	Maluku Utara	0	1	2	5	8
21	Nusa Tenggara Timur	0	0	1	6	7
22	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	6	6
23	Kalimantan Tengah	0	0	0	5	5
24	DKI Jakarta	1	0	0	3	4
25	Kalimantan Selatan	0	0	1	3	4
26	Riau	0	0	0	3	3
27	Maluku	0	2	0	1	3
28	Papua	0	0	0	3	3
29	Kepulauan Riau	0	0	0	2	2
30	Kalimantan Utara	0	0	1	1	2
31	Sulawesi Barat	0	0	0	2	2
32	Papua Barat	0	0	1	1	2
33	Jambi	0	0	0	0	0
34	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0
Total		8	13	28	521	570

Sumber: Statistik Pelabuhan Perikanan 2018 (bps.go.id)

2.3. Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Dirjen Perikanan Tangkap (2002) menggolongkan fasilitas PP sebagai berikut:

A. Fasilitas Pokok

Merupakan fasilitas dasar yang diperlukan untuk melindungi terhadap gangguan alam. Termasuk fasilitas dasar antara lain: penahan gelombang atau *break water*, tembok penahan tanah (turap), *jetty*, alur pelayaran, dermaga, kolam pelabuhan, daratan pelabuhan, jalan, dan drainase.

B. Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional yaitu fasilitas yang berfungsi mempertinggi nilai guna dari fasilitas pokok dengan cara memberikan pelayanan yang diperlukan di suatu PP. Termasuk di dalamnya antara lain: TPI, pabrik es, *cold storage*, tangki air bersih, tangki bahan bakar, instalasi listrik, alat komunikasi, dok atau *slipway*, bengkel, kantor syahbandar, balai pertemuan nelayan, menara pengawas, MCK, pagar keliling. Dalam hal ini, bukan berarti semua fasilitas harus tersedia, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dari PP itu sendiri.

C. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang sistem PP dan tidak dapat dimasukkan ke dalam dua fasilitas tersebut di atas. Termasuk dalam fasilitas tambahan, yaitu rumah kepala pelabuhan, rumah syah bandar, mes operator, gedung olahraga, rumah penginapan nelayan, perkantoran pengusaha perikanan, kantin, klinik, dan tempat ibadah. Sarana tambahan ini sama halnya dengan sarana fungsional dibangun sesuai dengan kebutuhan.

2.4. Fungsi dan Peran Pelabuhan Perikanan

Infrastruktur PP di Indonesia dikategorikan dalam pelayanan publik. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, terdiri dari PPS, PPN, PPP dan PPI. Fasilitas tersebut dikelola secara teknis oleh

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Pusat atau oleh Pemerintah Daerah (Pemda) tergantung dari skala pelayanan yang diberikan. Dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk PPS dan PPN dikelola oleh UPT Pemerintah Pusat, sedangkan PPN, PPI, pengelolaannya diserahkan kepada Pemda.

Fungsi sebuah PP paling tidak ada empat, yaitu:

1. Tempat Pertemuan (*interface*): pelabuhan merupakan tempat pertemuan dua moda transportasi utama, yaitu darat dan laut serta berbagai kepentingan yang saling terkait;
2. Gapura (*gateway*): pelabuhan berfungsi sebagai gapura atau pintu gerbang suatu negara. Warga negara dan barang-barang dari negara asing yang memiliki pertalian ekonomi masuk ke suatu negara akan melewati pelabuhan tersebut. Sebagai pintu gerbang negara, citra negara sangat ditentukan oleh baiknya pelayanan, kelancaran serta kebersihan di pelabuhan tersebut. Pelayanan dan kebersihan di pelabuhan merupakan cermin negara yang bersangkutan;
3. Entitas Industri: dengan berkembangnya industri yang berorientasi ekspor maka fungsi pelabuhan menjadi sangat penting. Dengan adanya pelabuhan, hal ini akan memudahkan industri mengirim produknya dan mendatangkan bahan baku. Dengan demikian, pelabuhan berkembang menjadi suatu jenis industri sendiri yang menjadi ajang bisnis berbagai jenis usaha, mulai dari transportasi, perbankan, perusahaan *leasing* peralatan dan sebagainya; dan
4. Mata Rantai Transportasi: pelabuhan merupakan bagian dari rantai transportasi. Di pelabuhan berbagai moda transportasi bertemu dan bekerja. Pelabuhan laut merupakan salah satu titik dari mata rantai angkutan darat dengan angkutan laut. Orang dan barang yang diangkut dengan kereta api bisa mengikuti rantai transportasi dengan menggunakan kapal laut. Oleh karena itu, akses jalan mobil, rel kereta api, jalur dari dan ke bandar udara sangatlah penting bagi suatu pelabuhan. Selain itu, sarana

pendukung, seperti perahu kecil dan tongkang akan sangat membantu kelancaran aktivitas pelabuhan sebagai salah satu mata rantai transportasi (Suyono, 2005).

Secara umum pelabuhan berfungsi sebagai salah satu pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional (*gateway*), sebagai simpul dalam jaringan transportasi, sebagai tempat kegiatan bongkar muat transportasi, dan sebagai tempat untuk mendukung pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi daerah *hinterland*. Sedangkan peranan pelabuhan adalah sebagai penghubung antara daratan dan laut. Pelabuhan juga dapat berperan sebagai tempat percepatan pertumbuhan industri dan perdagangan, dan dalam beberapa situasi dapat berperan sebagai stabilisator harga. Pelabuhan memiliki arti penting dalam mobilitas barang dan jasa, karena posisinya sebagai titik pertemuan transportasi darat dan laut.

Dalam perspektif makro, pelabuhan juga dapat berperan sebagai salah satu instrumen terpenting untuk mendorong dan menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah, baik secara fisik (non-ekonomi) maupun secara ekonomi. Dampak ekonominya dapat dilihat dari kegiatan transaksi perdagangan antar pulau, sumber pendapatan dari retribusi atau pajak dan hidupnya sektor-sektor ekonomi informal di sekitar pelabuhan. Dampak fisik (non-ekonomi) tergambar dari tumbuhnya fasilitas-fasilitas publik di sekitar pelabuhan, dalam menyangga aktivitas ekonomi di sekitar kota pantai berbasis pelabuhan, seperti penyediaan transportasi darat, pengangkutan, terminal, hotel atau restoran, dan tempat transit (Kamaluddin, 2002).

Dirjen Perikanan Tangkap (2002) menyebutkan bahwa pembangunan prasarana PP merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan perikanan. Hal ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), yang menyebutkan bahwa pemerintah menyelenggarakan dan membina PP. Dengan tujuan, antara lain untuk menunjang proses motorisasi atau modernisasi unit penangkapan tradisional secara bertahap dalam rangka memperbaiki usaha perikanan tangkap dalam memanfaatkan perairan secara optimal dan berkesinambungan. Hal ini dimungkinkan, karena pelabuhan dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memberi kemudahan bagi nelayan untuk persiapan operasional pendaratan hasil, pemasaran, perbaikan, serta kemudahan lainnya.

Pasal 41 A ayat 2 UU No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, menjelaskan fungsi utama PP sebagai berikut:

- a) tempat tambat labuh kapal perikanan
- b) tempat pendaratan ikan
- c) tempat pemasaran dan distribusi ikan
- d) tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan
- e) tempat pengumpulan data tangkapan
- f) tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan
- g) tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan

Pembangunan pelabuhan perikanan harus memenuhi beberapa persyaratan minimal yaitu:

1. tempat berlindung yang aman bagi kapal penangkap ikan dan disediakan pelayanan yang memadai bagi kapal, pedagang dan pembeli
2. pasok air tawar yang memadai dan pengaturan sanitasi harus disediakan

3. sistem pembuangan limbah, termasuk pembuangan minyak, air berminyak dan alat penangkapan ikan harus diintroduksi
4. pencemaran dan kegiatan perikanan dan sumber eksternal harus diminimumkan
5. pengaturan untuk menanggulangi efek erosi dan siltasi harus dibuat

Berdasarkan Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, PP mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDI dan lingkungannya. Mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran. Fungsi tersebut dapat berupa:

- a) pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
- b) pelayanan bongkar muat;
- c) pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- d) pemasaran dan distribusi ikan;
- e) pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f) pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- g) pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i) pelaksanaan kesyahbandaran;
- j) pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- k) publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- l) pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari
- m) pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), kebakaran, dan pencemaran)
- n) meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan asli daerah.

Mengacu ke fungsi tersebut, PP memiliki nilai strategis antara lain, mempunyai dampak pengganda (*multiplier effects*) bagi

pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan PP dapat memajukan ekonomi di suatu wilayah.

2.5. Manajemen Pelabuhan Perikanan

Untuk meningkatkan pemanfaatan segenap fasilitas pelabuhan maka dalam setiap aktivitas manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan kegiatan lainnya harus melibatkan *stakeholder*. Terutama para nelayan, pengusaha perikanan, kelembagaan daerah, instansi terkait maupun staf pelabuhan sendiri. Mereka dapat dihimpun dalam suatu forum yang secara reguler memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah melalui manajemen pelabuhan.

Manajemen pelabuhan harus semakin diarahkan kepada peningkatan pelayanan bagi masyarakat ketimbang kepentingan birokrasi. Pelayanan kepada pelanggan adalah upaya secara sadar dan terencana dilakukan oleh organisasi pelabuhan dengan tujuan agar supaya produksi maupun jasa yang dihasilkan tetap dapat bertahan melawan persaingan yang semakin ketat. Karena, melalui pemberian pelayanan yang memuaskan telah menjadi suatu urusan yang terpenting dalam memenangkan persaingan. Ketentuan ini sifatnya universal, berlaku bagi swasta maupun instansi pemerintah.

Keberhasilan pengelolaan PP dapat diukur dari efektif dan efisiennya pelayanan kepada para pengguna pelabuhan perikanan. Pelayanan yang diberikan harus tergolong prima dan menciptakan suasana kondusif sesuai dengan fungsi pelabuhan perikanan. Untuk itu, pengelolaan pelabuhan perikanan dituntut untuk dapat mempersiapkan sarana/fasilitas pelabuhan agar selalu siap dioperasikan setiap saat kepada para *stakeholder* pelabuhan.

Karena itulah, aspek pengelolaan dan perawatan PP merupakan suatu kebutuhan. Pengelolaan PP seyogyanya ditujukan untuk mengarahkan organisasi pelabuhan agar mempunyai kemampuan menghasilkan jasa sedemikian produktif dan seefektif

mungkin. Sedangkan perawatan diarahkan untuk memperpanjang umur pakai fasilitas yang ada agar dapat selalu siap melayani kegiatan produksi industri perikanan. sendiri. Pengelola pelabuhan bertanggung jawab penuh terhadap terlaksananya secara efektif O dan M yang efisien bagi pelabuhan yang bersangkutan.

Tugas ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan yang diberikan. Baik pelayanan kepada nelayan (ABK), pengusaha kapal, pedagang, pengolah, maupun pihak lain yang dapat ambil bagian dalam kegiatan perikanan di PP. Untuk itu diperlukan rencana kerja pelayanan yang meliputi perawatan/pemeliharaan fasilitas dan ketertiban umum, tersusunnya rencana induk, dan tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang profesional. Sehingga, tercipta suatu kondisi PP/PPI yang sehat dan bersih, pelayanan yang cepat dan tepat sesuai keinginan pengguna jasa. Serta, suasana yang kondusif dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan, pengaturan pemanfaatan areal industri sesuai peruntukannya.

Masalah-masalah klasik di PP masih sering terjadi yaitu, yang menyangkut koordinasi dengan instansi terkait, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, dan status kelembagaan khususnya PP. Serta, kualitas SDM yang kurang memadai.

Masalah SDM menjadi hal utama untuk diperhatikan. Karena, dalam era globalisasi yang serba dinamis dan modern ini, semua pihak dituntut untuk meningkatkan berbagai kemampuan dan keahliannya dalam berbagai bidang, baik teknis maupun manajerial. Kenyataannya memang menunjukkan bahwa masyarakat telah mulai menuntut kualitas pelayanan yang seharusnya dapat diberikan oleh instansi atau aparatur pemerintah ataupun swasta yang berkaitan.

Sebagai instansi pemerintah yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur bagi basis kegiatan perikanan tangkap, fungsi PP bukan sebatas dipenuhi dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Lebih dari itu, harus juga dilengkapi dengan pelayanan kepada masyarakat nelayan sebagai pengguna dengan melaksanakan

operasionalisasi fasilitas yang dibangun sesuai dengan fungsinya.

Tujuan-tujuan pembangunan prasarana perikanan tersebut merupakan misi pemerintah melalui aparaturnya yang kiranya dapat terselenggara dengan baik hanya apabila implementasi operasionalnya betul-betul dapat mengutamakan kepentingan pelanggan sebagai pelaku kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan (SDI). Kepentingan pelanggan dapat dipenuhi dengan penyelenggaraan pelayanan yang baik, dalam hal ini peningkatan pelayanan menjadi sangat diperlukan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat menjelaskan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sebagai penyedia pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Panduan operasional PP perlu diadakan untuk memberikan pedoman yang berkaitan dengan operasionalisasi PP. Panduan ini harus mengandung rumusan tentang misi serta standar pelayanan prima yang sesuai dengan keinginan pelanggan yang selalu menggunakan berbagai fasilitas yang tersedia di PP. Selanjutnya, panduan ini dijadikan pedoman operasionalisasi PP untuk mewujudkan misi dan standar pelayanan prima. Pada akhirnya diharapkan operasionalisasi fasilitas dan fungsi PP dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai.

2.5.1. Ruang Lingkup

Panduan yang disusun sebagai pedoman operasionalisasi PP/PPI dengan penyelenggaraan pelayanan prima akan terbatas pada hal-hal yang menyangkut pelaksanaan pelayanan berbagai fasilitas pokok dan fasilitas fungsional yang ada. Sebagai suatu sistem kegiatan yang berlangsung dari waktu ke waktu secara berkesinambungan maka terselenggaranya pelayanan prima ini

sangatlah dipengaruhi oleh adanya tugas-tugas perawatan dan pemeliharaan terhadap fasilitas yang digunakan dalam operasionalisasi fungsi fasilitas tersebut. Pelayanan prima dapat berlangsung apabila didukung oleh terselenggaranya perawatan fasilitas yang dipakai untuk melayani pelanggan. Perawatan fasilitas PP mutlak perlu dilakukan secara teratur agar operasionalisasi kegiatan pelabuhan dapat dilakukan tanpa terhalang oleh kemungkinan timbulnya hambatan akibat fasilitas yang bersangkutan tidak dapat berfungsi dengan baik atau rusak karena kurangnya tindakan perawatan yang seharusnya dilakukan.

Dalam lingkup operasional PP, permasalahannya terfokus kepada faktor SDM. Yaitu personal atau siapa yang mengerjakan tugas dan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan untuk menjalankan fasilitas yang tersedia dan melaksanakan fungsinya. Bagaimana SDM tersebut melaksanakan pekerjaannya dengan cara dan prosedur yang benar sehingga mencapai tujuan yang direncanakan dengan memperhatikan untuk kepentingan siapa pekerjaan itu dilaksanakan.

Siapa pelakunya? Tentulah Kepala PP/PPI beserta jajaran staf dan semua karyawannya. Bagaimana melaksanakannya? Hal ini menyangkut ketentuan, prosedur dan tata cara yang telah direncanakan. Apa yang dikerjakan? Semua pekerjaan pada berbagai fasilitas pokok, fasilitas fungsional maupun fasilitas penunjang PP/PPI. Untuk siapa? Tentunya pelayanan diberikan untuk kapal, nelayan dan kelompok masyarakat lainnya yang berkepentingan menggunakan jasa PP/PPI yang bersangkutan.

2.5.2. Operasionalisasi PP

Pengertian tentang operasionalisasi PP adalah tindakan atau gerakan sebagai pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan untuk memanfaatkan fasilitas di PP agar berdaya guna dan bernilai guna (efektif dan efisien) secara optimal bagi “fasilitas itu sendiri” atau “fasilitas lainnya yang terkait”. Sebagai prasarana dan sarana

perikanan tangkap PP mempunyai fungsi dan fasilitas yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Operasionalisasi adalah implementasi dari segala kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan di PP dalam melayani kebutuhan masyarakat pengguna yang memerlukannya. Kegiatan operasional PP yang dilakukan hendaknya berorientasi kepada kepentingan masyarakat pengguna jasa PP. Ini tidak lain adalah apa yang dikenal sebagai pelayanan prima.

2.5.3. Pelayanan Prima

Manajemen publik seyogyanya semakin diarahkan kepada peningkatan pelayanan bagi masyarakat daripada bagi kepentingan birokrasi. Pelayanan kepada pelanggan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh organisasi atau unit kerja pelaksana dengan tujuan agar produksi maupun jasa yang dihasilkan tetap ada dan dapat bertahan melawan persaingan yang semakin ketat. Pemberian pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan telah menjadi suatu urusan yang terpenting dalam memenangkan persaingan. Ketentuan ini sifatnya universal, sehingga berlaku juga bagi instansi pemerintah.

Dalam memulai menjalankan tugasnya organisasi selalu mengawalinya dengan penyusunan rencana. Rencana yang strategis harus didasarkan atas misi dan visi yang sudah dirumuskan oleh organisasi pelabuhan perikanan karena hal ini erat berhubungan dengan kebijaksanaan jangka panjang. Misi merupakan fondasi penyusunan perencanaan strategis karena pernyataan dalam misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi dan secara eksplisit mengandung apa yang hendak dicapai serta kegiatan spesifik apa yang harus ditempuh organisasi untuk mencapainya. Dalam rumusan misi juga harus jelas menyatakan keperdulian terhadap pelanggan. Visi adalah suatu keadaan ideal masa depan organisasi yang realistis, dapat dipercaya, meyakinkan, mengandung daya tarik dan hendak diwujudkan pada suatu saat yang telah

ditentukan.

Perencanaan strategis juga didasarkan atas berbagai pertimbangan dan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan internal organisasi, maupun peluang serta ancaman dari lingkungan eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan berlangsungnya tugas organisasi (misalnya pengaruh situasi sosial, budaya, politik, ekonomi). Kemudian dirumuskan beberapa alternatif strategi dasar organisasi dalam rangka mewujudkan tugas pokok, fungsi maupun misinya.

Pemilihan strategi dasar juga harus mempertimbangkan sepenuhnya segenap harapan dan keinginan *stakeholder* termasuk para pelanggan maupun pemilik organisasi (*customer driven government principles*). Dengan pengertian, harapan dan keinginan itu ditampung kemudian dilakukan analisis sehingga akhirnya dapat dirumuskan faktor-faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan misinya. Faktor-faktor ini digunakan untuk merumuskan tujuan, sasaran organisasi serta strategi pencapaian sasaran dan tujuan tersebut.

Rumusan tujuan dan sasaran hendaknya dapat mengikuti semboyan SMART (*specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented, time bound*). Tujuan yang dirumuskan akan berjangka lebih panjang dibandingkan dengan sasaran antara 3-5 tahun. Sedangkan sasaran dapat berjangka triwulan, semester, atau paling panjang setahun. (Elpandi, 2000). Penjelasan bahwa tujuan dan sasaran perlu memenuhi SMART adalah sebagai berikut:

- a) *Specific*, yakni baik hasil maupun cara penyampaiannya dapat dijadikan tolok-ukur yang jelas serta tidak bias guna menghindari kesalahan interpretasi;
- b) *Measurable* berarti mudah diukur secara obyektif baik secara kuantitatif maupun kualitatif termasuk di dalamnya mengenai waktu penyelesaian kegiatan, dengan keyakinan bahwa apa yang bisa diukur itulah pasti yang dapat dikerjakan;
- c) *Aggressive but attainable* berarti menantang tetapi masih dalam

- jangkauan keberhasilan;
- d) *Result oriented* adalah tindakan yang berorientasi kepada hasil (outcome);
 - e) *Time bound* berarti memiliki sekala waktu yang jelas.

Supaya sasaran dapat tercapai dengan sebaik-baiknya maka strategi untuk mencapainya (*how*) harus dirinci menjadi *kebijakan* yang dapat digunakan sebagai landasan bagi implementasinya, dalam bentuk program dan kegiatan. Melalui proses yang demikian rinci maka berbagai input yang diperlukan dapat diwujudkan menjadi output yang merupakan tolok-ukur kinerja nyata dari sasaran itu sendiri. Kinerja harus dapat memberikan manfaat bagi pelanggan maupun *stakeholder* serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multidimensional dalam arti mampu memberikan manfaat bagi semua pihak. Hal ini dapat direalisasikan apabila didukung oleh suatu kompetensi pelayanan prima. Produk barang ataupun jasa yang disampaikan kepada pelanggan apabila didukung kompetensi pelayanan prima maka seluruh aparat instansi yang bersangkutan akan terjamin untuk selalu menang dalam persaingan karena kepuasan pelanggan dapat tercapai secara optimal. Kompetensi pelayanan prima antara lain meliputi prima dalam penyampaian, prima dalam tindakan serta prima dalam menepati janji kepada pelanggan, selalu belajar dari pengalaman untuk meningkatkan perbaikan yang terus-menerus.

2.5.4. Aparatur Pemerintah yang Berorientasi Pelanggan

Pelayanan instansi pemerintah yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pelanggan dalam perwujudannya melalui pengelola pelabuhan perikanan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Selalu bertindak mendekati diri kepada masyarakat terutama pelanggan dalam arti aktif menghormati dan menghargai

mereka dengan cara : (a) menanyakan apa yang harus dibantu, (b) mendengarkan saran-saran mereka, (c) mendorong agar masyarakat mencoba memanfaatkan pelayanan instansi pemerintah tanpa kecurigaan.

2. Secara terus menerus selalu meningkatkan mutu pelayanan (pendekatan mutu terpadu), berdasarkan semua saran maupun masukan balik yang berasal dari masyarakat mengenai apa yang mereka inginkan/kehendaki. Sehingga, *output* jasa maupun produk yang dihasilkan mampu memberikan nilai tambah (*benefit, impact*).
 - a) Menempatkan masyarakat sebagai pengemudi organisasi atau bekerja dengan logika masyarakat ;
 - b) Mengubah perhatian aparatur pemerintah dari berorientasi kepada birokrasi menjadi selalu berorientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

Landasan hukum pelayanan umum oleh instansi pemerintah antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar

Pelayanan Minimal

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat

Selama ini masyarakat merasakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur Pemerintah masih jauh dari memuaskan sering berbelit-belit, dilaksanakan dengan kurang bersahabat, kurang keperdulian maupun sangat kaku dan kurang disesuaikan dengan keadaan. Di lain sisi, sendi-sendi pelayanan umum yang seharusnya adalah sebagai berikut:

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur (tata cara) pelayanan selalu dengan mudah dipahami sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan lancar tidak berbelit-belit.
2. Mengandung kejelasan dan kepastian pelayanan umum, terutama dalam hal
 - tata cara pelayanan yang mudah diikuti,
 - persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelanggan baik persyaratan teknis maupun administratif,

- unit kerja maupun pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan,
 - rincian biaya/ tarif pelayanan termasuk tata cara pembayarannya,
 - jangka waktu penyelesaian pelayanan,
 - hak dan kewajiban baik pihak pemberi pelayanan maupun yang menerima pelayanan berdasarkan atas bukti-bukti pemrosesan pelayanan,
 - pejabat yang bertanggung jawab menerima keluhan masyarakat.
3. Keamanan, dalam arti bahwa seluruh proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan rasa aman karena didukung oleh adanya kepastian hukum.
 4. Keterbukaan, dalam arti seluruh prosedur, persyaratan, pejabat/unit kerja penanggung-jawab pelayanan, jangka waktu penyelesaian, rincian biaya, tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka sehingga mudah diketahui oleh masyarakat umum baik diminta maupun tidak.
 5. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat terselenggara dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
 6. Efektif, dalam arti persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan kesesuaian antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan; dicegah timbulnya pengulangan dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan terutama antara unit kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait.
 7. Ekonomis, dalam arti penetapan biaya pelayanan umum harus wajar karena perlu memperhatikan nilai barang/jasa yang diberikan dalam rangka pelayanan, kemampuan membayar masyarakat yang memerlukan pelayanan serta berdasarkan atas

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Keadilan, dalam arti cakupan jangkauan pelayanan umum diusahakan harus seluas mungkin sehingga semua pihak yang membutuhkan dapat terjangkau secara merata.

Sendi-sendi pelayanan umum tersebut merupakan faktor-faktor penentu kepuasan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009. Faktor-faktor tersebutlah yang menentukan bahwa asas pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau. Oleh karena itu harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut :

1. Hak maupun kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas.
3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah terpaksa harus mahal, maka Instansi Pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.5. Kewajiban Menetapkan Kebijakan Pelayanan

Merujuk berbagai penjelasan yang telah diuraikan di atas

serta keberadaan berbagai ketetapan Pemerintah yang mengharuskan semua Instansi Pemerintah menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, maka perlu masing-masing instansi segera menetapkan kebijakan pengaturan tata laksana pelayanan umum. Salah satu peraturan perundangan yang bisa dipakai rujukan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang baik adalah:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya guna menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat. Peraturan tersebut bermanfaat bagi para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para pengambil keputusan (penanggungjawab pelayanan publik) dalam rangka:

1. Meraih kepercayaan publik terhadap kinerja penanggungjawab, penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik,
2. Menilai status kinerja pelayanan publik berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan,
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara

- penanggungjawab, penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat pengguna pelayanan,
4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan publik,
 5. Membantu para pengambil keputusan (Kepala Dinas, Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat) dalam mengarahkan rencana dan alokasi sumberdaya pembangunan ke kebutuhan masyarakat,
 6. Membantu institusi-institusi pengawasan (intern maupun ekstern) dalam melakukan fungsinya secara lebih efektif

2.6. Pelayanan di Pelabuhan Perikanan

Secara umum pelayanan di PP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, pelayanan yang bersifat langsung kepada nelayan/pengusaha perikanan untuk menyediakan barang/jasa yang mereka butuhkan. Kedua, pelayanan kepada masyarakat umum di dalam pelabuhan menggunakan metodologi yang lebih bersifat massal agar supaya mereka (nelayan serta para pengusaha perikanan) lebih mampu memajukan usahanya dengan menggunakan berbagai fasilitas yang tersedia di pelabuhan

2.6.1. Pelayanan Langsung Kepada Nelayan/Pengusaha Perikanan

Pelayanan untuk memenuhi keperluan pengguna jasa pelabuhan bersifat langsung dan kasuistis dalam arti dilakukan secara kasus demi kasus. Pelayanan langsung sering memerlukan tenaga yang memiliki keterampilan tertentu (listrik, las, mesin diesel dan lain sebagainya) karena perhatian utama adalah supaya apa yang dikehendaki oleh pengguna jasa dapat segera dipenuhi dengan sebaik-baiknya (prima). Pelayanan yang diperlukan meliputi berbagai kegiatan mulai dari sarana produksi, pemasaran hasil sampai dengan distribusinya. Misalnya mereka membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) seperti bensin dan solar, perbekalan ke laut atau apabila membutuhkan perawatan serta perbaikan sarana

produksi supaya tetap berfungsi secara optimal.

Tenaga yang melakukan pelayanan hendaknya memiliki keahlian tertentu yang diperkuat melalui suatu bentuk surat keterangan/sertifikat. Hal ini dimaksudkan agar dapat selalu dilakukan penjenjangan/akreditasi untuk mempertahankan atau meningkatkan keterampilan tersebut. Dengan demikian pemberian pelayanan umum oleh PP menjadi semakin prima. Di samping itu semua, sertifikasi keterampilan juga dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayanan tetap berdasarkan atas asas efisiensi serta tidak melanggar etika profesi. Tanggung jawab pelayanan yang diberikan adalah sepenuhnya untuk kepentingan para pengguna jasa. Biaya/tarif pelayanan ditetapkan untuk imbalan jasa keahlian ditambah dengan margin atas bahan-bahan yang telah diterima oleh pengguna jasa. Karena bersifat kasuistis dan langsung antara pemberi jasa kepada pihak yang menerima jasa maka masalah administrasi menjadi relatif sederhana.

Pelayanan umum yang diberikan langsung kepada para pengguna jasa dapat dilakukan oleh manajemen pelabuhan sendiri, atau oleh swasta apabila biaya pelayanan terpaksa masih mahal. Bisa juga oleh keduanya apabila masih ada keahlian atau keterampilan-keterampilan tertentu yang belum sepenuhnya dapat dicukupi oleh pihak swasta. Prinsip, efisiensi antara lain ditempuh melalui tiadanya kemungkinan monopoli, supaya selalu tercipta iklim persaingan yang sehat sehingga prinsip pelayanan prima bisa terwujud.

Berbagai ketentuan pelayanan umum harus jelas terbaca pada setiap tempat di mana masyarakat pengguna jasa sering berkumpul. Pengumumannya singkat dan tidak bersifat larangan serta mengandung segala persyaratan yang ditentukan untuk memperoleh pelayanan. Misalnya ketentuan mengenai macam jasa yang tersedia, proses pengajuan untuk mendapatkan pelayanan, lamanya penyelesaian pelayanan, tarif jasa, prosedur pembayaran, unit kerja penanggung jawab yang harus dihubungi dan lain sebagainya.

2.6.2. Pelayanan Ditujukan Kepada Masyarakat dalam Pelabuhan Perikanan

Tujuan utama pelayanan umum bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam pelabuhan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha perikanan sehingga pendapatan mereka betul-betul didasarkan atas teknologi berproduksi yang maju, bisnis yang sehat serta memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan usaha perikanan industri secara keseluruhan. Keahlian/keterampilan tenaga pelaksana pelayanan sangat komprehensif meliputi berbagai aspek yang memungkinkan tumbuhnya iklim usaha perikanan yang kondusif. Misalnya mengenai sistem sanitasi dan higienis bagi keseluruhan lingkungan pelabuhan termasuk pemahaman masyarakat PP arti penting sanitasi dan higienis bagi kemajuan usaha serta kesejahteraannya.

Pemahaman tersebut kemudian diaplikasikan pada seluruh kegiatan usaha mereka seperti dalam hal penanganan ikan di atas kapal, penanganan ikan di pelabuhan, pengolahan dan distribusi/pemasaran hasil. Pengetahuan pelaksana untuk meningkatkan iklim yang kondusif di pelabuhan perikanan juga termasuk berbagai kelembagaan perikanan yang masih berlaku. Karena penyampaian pelayanan umum pelabuhan yang disampaikan menggunakan kelembagaan yang mereka anut akan lebih efektif hasilnya. Cara sosialisasi dan penyampaian harus menarik dan biasanya metoda yang umum digunakan adalah penyuluhan (*extension education*). Misalnya, dilakukan melalui kelompok-kelompok atau apabila sudah ada, melalui organisasi-organisasi di mana mereka menjadi anggota. Sehingga, masing-masing pimpinan kelompok atau organisasi merupakan *contact persons* bagi para pelaksana pelayanan umum kepelabuhanan. Petugas pelayanan umum sepenuhnya berasal dari Pemerintah dan pelaksanaannya bersifat monopoli dan bukan merupakan jasa pelayanan yang memungut biaya.

Untuk mewujudkan pengertian bahwa produksi ikan yang mereka usahakan harus berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan,

sarana dan prasarana pelabuhan juga harus selalu dalam keadaan bersih dan sehat. Apa yang ditekankan bahwa mutu hasil perikanan yang didaratkan di pelabuhan dapat dipertahankan apabila ditangani dan diolah menggunakan tenaga maupun peralatan yang bersih serta sehat.

BAB III

Profil

PPN Pengambengan

3.1. Keadaan Umum Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana yang beribukota di Negara adalah satu dari sembilan Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali. Terletak di belahan barat pulau Bali, membentang dari arah barat ke timur pada $8^{\circ}09'30''$ - $8^{\circ}28'02''$ LS dan $114^{\circ}25'53''$ - $114^{\circ}56'38''$ BT (www.jembranakab.go.id).

Batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kab. Buleleng
- Sebelah Timur : Kab. Tabanan
- Sebelah Barat : Selat Bali
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Luas wilayah Jembrana 841.800 Km^2 atau 14,96% dari luas wilayah pulau Bali. Terdiri dari lima kecamatan, yaitu Kec. Melaya, Kec. Negara, Kec. Jembrana, Kec. Mendoyo, dan Kec. Pekutaan.

Berdasarkan ketinggian tanah di bagian utara wilayah Kabupaten Jembrana mempunyai morfologi dan fisiografi pegunungan yang dibentuk oleh deretan pegunungan Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang dan Gunung Batas. Ketinggian tempat bervariasi antara 250–700 m dpl. Sedangkan di bagian selatan wilayah Kabupaten Jembrana topografinya relatif datar hingga bergelombang, ketinggian

tempat ini berkisar antara 1–250 m dpl

3.2. Lokasi dan Sejarah Singkat

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan terletak pada posisi 08° 23' 46" Lintang Selatan dan 114° 34' 47" Bujur Timur, terletak di desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali. Berjarak 9 Km dari Kota Negara dan 105 Km dari Kota Denpasar. Posisinya menghadap ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 Samudera Hindia (Selatan Pulau Jawa) dan Selat Bali.

Kegiatan Perikanan di Pengambangan telah dimulai sejak empat puluhan tahun yang lalu. Pada mulanya berupa PPI yang dibangun pada tahun 1976/1977. Secara bertahap dikembangkan dan oleh *Fisheries Infrastructure Sector Project*, dilakukan studi kelayakan melalui *Roger Consulting Marine Gmbh* pada tahun 1988.

Berdasarkan hasil studi tersebut, dilakukan pembangunan beberapa fasilitas pada tahun 2000 sampai tahun 2003 antara lain *breakwater*, *jetty*, jalan, dan tempat pelelangan ikan. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2014, dilakukan penambahan fasilitas berupa dermaga, turap, *groin*.

Melalui surat Nomor 523.2/0211/Prod/DKP tanggal 28 Februari 2005, Gubernur Bali mengusulkan peningkatan status pelabuhan. Dengan pertimbangan, agar pengelolaannya menjadi lebih terarah dalam rangka menuju pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertimbangan lain, untuk mengoperasionalkan pelabuhan perikanan diperlukan jumlah personil dan biaya operasional yang cukup besar. Padahal, kemampuan keuangan daerah terbatas untuk membiayai operasional dan pemeliharaan pelabuhan.

Usulan itu disetujui Pemerintah. Melalui surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 29 Desember 2007 dilakukan peningkatan kelas, dari PPI Pengambangan menjadi PPP

Pengembangan. Selanjutnya, melalui surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B.2672/M.PAN/9/2009 tanggal 11 September 2008, ditetapkan peningkatan status kelas dari PPP menjadi PPN dan diresmikan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan pada tanggal 6 Februari 2009

PPN Pengembangan didukung oleh industri pengolahan ikan yang ada di komplek maupun yang ada di luar komplek pelabuhan. Yaitu industri pengalengan ikan dan penepungan ikan berjumlah 12 unit (di luar komplek pelabuhan), serta 1 unit industri di dalam komplek pelabuhan yaitu PT. Cilacap Samudra *Fishing Industry* yang kegiatannya bergerak di bidang *cold storage* dan galangan kapal.

Sebagai UPT Ditjen KKP, PPN Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam hal ini tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :

- 1 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
- 2 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
- 3 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
- 4 Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

3.3. Landasan Hukum Pengelolaan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pengelolaan PPN Pengembangan mengacu kepada landasan hukum yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran;

4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, tentang Sampah;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut;
6. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002, tentang Usaha Perikanan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.18/MEN/2005. Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.08/MEN/2012. Tanggal 20 April Tahun 2012 Tentang Kepelabuhanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.20/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30/MEN/2012 sebagaimana diubah Permen KP Nomor 26/PERMEN-KP/2013 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan.
13. Persetujuan MENPAN No: B-2672/M.PAN/9/2008 untuk Peningkatan Status PPN Pengambengan.

3.4. Organisasi dan Tata Kerja PPN Pengambengan

A. Kedudukan PPN Pengambengan

Mengacu kepada Undang - Undang 45 Tahun 2009, fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
2. Pelayanan bongkar muat;
3. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
4. Pemasaran dan distribusi ikan;
5. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
6. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
7. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
8. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
9. Pelaksanaan kesyahbandaran;
10. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
11. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
12. Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
13. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau
14. Pengendalian lingkungan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 20/PERMEN-KP/2014 tanggal 16 Mei 2014, PPN Pengambengan mempunyai kedudukan sebagai UPT di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya PPN Pengambengan mempunyai beberapa fungsi yang harus dilaksanakan, antara lain:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *log book*;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;

6. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Berdasar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.15/MEN/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan diubah lagi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.19/MEN/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.20/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan. PPN Pengambengan adalah UPT di bidang pelabuhan

perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada DJPT KKP. Sesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 20/PERMEN-KP/2014, Pelabuhan Perikanan bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT PPN Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
- b) Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- c) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- d) Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book*;
- e) Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat Persetujuan Berlayar;
- f) Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- g) Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i) Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j) Pelayanan Jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k) Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l) Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- m) Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- n) Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
- o) Pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari.

p) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur organisasi di PPN Pengembangan pada tahun 2019 terdiri dari :

1. Kepala Pelabuhan
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan
4. Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
5. Kepala Seksi Kesyahbandaran



Gambar 4. Struktur Organisasi PPN Pengembangan Tahun 2019

1. Kepala Pelabuhan

Kepala Pelabuhan mempunyai beberapa tugas pokok yaitu mengevaluasi penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan; pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan; pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan

Kapal Perikanan; pelaksanaan pemeriksaan *Log Book*; pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; dan pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar.

Tugas pokok Kepala Pelabuhan juga termasuk dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana; pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan.

Selain itu, Kepala Pelabuhan juga memiliki tugas pokok memimpin pelaksanaan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi; pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB); pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha mempunyai beberapa tugas pokok yaitu mengkoordinir pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan.

Pada Sub bagian Tata Usaha membawahi beberapa nama jabatan dan uraian tugasnya sebagai berikut:

a) Penata Usaha Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan (RTP)

Melaksanakan penyusunan rencana pengadaan barang operasional (alat tulis kantor, rumah tangga, cetakan) dengan cara mendistribusikan sesuai kebutuhan, untuk penyelesaian penyusunan rencana pengadaan barang, serta eksploitasi kendaraan dinas yang memfasilitasi kegiatan rumah tangga kantor dan melakukan input data SPM belanja modal beserta SP2D yang diterbitkan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan input data persediaan ke dalam aplikasi persediaan.

b) Analis Kepegawaian

Melakukan penatausahaan urusan kepegawaian meliputi penyiapan konsep, pengetikan, penomoran, penggandaan, pendistribusian dan pengarsipan surat-surat kepegawaian, membuat rumusan surat keputusan (SK) intern, surat dinas, prosedur operasional standar (POS), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab), menyiapkan bahan presentasi pimpinan dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) serta pengukuran kinerja (BSc).

c) Arsiparis

Melakukan penatausahaan surat masuk dan surat keluar serta penatausahaan surat dinas.

d) Bendahara Pengeluaran

Melakukan pengelolaan penatausahaan administrasi keuangan Negara berupa pencatatan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN satuan/unit kerja Pelabuhan Perikanan.

e) Pembantu Bendahara

Melakukan penatausahaan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui kegiatan penerimaan, penyetoran dan pertanggungjawaban pada satuan kerja PPN Pengambengan dan melakukan penyiapan daftar gaji pegawai dan uang honor tenaga honorer pada setiap bulannya dan diajukan ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).

f) Pengadministrasi Keuangan

Melakukan pengelolaan data Sistem Akuntansi Instansi (SAI), penatausahaan administrasi keuangan Negara berupa laporan Surat Perintah Membayar (SPM), Laporan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan pengelolaan rencana kerja dan anggaran (Aplikasi RKAKL).

3. Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai beberapa tugas pokok yaitu mengkoordinir pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi; pelayanan pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; pelayanan jasa, dan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.

Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha membawahi beberapa nama jabatan dan uraian tugasnya sebagai berikut:

a) Teknisi

Melakukan perbaikan dan pemasangan instalasi listrik, air bersih dan perlengkapan kantor Pelabuhan Perikanan.

b) Petugas Pelayanan Jasa dan Fasilitas

Melakukan pengelolaan pelayanan jasa dan fasilitas yang dimiliki Pelabuhan Perikanan.

c) Pengadministrasi dan Pelaporan

Melakukan penyiapan administrasi kegiatan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan dan administrasi pengelolaan jasa dan fasilitas Pelabuhan Perikanan

d) Petugas Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan

prasarana Pelabuhan Perikanan.

e) Petugas Pengawasan dan Pengendalian Pelabuhan Perikanan

Melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana Pelabuhan dan Perikanan.

f) Petugas Pemantauan Wilayah Pesisir

Melakukan pengawasan dan pemantauan segala aktivitas yang ada di kawasan Pelabuhan Perikanan.

g) Penyusun Rencana Pengembangan Usaha Pelabuhan Perikanan

Melakukan rencana kegiatan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan.

4. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan

Seksi Operasional Pelabuhan mempunyai beberapa tugas pokok yaitu mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.

Seksi Operasional Pelabuhan membawahi beberapa nama jabatan dan uraian tugasnya sebagai berikut:

a) Petugas Pendataan

Membantu kepala Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan dalam pengolahan, penyajian data dan informasi serta pembuatan laporan bulanan

b) Pengadministrasi Bahan Informasi dan Publikasi

Melakukan publikasi informasi data/statistik perikanan, informasi hasil riset kelautan dan perikanan serta pendataan jumlah nelayan.

c) Petugas Inspeksi Pembongkaran Ikan

Melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan, menganalisis mutu hasil perikanan melalui uji laboratorium.

5. Seksi Kesyahbandaran

Seksi kesyahbandaran mempunyai beberapa tugas pokok yaitu mengkoordinir pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laport, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis, serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Seksi Kesyahbandaran membawahi beberapa nama jabatan dan uraian tugasnya sebagai berikut:

a) Syahbandar Perikanan

- Melakukan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
- Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan, mengawasi pemanduan, mengawasi pengisian bahan bakar, mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran, melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan, memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan, mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan.

b) Teknisi Kelaikan Alat Penangkap Ikan

- Melakukan pemeriksaan terhadap alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ada diatas kapal perikanan.

c) Teknisi Kelaikan Kapal Perikanan

- Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan yang meliputi: SIPI (Asli), SIKPI (Asli), Stiker *Barcode*, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan (Asli), *Log Book* Perikanan, SLO, Surat Ukur, Surat Tanda

Kebangsaan, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan, Sertifikat Radio Kapal serta penerbitan STBLKK dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Khusus untuk kelompok jabatan fungsional tertentu yang ada pada saat ini yakni jabatan Pengawas Mutu Hasil Perikanan dan Pengawas Perikanan.

a) Pengawas bidang Mutu Hasil Perikanan

- Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil;
- Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan;
- Menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- Melakukan pengamatan (*monitoring*) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran/pemanenan distribusi termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi;
- Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra pengolahan;
- Pelaksanaan investigasi kasus penolakan;
- Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan;
- Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
- Melakukan Evaluasi dan Pelaporan.

b) Pengawas Bidang Penangkapan Ikan

- Mengumpulkan data bulanan dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan;
- Pengumpulan data triwulan dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan;
- Meneliti dokumen alat penangkapan ikan dalam rangka

- pengawasan alat penangkap ikan;
- Meneliti dokumen mesin kapal perikanan dalam rangka pengawasan mesin kapal perikanan;
- Mengumpulkan dan memeriksa pengisian *log book* perikanan dalam rangka pengawasan *log book* perikanan;
- Mengumpulkan sampel ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- Mengukur komposisi panjang dan berat ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan

3.5. Jumlah Pegawai

Daftar komposisi PNS di PPN Pengambengan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada Tabel 4:

Tabel 4. Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Tahun 2019

Bagian/Bidang	Golongan				Total	Pendidikan					Total
	I	II	III	IV		S3	S2	S1	D1&D3	SLTA	
Kepala pelabuhan				1	1		1				1
Kasubag tata usaha			1		1			1			1
Subbag tata usaha		1	5		6			5		1	6
Kasi operasional pelabuhan			1		1		1				1
Seksi operasional pelabuhan			2		2			2			2
Kasi tata kelola dan pelayanan usaha			1		1			1			1
Seksi tata kelola dan pelayanan usaha		1			1				1		1

Kasi kesyahbandaran	1	1	1						1	
Seksi kesyahbandaran	3	3	2	1			1		3	
Jabatan fungsional	3	10	13	1	8		4		13	
Tenaga kontrak				1	16	4	12	1	34	
Jumlah	5	24	1	30	4	36	4	19	1	64

Sumber: PPN Pengambengan, 2019

BAB IV

Fasilitas

PPN Pengambangan

4.1. Fasilitas-Fasilitas di PPN Pengambangan

Untuk menunjang operasional PPN Pengambangan, dibutuhkan fasilitas dan atau sarana yang meliputi fasilitas pokok, fungsional dan penunjang, seperti tersaji pada penjelasan dibawah ini:

1. Fasilitas Pokok

A. Fasilitas pelindung

Breakwater adalah penahan gelombang dan merupakan fasilitas pelindung utama di pelabuhan. *Breakwater* yang berada di PPN Pengambangan dibuat pada tahun 2003 dan sampai saat ini masih berfungsi dengan baik. Memiliki ukuran 1.627 m dengan konstruksi *rubble mound* dengan elevasi puncak 0,5 m. *Breakwater* ini berbentuk tumpukan batu yang memanjang dengan irisan melintang berbentuk trapesium. Tumpukan batu tersebut terdiri dari batu besar di bagian atas dan semakin ke dalam berukuran relatif kecil. Menurut Murdiyanto (2004), *breakwater* memiliki sifat fleksibel, yang berarti potensi kerusakan karena serangan gelombang tidak akan terjadi secara tiba-tiba (tidak fatal).



Gambar 5. *Breakwater* di PPN Pengambangan

B. Fasilitas tambat (Dermaga)

Dermaga di PPN Pengambangan memiliki ukuran 181x7 m dan dibuat pada tahun 2013. Digunakan sebagai tempat bongkar muat hasil tangkapan serta tempat bertambatnya kapal.



Gambar 6. Dermaga di PPN Pengambangan

C. Fasilitas perairan

Untuk menuju PPN Pengambangan, kapal harus melewati alur pelayaran. Alur pelayaran PPN Pengambangan memiliki panjang 15.5 ha. Namun untuk kedalaman kolam labuh belum memenuhi standar operasional untuk PPN yakni minus 3 meter, sedangkan

kedalaman kolam labuh saat ini minus 0,5 meter berdasarkan hasil pengukuran secara mandiri dan manual pada tahun 2018



Gambar 7. Kolam Labuh PPN Pengambengan

D. Fasilitas navigasi pelayaran

Saat ini fasilitas berupa lampu navigasi pelayaran di PPN Pengambengan belum tersedia. Adapun untuk menyasati hal tersebut pengelola PPN Pengambengan mengandalkan lampu dermaga tanda masuk kolam pelabuhan

2. Fasilitas Fungsional

A. Tempat pemasaran hasil perikanan (Tempat Pendaratan Ikan)

Tempat Pemasaran Ikan di PPN Pengambengan dibangun pada tahun 2000 dan berukuran 1.361 m². Bangunan yang terbuat dari beton tersebut saat ini kondisinya masih dalam kategori baik. Walaupun sebenarnya Gedung TPI ini digunakan sebagai tempat melakukan pelelangan ikan, namun dalam kenyataannya gedung TPI belum dioperasikan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah kewenangan Pemerintah Daerah, Adapun saat ini proses serah terima pengelolaan dan perjanjian kerjasama dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sedang berlangsung.



Gambar 8. TPI di PPN Pengambengan

B. Fasilitas penghubung

Fasilitas yang menghubungkan PPN Pengambengan dengan lingkungan sekitar memiliki jalan utama seluas 5.435 m² yang dibangun pada tahun 2007.



Gambar 9. Jalan utama PPN Pengambengan

C. Fasilitas air bersih

Terdapat penampungan air bersih berupa tower air berukuran 74.5 m².



Gambar 10. Tower Air di PPN Pengambangan

D. Fasilitas es

Pabrik es didirikan pada tahun 1976 dengan luas 240 m² dan mulai beroperasi pada tahun 1978 dengan produksi awal berupa es curah. Namun pada tahun 2000 telah dilakukan perubahan dan perbaikan sehingga produksinya berubah menjadi es balok. Pada tahun 2003, pabrik es tersebut ditingkatkan kemampuan produksinya dari 200 balok/hari menjadi 300 balok/hari. Namun pada tahun 2004, pabrik es ini mengalami kendala sumber air bersih sehingga produksinya terhenti. Sebelum berproduksi lagi, pada tahun 2005 dilakukan perbaikan suku cadang pada mesin pembuat es yang telah aus dimakan usia. Adanya sumber air bersih baru yang berasal dari *water treatment*, mulai tahun 2006 ini, pabrik es tersebut sudah dapat beroperasi kembali sehingga kebutuhan es untuk kegiatan nelayan dapat terpenuhi.

Di PPN Pengambangan juga terdapat fasilitas *cold storage* seluas 126.8 m² yang dibangun oleh Ditjen Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun *cold storage* yang ada masih belum dimanfaatkan secara optimal karena hasil penangkapan ikan di PPN Pengambangan rata-rata ikan pelagis kecil seperti lemuru, layang dan tongkol yang bukan termasuk dalam ikan dengan nilai ekonomis tinggi sehingga untuk disimpan di *cold storage* masih

terkendala harga jual kembali, ikan yang ditangkap hamper keseluruhan sudah terserap untuk bahan baku pabrik pengalengan dan penepungan ikan serta didistribusikan keluar daerah seperti ke Denpasar dan Jawa, serta biaya operasional yang tinggi.



Gambar 11. Pabrik Es di PPN Pengambangan



Gambar 12. *Cold Storage* di PPN Pengambangan

E. Fasilitas bahan bakar

Fasilitas bahan bakar di PPN Pengambangan berupa bahan bakar solar yang memiliki kapasitas 5.000 liter per hari. Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dalam jumlah yang cukup dan memadai untuk kegiatan operasional kapal perikanan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kelancaran usaha

perikanan. Penyaluran BBM Solar di PPN Pengambangan dilakukan oleh PT. Dua Berjaya yang berada di kawasan PPN Pengambangan



Gambar 13. SPBN di PPN Pengambangan

F. Fasilitas listrik

Fasilitas listrik di PPN Pengambangan bersumber dari PLN berkapasitas 427 Kva. Disamping itu tersedia sebuah genset ± 12 KVA yang digunakan sebagai mesin operasional.



Gambar 14. Genset PPN Pengambangan

G. Fasilitas komunikasi

Alat komunikasi yang terdapat di PPN Pengambangan terdiri dari 1 buah jaringan telepon, 1 buah jaringan internet dan 2 buah radio SSB.

H. Fasilitas pemeliharaan

Bengkel PPN Pengambangan mempunyai luas 150 m², dibangun pada tahun 1976 dan mengalami rehabilitasi pada tahun 2004. Bengkel tersebut digunakan untuk perbaikan kapal-kapal nelayan. Walaupun demikian tidak sedikit masyarakat umum ikut menggunakan fasilitas bengkel tersebut. Bengkel tersebut dilengkapi dengan mesin bubut, mesin las, scrap, mesin bor dan lain-lain.

I. Fasilitas perkantoran

Luas kantor pelabuhan saat ini 240 m² yang dibangun pada tahun. Selain itu juga terdapat kantor bina mutu seluas 100 m² di PPN Pengambangan.



Gambar 15. Kantor PPN Pengambangan

3. Fasilitas Penunjang

A. Balai pertemuan nelayan

Balai ini memiliki luas 250 m², yang dapat dimanfaatkan bagi nelayan untuk mengadakan pertemuan



Gambar 16. Balai Pertemuan Nelayan di PPN Pengambangan

B. Rumah karyawan

Rumah karyawan PPN Pengambangan dengan luas 246 m², saat ini kondisinya masih tergolong baik



Gambar 17. Rumah tinggal karyawan di PPN Pengambangan

C. Pos jaga

Pos jaga berjumlah 1 buah seluas 27 m² yang dibangun tahun 2004. Terletak di depan pintu masuk pelabuhan.



Gambar 18. Pos jaga di PPN Pengambengan

D. Tempat peribadatan

Tempat ibadah yang ada saat ini berupa pura yang dibangun tahun 2003. Selain itu terdapat mushola dengan luas 124 m²



Gambar 19. Pura di PPN Pengambengan



Gambar 20. Mushola di PPN Pengambengan

E. MCK (Mandi Cuci Kakus)/Toilet

MCK di PPN Pengambengan berjumlah 2 kamar dengan ukuran masing –masing 3x4 m. Saat ini dalam kondisi baik.



Gambar 21. Toilet di PPN Pengambengan

4.2. Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas

Analisis tingkat pemanfaatan fasilitas di PPN Pengambengan digunakan untuk menilai tingkat pemanfaatan fasilitas di PPN Pengambengan. Tingkat pemanfaatan fasilitas-fasilitas pelabuhan di PPN Pengambengan dilakukan dengan menggunakan analisis

persentase pemanfaatan. Menurut Bambang dan Suherman (2006) batasan untuk mengetahui pemanfaatan fasilitas PP adalah sebagai berikut diukur dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase pemanfaatan} = \frac{\text{Penggunaan fasilitas}}{\text{Kapasitas fasilitas}} \times 100\%$$

- Jika persentase pemanfaatan > 100 % maka tingkat pemanfaatan fasilitas pelabuhan melebihi batas optimal.
- Jika persentase pemanfaatan = 100 % maka tingkat pemanfaatan fasilitas pelabuhan dalam kondisi optimal.
- Jika persentase pemanfaatan < 100 % maka tingkat pemanfaatan fasilitas pelabuhan dalam kondisi belum optimal.

Pada fasilitas yang kapasitasnya tidak tentu, maka besarnya pemanfaatan dipertimbangkan secara subjektif.

Analisis pemanfaatan lain untuk setiap fasilitas di PP, bisa digunakan berdasarkan Dirjen Perikanan (1981), sebagai berikut:

A. Kolam Pelabuhan

Luas kolam pelabuhan di PPN Pengambangan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$L = lt + (3 \times n \times l \times b)$$

$$lt = \pi r^2$$

Keterangan:

- L : luas kolam pelabuhan (m²)
- lt : luas untuk memutar kapal (m²)
- r : panjang kapal terbesar (m)
- π : 3,14
- n : jumlah kapal maksimum yang berlabuh
- l : panjang kapal rata-rata (m)
- b : lebar kapal terbesar (m)

Kedalaman kolam dihitung dengan menggunakan rumus:

$$D = d + 0,5h + s + c$$

Keterangan:

- D : kedalaman perairan (cm)
- d : draft kapal terbesar (cm)
- h : tinggi gelombang maksimum (cm)
- s : *squat*, tinggi ayunan kapal yang melaju (10-30 cm)
- c : *clearance*, jarak aman lunas kapal ke dasar perairan (25-100 cm)

B. Dermaga

Panjang dermaga yang dibutuhkan di PPN Pengambengan dapat dicari dengan rumus :

$$L = \frac{(l + s) \times n \times a \times h}{u \times d}$$

Keterangan:

- L : panjang dermaga (m)
- l : lebar kapal (m)
- s : jarak antar kapal (m)
- n : jumlah kapal yang memakai dermaga rata-rata perhari
- a : berat rata-rata kapal (ton), $V = p \times l \times d \times c$ (koefisien)
- h : lama kapal di dermaga (jam), waktu yang digunakan dalam bersandar
- u : produksi rata-rata (ton)
- d : lama *fishing trip* rata-rata (jam)

Panjang dermaga yang dibutuhkan dapat juga dicari dengan rumus:

$$L = \frac{M}{P} \times l \times 1,2$$

Keterangan :

- L : panjang dermaga (m)
- M : rata-rata kapal berlabuh tiap hari (unit)

- P : lama kapal melakukan kegiatan di dermaga (jam)
l : panjang rata-rata kapal (m)

Dermaga merupakan fasilitas dasar yang sangat penting fungsinya untuk melayani kapal berlabuh. Aktivitas penggunaannya sehari-hari sangat efektif. Untuk menjamin keamanan kapal saat merapat dan berlabuh, dermaga perlu dilengkapi dengan *fender* untuk menahan benturan kapal sewaktu merapat dan *bollard* untuk menambat kapal.

C. Gedung Pelelangan

Penyediaan ruang (*space*) dan perlengkapan untuk melakukan *handling* hasil tangkapan, penjualan dan pengawetan ikan. Ke dalamnya termasuk bangunan tempat penjualan atau pelelangan ikan, *cold storage*, pabrik es. Fasilitas ini merupakan fasilitas utama sebagai fasilitas fungsional. Fasilitas berupa gedung dan ruangan atau luasan daratan di dalam pelabuhan yang dapat dipakai untuk menurunkan ikan dari kapal (misalnya dengan alat kran) penanganan (*handling*), penjualan atau mengolah ikan baik dengan penjemuran atau mengerjakan pengesan atau pekerjaan lain terhadap hasil ikan atau produk hasil laut lainnya. Yang cukup besar bangunannya adalah tempat pelelangan ikan yaitu bangunan yang cukup luas untuk menaruh ikan yang akan dijual dengan sistem lelang lengkap dengan kantor petugas. Lantai tempat lelang harus cukup luas, mudah untuk keluar masuk orang dan ikan (dalam keranjang atau box plastik) yang diperjual belikan dan dengan konstruksi lantai yang mudah dibersihkan. Luas tempat lelang dan sistem lelang harus diperhitungkan dengan cermat agar hasil ikan segar dapat langsung dilelang dan diproses lebih lanjut untuk mengurangi risiko kebusukan karena harus menunggu lamanya proses lelang misalnya.

Pekerjaan yang biasa dilakukan di gedung pelelangan adalah :

- **Menyortir.** Memilah, membersihkan dan menimbang ikan di

- ruang sortir untuk persiapan penjualan dengan cara lelang ikan.
- **Peragaan.** Memperagakan ikan untuk dilelang di lantai atau ruang lelang,
 - **Mengepak.** Melakukan pengepakan ikan yang telah selesai dilelang di ruang pengepakan ikan untuk kemudian diangkut ke luar tempat lelang.

Luas gedung pelelangan PPN Pengambengan diperhitungkan tergantung pada jumlah produksi ikan yang dilelang setiap hari, jenis ikan dan cara penempatan atau peragaan ikan sewaktu lelang. Biasanya sebagai standar luas tempat lelang berkisar antara 30 ~ 40 % luas keseluruhan gedung pelelangan. Rumus yang dipakai menentukan luas gedung pelelangan adalah sebagai berikut:

$$S = \frac{N \times P}{R \times a}$$

Keterangan:

- S : luas gedung pelelangan (m²)
 N : jumlah hasil tangkapan rata-rata per hari (ton)
 P : daya tampung produksi (m²/ton)
 R : intensitas lelang perhari (1-2 kali per hari)
 a : perbandingan ruang lelang dengan gedung lelang (0.27-0.39)

Nilai P dapat ditentukan memakai besaran pada Tabel 5 (mengacu pada besaran yang dipakai di Jepang dalam *The Planning of Market Halls in Fishing Ports* (Yano, T. and M. Noda, 1970). Perlu diingat pula adanya masa musim puncak (*peak of season*) dan *peak of stock* dari stok harian. Bila terjadi ikan menumpuk karena banyak yang didaratkan harus diatasi dengan penambahan frekuensi dan memperpanjang waktu lelang.

Tabel 5. Faktor Daya Tampung Ruangan (P) Menurut Jenis Ikan

Jenis ikan	Cara pengemasan	Faktor daya tampung ($P=t/m^2$)	
		Scope of numerical value	Average
Jenis ikan kecil, udang, cumi, dll.	Boks ditumpuk hingga 10 lapis	1.25 – 1.67	1.56
Jenis ikan sedang (tongkol, mackerel)	Dikumpulkan dalam jumlah besar	12.0 – 17.8	14.9
Jenis ikan besar (tuna)	Dikumpulkan dalam jumlah besar	12.0 – 14.0	13.0

Sumber: *The Planning of Market Halls in Fishing Ports* (Yano T. & M. Noda, 1970)

Tempat pelelangan ikan perlu dilengkapi dengan keranjang atau boks plastik yang berukuran baku dan dapat ditumpuk sewaktu disimpan. Boks plastik ini dipakai wadah ikan berukuran kecil sampai sedang. Ikan yang lebih besar ukurannya seperti jenis tuna, diperagakan dengan diletakkan berderet beraturan di atas lantai.

D. Lahan PP

Lahan yang digunakan adalah 2-4 kali luas keseluruhan fasilitas. Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan kapasitasnya sehingga didapatkan apakah sarana perlu diperluas atau tidak.

E. Areal Tempat Parkir

Luas tempat parkir yang dibutuhkan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$L = \frac{P \times R}{N \times D}$$

Keterangan:

- P/N : jumlah produksi rata-rata per hari dalam 1 tahun (ton)
 D : daya angkut tiap kendaraan (ton)
 R : ruang gerak untuk tiap kendaraan (m²)
 L : luas tempat parkir (m²)

4.3. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas

Fasilitas-fasilitas yang telah dibangun di PPN Pengembangan sejak berdiri, disajikan di Tabel 6.

Tabel 6. Fasilitas Di PPN Pengembangan

No.	Fasilitas	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Fasilitas pokok			
	a. Areal Pelabuhan (Lahan)	13.5	Ha	
	b. Dermaga	181 x 7	m	Dermaga Utama
	c. <i>Jetty</i> (2 buah)	65x4	m	Dermaga
	d. <i>Breakwater</i>	1.627	m	Sisi Kanan 743 ; Sisi Kiri 884
	e. Kolam pelabuhan (kolam dan alur)	15.5	Ha	
	f. Jalan utama	13.815	m ²	Baik
	g. Drainase	1.738	m ²	Baik
	h. <i>Groin</i> sisi kiri	350	m	
	i. Turap beton	395	m	
	j. <i>Groin</i> sisi kanan	26	m	
2.	Fasilitas fungsional			
	a. Tempat Pelelangan Ikan	1.361	m ²	Baik
	b. Kantor pelabuhan	240	m ²	
	c. Kantor bina mutu	100	m ²	
	d. Menara air	74.5	m ²	
	e. Bangsal perbaikan jarring	400	m ²	
	f. <i>Guest house</i>	110	m ²	
	g. Gudang	30	m ²	

	h. SBPN	16	Ton/hari	
	i. instalasi listrik	427	Kva	
	j. Cold storage	126.8	m ²	
	k. IFM	5	Ton/hari	
3	Fasilitas penunjang			
	a. Mess operator	246	m ²	3 unit
	b. Balai pertemuan nelayan	250	m ²	Baik
	c. WC umum	19.5	m ²	Baik
	d. Tempat ibadah (pura)	145	m ²	Baik
	e. Kantor pelayanan satu atap	54	m ²	Baik
	f. Post jaga	27	m ²	Baik
	g. Waserda	288	m ²	Baik
	h. Musholla	124	m ²	Baik

Sumber: PPN Pengambengan, 2019

Dari fasilitas-fasilitas yang telah dibangun tersebut seluruhnya telah dimanfaatkan oleh nelayan Pengambengan dan dikelola langsung oleh PPN Pengambengan sebagai UPT Dirjen Tangkap.

Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin fasilitas yang ada di Pelabuhan, dengan mengedepankan fasilitas yang benar-benar rusak. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pemeliharaan tahun 2019 di PPN Pengambengan. Pada tahun 2019 di PPN Pengambengan dilakukan rehab Kantor PPN Pengambengan, Pos Pelayanan PPN Pengambengan di Benoa, dan Balai Pertemuan Nelayan PPN Pengambengan dimana alokasi anggaran dari DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

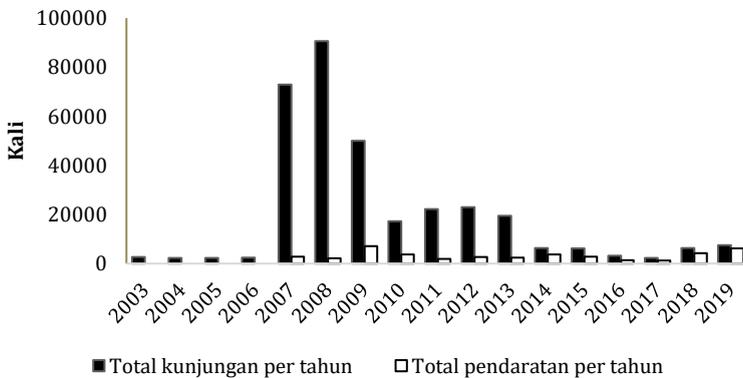
BAB V

Keragaan

PPN Pengambengan

5.1. Kunjungan Kapal dan Pendaratan Ikan

Kapal yang berkunjung ke PPN Pengambengan adalah kapal lokal milik perorangan/nelayan Kabupaten Jembrana serta kapal dari Kabupaten Banyuwangi/Jawa Timur. Kapal nelayan ini beroperasi di Selat Bali serta menggunakan alat tangkap *Purse Seine* dan juga kapal fiber berukuran < 5 GT dengan alat tangkap *gillnet* atau pancing. Ikan hasil tangkapan dominan yaitu ikan lemuru, layang, tongkol, tembang, layur, dan lain-lain.



Gambar 22. Kunjungan Kapal Perikanan dan Aktivitas Pendaratan Ikan PPN Pengambengan Tahun 2003-2019 (PPN Pengambengan, 2019)

Pada Gambar 22 menunjukkan kunjungan dan frekuensi pendaratan ikan tahun 2003 hingga 2019. Kegiatan bongkar muat

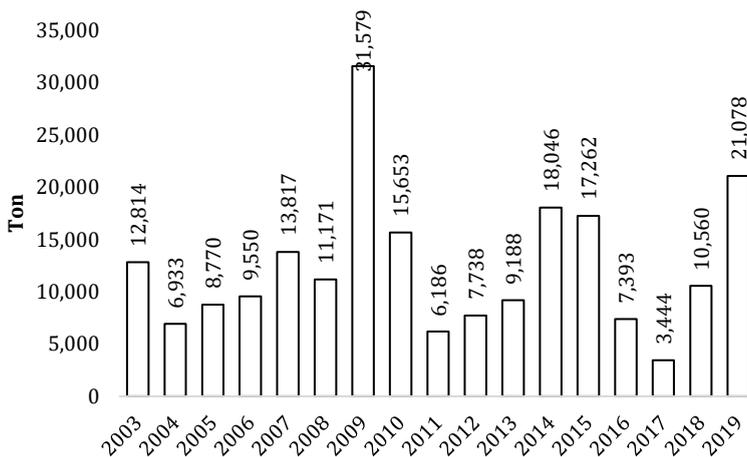
dilakukan oleh Pada Tahun 2019 kunjungan kapal sebanyak 7.489 kali. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah kunjungan kapal yang berasal dari PPN Pengambengan sendiri sebanyak 6.356. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan kapal mengalami kenaikan sebanyak 17,8% dibandingkan tahun 2018, hal ini dikarenakan adanya pendataan pada kapal-kapal fiber yang tambat di kolam pelabuhan. Kunjungan kapal terbanyak justru terjadi di tahun 2008.

Pendaratan ikan di PPN Pengambengan pada tahun 2019 mencapai 21.078 Ton, jika hari kerja dalam tahun 2019 sebanyak 329 hari, maka rata-rata produksi 64 Ton/hari atau mengalami kenaikan sebesar 99,6 % apabila *dibandingkan* dengan pendaratan ikan pada tahun 2018 mencapai 10.560 Ton dengan rata-rata produksi 34 ton/hari. Sedangkan frekuensi pendaratan ikan dari tahun 2007-2019 menurun dan meningkat lagi pada tahun 2018 dan 2019. Pendaratan ikan pada 2019 mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2018. Beberapa faktor terkait peningkatan produksi di PPN Pengambengan, yakni:

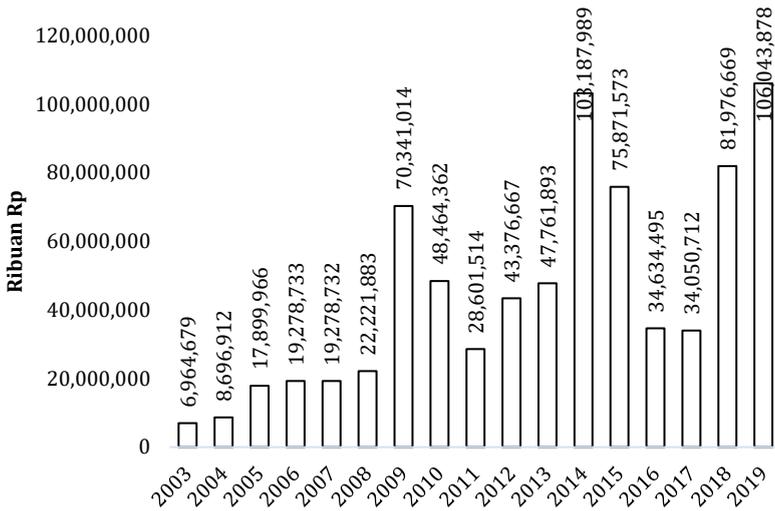
- 1) Faktor cuaca, jika dilihat produksi pada bulan Maret 2019 mulai meningkat yakni dari angka 340 Ton pada bulan Februari menjadi 1.408 Ton pada bulan Maret 2019. Kemudian meningkat lagi pada bulan Mei 2019 dan sempat terjadi penurunan produksi pada bulan Juni 2019 karena terjadi cuaca buruk sehingga nelayan tidak banyak melakukan aktivitas di Laut. Kemudian pada bulan Juli sampai dengan Desember 2019 mengalami puncak musim.
- 2) Pendataan hasil tangkapan untuk kapal di bawah 5 GT melalui kegiatan tim pengolah data sehingga dapat memberikan kontribusi pada hasil tangkapan ikan di PPN Pengambengan.
- 3) Diversifikasi alat tangkap, yakni melalui kegiatan pendampingan bantuan alat tangkap, nelayan dapat memaksimalkan hasil tangkapan selain dari alat tangkap *Purse Seine*. Melalui kegiatan pendampingan ini, penerima bantuan alat tangkap diberikan pelatihan penggunaan alat tangkap dari Balai Besar

Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang. Pelatihan bagi nelayan menggunakan alat tangkap bantuan tersebut sehingga dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan dan pendapatan nelayan (PPN Pengambengan, 2019).

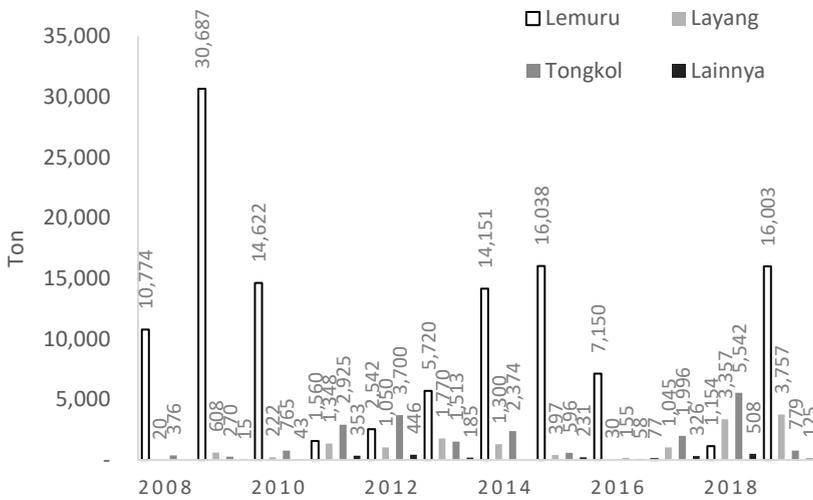
Jenis-jenis ikan yang didaratkan di PPN Pengambengan yang dominan adalah lemuru, tongkol, layang, tembang dan jenis ikan lainnya. Ikan yang didaratkan di PPN Pengambengan digunakan sebagai bahan baku ikan kaleng dan tepung ikan di pabrik-pabrik pengolahan yang ada di sekitar PPN Pengambengan dan dikirim keluar daerah sebagai bahan baku industri pengolahan ikan. Jumlah ikan dan nilainya yang didaratkan di PPN Pengambengan pada tahun 2003-2019 disajikan pada Gambar 23 dan Gambar 24.



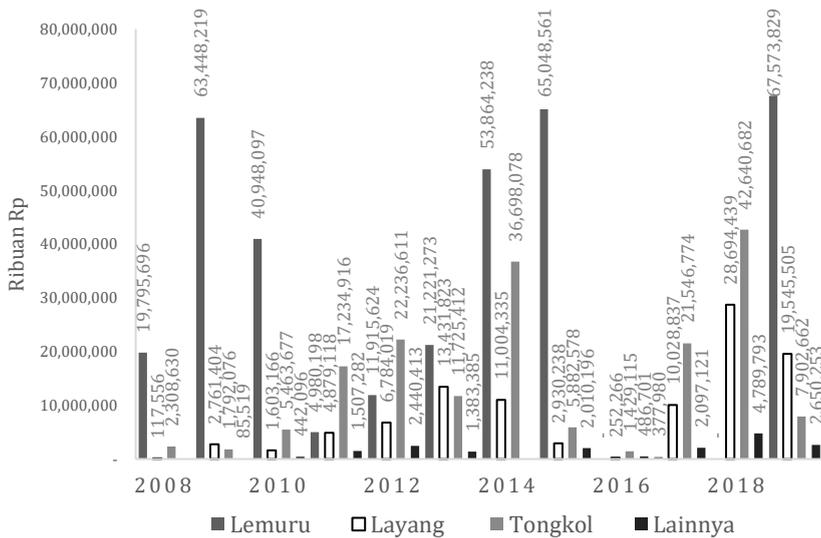
Gambar 23. Produksi Ikan yang Didaratkan di PPN Pengambengan Tahun 2003-2019 (PPN Pengambengan, 2019)



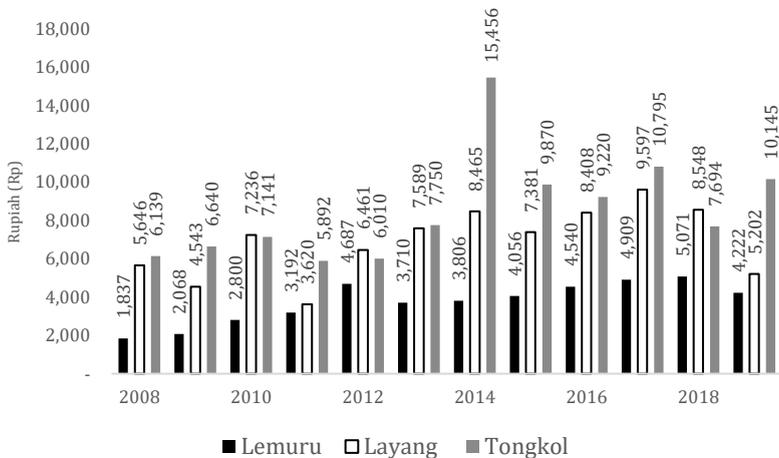
Gambar 24. Nilai Produksi Ikan yang Didaratkan di PPN Pengambangan Tahun 2003-2019 (PPN Pengambangan, 2019)



Gambar 25. Produksi Perjenis Ikan yang Didaratkan di PPN Pengambangan Tahun 2008-2019 (PPN Pengambangan, 2019)



Gambar 26. Nilai Produksi Perjenis Ikan yang Didaratkan di PPN Pengambengan Tahun 2008-2019 (PPN Pengambengan, 2019)



Gambar 27. Harga Rata-Rata Ikan Lemuru di PPN Pengambengan Tahun 2008-2019 (PPN Pengambengan, 2019)

Jenis ikan dominan yang didaratkan di PPN Pengambengan pada 2019 yakni lemuru sebesar 76%, layang 18% , tongkol 4% dan

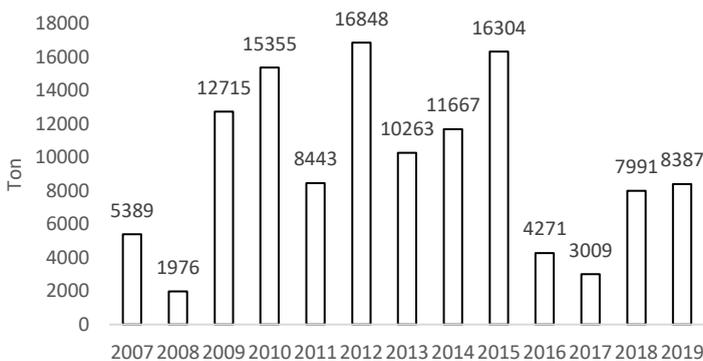
ikan lainnya 2% dari total hasil tangkapan. Namun dari jenis ikan dominan di atas yang paling dominan untuk tahun 2019 adalah ikan lemuru. Keberadaan lemuru yang didaratkan di PPN Pengambangan untuk tahun 2019 mulai muncul dengan jumlah hasil tangkapan sebesar 16.005 ton atau sekitar 76% dari total hasil tangkapan.

Distribusi hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Pengambangan dilakukan di dalam Provinsi maupun di Luar Propinsi yakni Lokal (Jembrana), Denpasar, Singaraja, Tabanan, Karang Asem, Pulau Lombok, Pulau Jawa (Banyuwangi, Jakarta, Bandung). Adapun jumlah hasil tangkapan yang didistribusikan di dalam Provinsi sebesar 18.064 Ton sedangkan yang di Luar Provinsi sebesar 3.624 ton.

5.2. Penyaluran Logistik

A. Penyaluran Es Balok

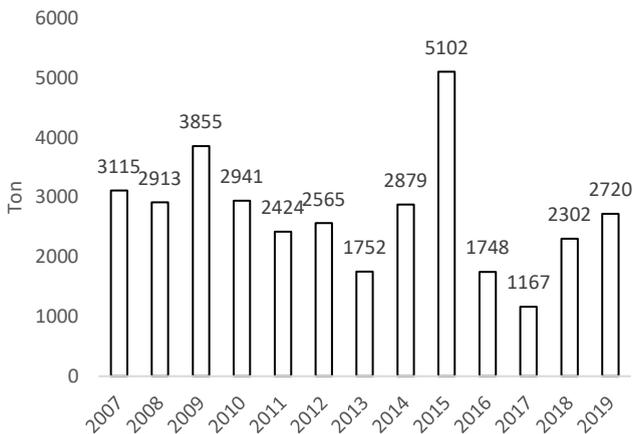
Distribusi es balok di PPN Pengambangan selama periode 2007–2019 dapat dilihat pada Gambar 28. Dapat disimpulkan bahwa penyaluran es balok tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan volume 16.848 Ton, sedangkan penyaluran terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebanyak 1.976 Ton. Di tahun 2019 sendiri penyaluran es balok mencapai 8.387 Ton.



Gambar 28. Penyaluran ES di PPN Pengambangan Tahun 2007–2019 (PPN Pengambangan, 2019)

B. Penyaluran BBM

Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dalam jumlah yang cukup dan memadai untuk kegiatan operasional kapal perikanan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kelancaran usaha perikanan. Pada tahun 2018 penyaluran solar sebanyak 1.906 ton sehingga rata-rata kebutuhan solar 159 ton/bulan. Sedangkan pada tahun 2019 penyaluran BBM Solar sebanyak 2.720 ton/tahun atau 226,67 ton/bulan atau meningkat sebesar 42,71% dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah penyaluran BBM ini seiring dengan meningkatnya keberangkatan kapal sebesar 37,05%. Volume BBM Solar yang disalurkan di PPN Pengambangan pada Tahun 2019 disajikan pada Gambar 29.

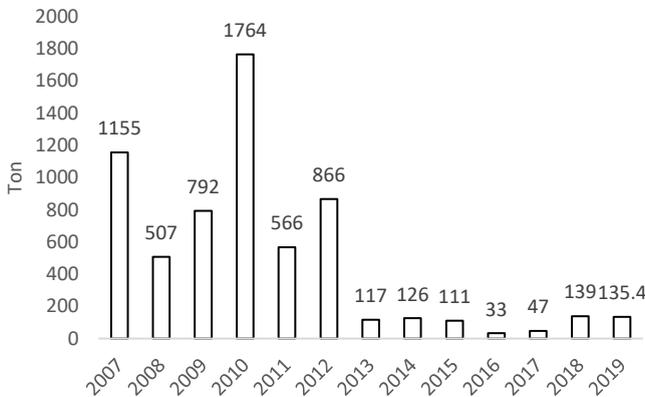


Gambar 29. Penyaluran BBM di PPN Pengambangan Tahun 2007–2019 (PPN Pengambangan, 2019)

C. Penyaluran Garam

Produk perikanan yang didaratkan di PPN Pengambangan bukan hanya untuk bahan baku perusahaan pengalengan ikan di sekitar kawasan PPN Pengambangan karena jumlah produk yang melebihi kapasitas produksi perusahaan, sehingga banyak produk perikanan yang dikirim ke daerah lain seperti ke Jawa Timur

(Banyuwangi, Pasuruan). Oleh karena itu selama proses distribusi selain menggunakan es ditambahkan juga garam untuk mengurangi kecepatan menurunnya kualitas ikan. Jumlah kebutuhan garam yang digunakan nelayan dan distributor ikan dapat di sajikan pada Gambar 30. Jumlah garam yang digunakan selama tahun 2019 adalah 135,40 ton, dimana jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 4 ton dari penggunaan garam pada tahun 2018 sebesar 139 ton atau mengalami penurunan sebesar 2,6%:



Gambar 30. Penyaluran Garam di PPN Pengambengan Tahun 2007-2019 (PPN Pengambengan, 2019)

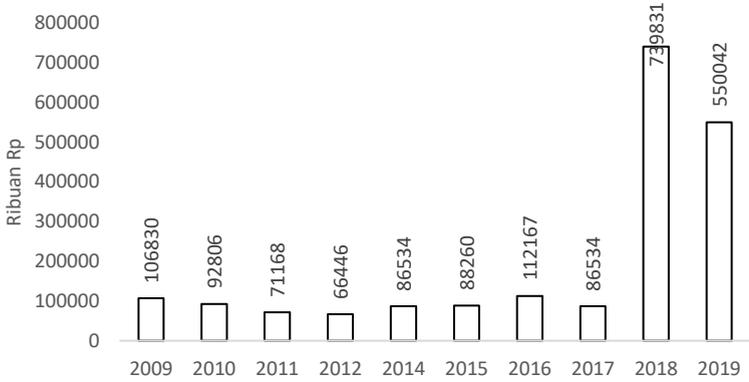
5.3. Nelayan

Nelayan adalah orang yang kesehariannya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan. Jumlah nelayan yang melakukan aktivitas di PPN Pengambengan pada tahun 2019 adalah 3.420 orang.

5.4. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Pendapatan PPN Pengambengan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berpedoman pada PP Nomor 19 Tahun 2006 yang telah diubah dalam PP Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Kementerian Kelautan dan Perikanan. PNBP PPN Pengambengan pada tahun 2019 tercapai sebesar Rp. 292.298.155,- dari target Rp. 245.409.495,- sehingga capaian PNBP sebesar 119,11%. Pendapatan ini berasal dari pendapatan dari pengelolaan BMN (pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan dan kendaraan) serta pendapatan dari penjualan dan Pendapatan Jasa berupa jasa tambat labuh, jasa pas masuk, jasa kebersihan, listrik, es dan air. Adanya peningkatan PNBP ini dipengaruhi oleh beroperasinya Ice Flake Machine (IFM) yang menghasilkan es curah maupun es balok yang dibutuhkan oleh pengguna jasa. Selain itu adanya imbauan untuk membayar jasa pelabuhan sesuai PP Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak baik melalui media cetak maupun suara mampu meningkatkan PNBP. Jumlah PNBP pada Tahun tahun 2009-2019 dapat dilihat Gambar 31. Pada rentang waktu tersebut, terlihat PNBP tertinggi terjadi di tahun 2018 dengan nominal Rp 739.831.000, sedangkan PNBP terendah terjadi di tahun 2012 dengan nilai Rp 66.446.000.



Gambar 31. Penerimaan Negara Bukan Pajak PPN Pengambengan Tahun 2009–2019 (PPN Pengambengan, 2019)

BAB VI

Kinerja Operasional PPN Pengambengan

Operasionalisasi PPN Pengambengan adalah tindakan atau gerakan sebagai pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan untuk memanfaatkan fasilitas pada PPN Pengambengan agar berdaya guna dan bernilai guna (efektif dan efisien) secara optimal bagi “fasilitas itu sendiri” atau “fasilitas lainnya yang terkait”. Sebagai prasarana dan sarana perikanan tangkap, PPN Pengambengan mempunyai fungsi dan fasilitas yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang dibuat.

6.1. Kinerja Operasional Berdasarkan Parameter Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Operasionalisasi adalah implementasi dari segala kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan di PPN Pengambengan dalam melayani kebutuhan masyarakat pengguna yang memerlukannya. Indikator utama yang dapat dijadikan parameter kinerja PPN Pengambengan adalah:

1. Jumlah kapal yang keluar-masuk PPN Pengambengan
2. Jumlah ikan yang didaratkan di PPN Pengambengan
3. Jumlah nelayan yang memanfaatkan PPN Pengambengan
4. Jumlah penyaluran bahan bakar, air tawar dan es
5. Harga ikan di PPN Pengambengan
6. Jumlah tenaga kerja yang diserap
7. Jumlah pendapatan dan penerimaan PPN Pengambengan
8. Jumlah perusahaan dan swasta di PPN Pengambengan

Indikator utama yang dapat dijadikan parameter kinerja PPN Pengambengan sebagaimana disebutkan diatas dapat dilihat pada Bab V yang membahas keragaan PPN Pengambengan

1. Pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan pada tahun 2019 mencapai 21.078 Ton atau rata-rata 64 Ton/hari. Jika dilihat dari rata-rata pendaratan per hari mengalami kenaikan sebesar 88,% apabila di dibandingkan dengan rata-rata pendaratan ikan per ton/hari pada tahun 2018 sebesar 34 ton/hari. Jika dilihat dari total pendaratan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 99,60% dibanding tahun 2018 dengan total pendaratan sebesar 10.560 ton.
2. Kenaikan produksi ini disebabkan karena adanya pendataan hasil tangkapan untuk kapal dibawah 5 GT berpengaruh pada peningkatan jumlah produksi di PPN Pengambengan serta adanya diversifikasi alat tangkap yakni melalui kegiatan pendampingan bantuan alat tangkap, nelayan dapat memaksimalkan hasil tangkapan selain menggunakan alat tangkap purse seine. Melalui kegiatan pendampingan ini, penerima bantuan alat tangkap diberikan pelatihan penggunaan alat tangkap oleh Tim dari BBPPI Semarang. Dengan adanya pelatihan, nelayan dapat menggunakan alat tangkap bantuan tersebut sehingga dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan dan yang tak kalah pentingnya dapat meningkatkan perekonomian nelayan tersebut.
3. Kunjungan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan pada tahun 2019 adalah sebanyak 7.489 kali. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 6.356 kali, maka mengalamikenaikan sebesar 17,83%.
4. Jumlah pengusaha yang memanfaatkan lahan kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah sebanyak 4 unit usaha.
5. Realisasi penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 292.298.155,- atau 119,11% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 245.409.495,-. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp. 181.311.201,-, maka mengalami peningkatan sebesar 61,21%.

6. Operasionalisasi Ice Flake Machine menambah perolehan PNBP sebesar 33,67% atau sebesar Rp. 82.634.382,-. Penyediaan es dari IFM ini hanya dapat melayani konsumen untuk pedagang ikan dan kapal-kapal kecil karena keterbatasan daya mesin untuk memproduksi es sehingga diperlukan penambahan kapasitas mesin untuk produksi es di IFM agar dapat melayani seluruh konsumen di PPN Pengambengan. Adanya pengumuman melalui media cetak maupun suara.

Guna melengkapi hasil penilaian kinerja di PPN Pengambengan, pada Tabel 7 dan Gambar 32 disajikan evaluasi kinerja PPN Pengambengan dari bulan Januari 2019-Januari 2020 berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2015.

Tabel 6 menunjukkan nilai realisasi pencapaian pada Januari 2019-Januari 2020 di PPN Pengambengan untuk 27 kriteria antara lain meliputi jumlah produksi hasil tangkapan sebesar 113,05 ton di bulan Oktober 2019 dan di Januari 2020 12,5 ton, kunjungan kapal 27 unit kapal di bulan Oktober 2019 dan 10 Kapal dalam Bulan Januari 2020. Penyediaan perbekalan melaut yang meliputi BBM dan air bersih. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk menentukan nilai keberhasilannya. Pada Gambar 28 diketahui bahwa *range* nilai kinerja PPN Pengambengan adalah 74.25–88,50. Nilai terendah 74.25 diperoleh di bulan Januari 2019 dan nilai tertinggi 88.50 diperoleh pada bulan Maret 2019 dan November 2019. Untuk nilai rata-rata kinerja PPN Pengambengan adalah 85.2 yang dapat diartikan bahwa realisasi pencapaian kinerja operasional PPN Pengambengan selama bulan Januari 2019-Januari 2020 berkinerja **Baik**.

Tabel 7. Evaluasi Kinerja PPN Pengambengan Januari 2019-Januari 2020

	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Realisasi												
			Jan '19	Feb '19	Mar '19	Apr '19	Mei '19	Juni '19	Juli '19	Agu '19	Sep '19	Okt '19	Nov '19	Des '19	Jan '20
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	21,00	20,00	22,00	22,00	24,00	18,00	25,00	24,00	23,00	23,00	24,00	22,00	20,00
2	E-Logbook	Ya/Tidak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	SHTI	Ya/Tidak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,50	101,6
				4	2	9	4	4	3	6	6	9	5		9
6	Pendapatan Pelabuhan	Rp	130,3	186,1	151,3	102,0	748,6	209,6	820,7	128,5	476,1	1.174,	469,1	399,4	81,90
			9	2	7	0	0	8	5	9	9	80	7	8	
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	1.679,00	2.185,00	7.773,00	7.989,00	8.899,00	2.861,00	5.076,00	10.660,00	8.832,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00
9	Panjang Dermaga	M	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kedalaman Kolam	Cm	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	Ha	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	177,0	277,0	656,0	659,0	1.017,00	344,0	464,0	1.172,00	600,0	906,0	632,0	575,0	300,0
			0	0	0	0	00	0	0	00	0	0	0	0	0

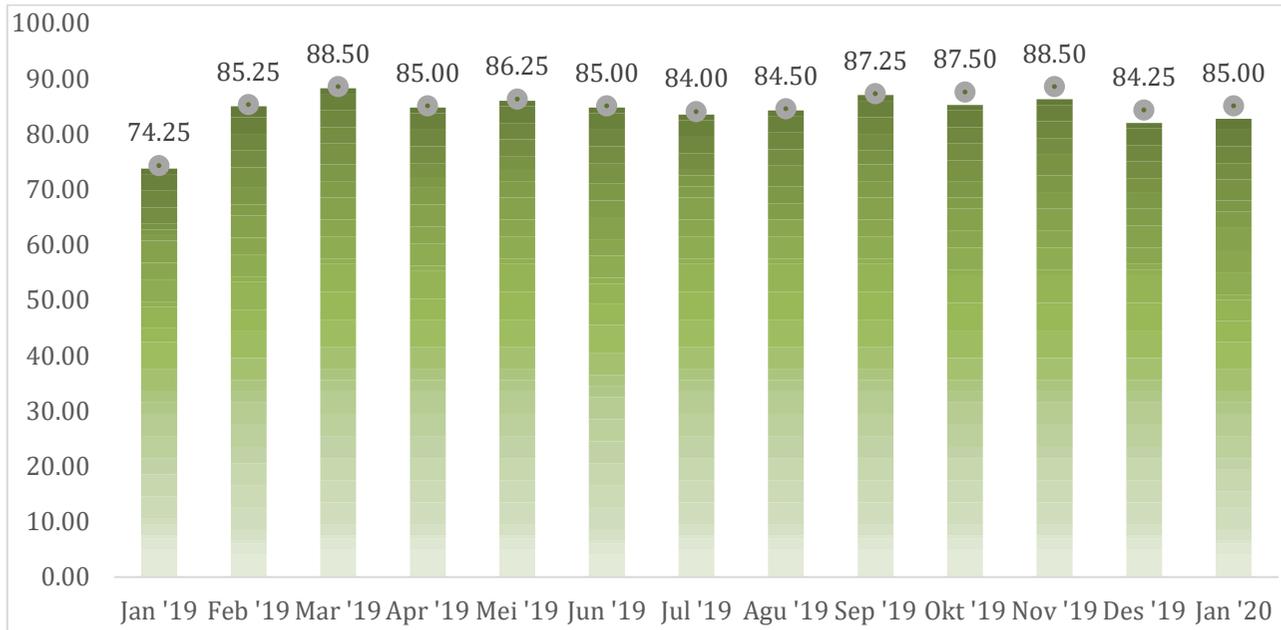
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	4,54	12,14	45,43	28,76	47,51	22,73	44,89	79,64	69,74	113,05	106,31	113,68	12,54
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	10,74	14,04	24,81	20,37	18,06	11,90	14,68	25,32	22,13	27,32	21,33	19,13	9,61
17	STBLKK	%	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	12,00	5,00	12,00	7,00	11,00	4,00	12,00	19,00	12,00	8,00	4,00	1,00	6,00
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	8,00
20	Pelaksanaan K5	Hasil (Baik/Tidak Baik)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	27,02	72,35	92,23	81,89	98,61	86,80	70,34	78,61	86,35	63,03	77,02	94,22	97,52
22	Penyaluran Es (kapal)	%	10,24	77,76	87,74	54,89	65,61	91,92	51,19	81,49	89,57	80,49	94,38	99,56	63,38
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	10,61	76,44	81,17	68,97	66,54	94,98	43,01	80,89	73,50	96,58	87,21	70,12	92,42
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	65.14 0,00												
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	16.46 9,11	15.78 4,04	17.28 1,85	17.86 4,13	21.71 5,21	15.26 1,30	18.13 1,73	18.64 3,72	20.02 3,67	21.46 3,37	21.15 6,75	17.80 6,74	18.60 0,92
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	0 (137)	1 (138)	0 (138)	1 (139)									

Keterangan :



√ : Ya, Lengkap, Baik, Ada

X : Tidak, Tidak Lengkap, Kurang, Tidak Ada



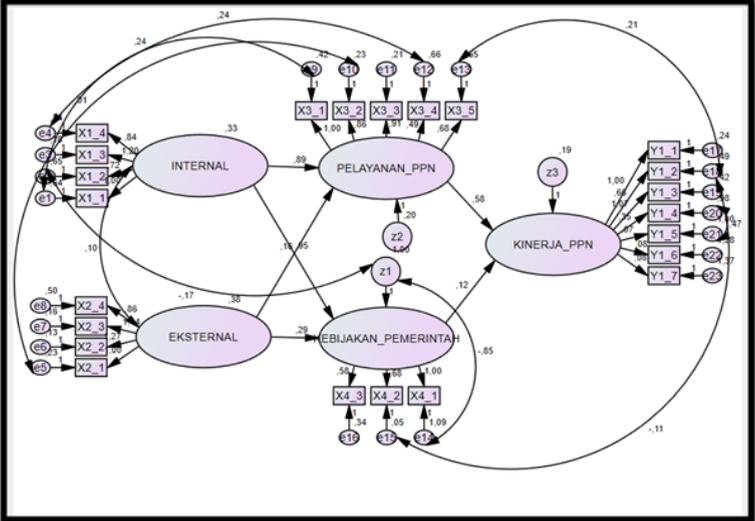
Gambar 32. Grafik Kinerja PPN Pengembangan Januari 2019-Januari 2020
(Berdasarkan Kriteria Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap)

6.2. Pendekatan *Structural Equation Model (SEM)* untuk Kinerja PPN Pengembangan

Structural Equation Model (SEM) untuk mengetahui faktor-faktor penentu kinerja PPN Pengembangan. SEM digunakan dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah disesuaikan dengan model yang dikembangkan dalam penelitian menggunakan program AMOS. Ghozali (2014) menyatakan bahwa analisis faktor (*analysis factor*) dan model persamaan simultan (*simultaneous equation modeling*) dimana keduanya adalah model statistik yang terpisah. SEM sebagai alat analisis data dan pengujian hipotesis dipilih dalam penelitian ini karena dengan SEM memungkinkan dalam menguji simultan yang rumit dirangkai secara berhubungan. SEM dapat mengukur pengaruh model atau hubungan antar faktor yang dimensinya akan diidentifikasi (Ferdinand, 2006; Deng *et al.* 2013).

Populasi dalam penelitian Suherman *et al.* (2020) meliputi nelayan, pemasar, pengolah dan mitra kerja, serta pegawai PPN Pengembangan. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive* sampling. Dalam pengukuran yang dilakukan adalah menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial (Kriyantono, 2006; Sugiyono, 2010). Cara pengukuran adalah dengan menghadapkan responden dengan sebuah pernyataan, kemudian diminta untuk diminta jawaban dari lima pilihan jawaban, dimana nilai jawaban memiliki nilai jawaban yang berbeda. Dalam penelitian ini digunakan pernyataan tertutup dengan rentang skala penilaian: Sangat Tidak Setuju : 1, Tidak Setuju : 2, Ragu-Ragu : 3, Setuju : 4, dan Sangat Setuju : 5. Berdasarkan rumusan dari Ferdinand (2014) jumlah sampel minimum untuk penelitian ini adalah = jumlah indikator sebanyak $23 \times 5 = 115$ responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 156 responden dan sesuai dengan prosedur estimasi *Maximum Likelihood Estimation Method (MLE)*

mengenai sampel minimum yang diajukan adalah berkisar antara 100 sampai 200 responden, maka jumlah sampel tersebut telah terpenuhi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menganalisis nilai *critical ratio* (C.R.) dengan nilai Probabilitas (P) sebagai hasil dari pengolahan *data regression weights* yang dibandingkan dengan batasan statistik yang disyaratkan. Nilai *critical ratio* yang dipersyaratkan adalah di atas 1,96 dengan nilai profitabilitas adalah di bawah 0,05. Jika hasil dari pengolahan data memenuhi persyaratan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian yang diajukan dinyatakan dapat diterima.



Gambar 33. Model Path Diagram (Suherman et al. , 2020)

Tabel 8. Definisi Operasional Variabel

No	Kode	Indikator
Internal (X1)		
1	X1_1	SDM Pengelola PPN (pendidikan, ketrampilan, Budaya Kerja).
2	X1_2	Anggaran PPN Pengembangan

3	X1_3	Nelayan/Pengolah/Pemasar (pendidikan, ketrampilan, pengalaman)
4	X1_4	Produktivitas Nelayan/Pengolah/Pemasar (teknologi, pendapatan, produksi)
Eksternal (X2)		
5	X2_1	Sumberdaya Ikan (<i>Fishing Ground</i>)
6	X2_2	Pasar
7	X2_3	Kondisi Ekonomi
8	X2_4	Perkembangan Teknologi
Pelayanan (X3)		
9	X3_1	Pelayanan Produksi
10	X3_2	Pelayanan Industri Perikanan
11	X3_3	Pelayanan <i>Processing</i>
12	X3_4	Pelayanan Pemasaran
13	X3_5	Pelayanan Distribusi
Kebijakan Pemerintah (X4)		
14	X4_1	UU / Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri
15	X4_2	Otonomi Daerah / Peraturan Gubernur /Peraturan Bupati
16	X4_3	Pelaksanaan/Kerja sama PPN Pengambengan
Kinerja PPN (Y)		
17	Y1_1	Kesejahteraan Nelayan
18	Y1_2	Pengembangan Usaha
19	Y1_3	Pertumbuhan Penjualan
20	Y1_4	Pertumbuhan Pelanggan
21	Y1_5	Pajak/PNBP
22	Y1_6	Produktivitas Kerja
23	Y1_7	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (Nelayan, Pemasar dan Pengolah, Buruh)

Sumber: Suherman *et al.*, 2020

Analisis faktor konfirmatori *konstruk Full Model* telah

memenuhi kriteria fit. Hal ini ditandai dengan nilai hasil perhitungan terhadap tiap-tiap indeks *goodness-of-fit* yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dapat dilihat pada Tabel 89

Tabel 9. Hasil Uji Model Faktor Konfirmatori *Konstruk Full Model*

Kriteria	<i>Cut off Value</i>	Hasil	Evaluasi Model
	Kecil; X ² dengan df		
<i>Chi-square</i>		420,988	Cukup
	215, p: 5 % = 250.207		
CMIN/DF	< 2,00	1,958	Baik
GFI	Mendekati 1,0	0,817	Baik
RMSEA	≤ 0,08	0,079	Baik
AGFI	Mendekati 1,0	0,765	Baik
PNFI	> 0,50	0,644	Baik
PGFI	≥ 0,50	0,636	Baik

Sumber: Suherman *et al.*, 2020

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 10 *Regression Weight*. Berdasarkan hasil pengujian *regression weight* menggambarkan bahwa H1, H2, H4, H5, dan H6 dinyatakan diterima, karena memiliki nilai *Critical Ratio* (C.R.) di atas 1,96 dan Probabilitas di bawah 0,05. H3 dinyatakan ditolak karena nilai *Critical Ratio* (C.R.) di bawah 1,96 dan Probabilitas di atas 0,05. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya nilai pengaruh setiap indikator atau dimensi pembentuk masing-masing variabel laten dan pengaruh antar variabel dapat dianalisis dengan koefisien *standardized* pada hasil uji *standardized regression weights construct full model* pada Tabel 9.

Tabel 10. *Regression Weight*

No.	Hipotesis	CR	P	Keterangan
H ₁	Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelayanan PPN	6,736	0,000	Diterima
H ₂	Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Strategi Kebijakan	5,919	0,000	Diterima
H ₃	Eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelayanan PPN	1,871	0,061	Ditolak
H ₄	Eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebijakan	2,924	0,003	Diterima
H ₅	Pelayanan PPN berpengaruh positif dan signifikan Kinerja PPN	5,251	0,000	Diterima
H ₆	Kebijakan berpengaruh positif dan signifikan Kinerja PPN	2,290	0,022	Diterima

Sumber: Suherman *et al.*, 2020

Tabel 11. Hasil Uji *Standardized Regression Weights Construct Full Model*

Kebijakan_Pemerintah	<---	Eksternal	0,149
Pelayanan_PPN	<---	Internal	0,723
Kebijakan_Pem	<---	Internal	0,467
Pelayanan_PPP	<---	Eksternal	0,142
Kinerja_PPN	<---	Kebijakan_Pemerintah	0,225
Kinerja_PPN	<---	Pelayanan_PPN	0,628

Sumber: Suherman *et al.*, 2020.

Model persamaan struktural berdasarkan hasil tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Variabel } Endogen &= \text{Variabel } Eksogen + \text{Variabel} \\ &\quad \text{Endogen} + \text{Error} \\ \text{Pelayanan PP} &= 0,723\text{Internal} + 0,142\text{ Eksternal} + \\ &\quad 0,600 \zeta \\ \text{Kebijakan} &= 0,467\text{Internal} + 0,149\text{ Eksternal} + \\ \text{Pemerintah} &\quad 0,279 \zeta \\ \text{Kinerja PPN} &= 0,628\text{ Pelayanan PPN} + 0,225 \\ &\quad \text{Kebijakan Pemerintah} + 0,560 \zeta \end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 11 sebagaimana ditulis Suherman *et al.* (2020) bahwa setiap indikator atau dimensi pembentuk masing-masing variabel laten memiliki pengaruh positif dengan hasil *koefisien standardized* dari terendah 0,142 hingga tertinggi 0,723. Selanjutnya dalam hubungan antar variabel dapat diketahui bahwa pengaruh terbesar adalah pengaruh Internal (pengelola, anggaran, nelayan dan produktivitas) terhadap pelayanan PPN dengan *koefisien standaridized* 0,723, yang artinya ketika Internal naik 1, maka akan menaikkan Pelayanan PPN sebesar 0,723. Sedangkan yang mempengaruhi Kinerja PPN terbesar adalah Pelayanan PPN dengan *koefisien standaridized* 0,628, yang artinya ketika Pelayanan PPN naik 1 maka akan menaikkan Kinerja PPN sebesar 0,628.

Lebih lanjut Suherman *et al.* (2020) merujuk ke (UNCTAD, 1987), kinerja pelabuhan diukur dari kemampuan menyediakan pelayanan aktifitas untuk kapal, bongkar muat barang dan transportasi. Berbagai aspek pelayanan pelabuhan menjadi ukuran kinerja pelabuhan (UNTAD, 1976) termasuk relasi antar pengguna pelabuhan. Hal tersebut sebagaimana kesimpulan penelitian Nugroho *et al.* (2012) bahwa faktor berpengaruh terhadap penurunan aktivitas operasional di PPP Dadap berupa faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah fasilitas pelabuhan, bakul ikan, jumlah armada, dan sedimentasi. Sedangkan faktor eksternal adalah

dukungan aparaturnya desa, serta sumberdaya ikan (SDI), dan daerah penangkapan Ikan (DPI). Bagi pemilik kapal, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap besarnya nilai kinerja pelabuhan adalah kinerja organisasi (X2). Sementara bagi Anak Buah Kapal (ABK), variabel yang berpengaruh signifikan terhadap besarnya nilai kinerja pelabuhan adalah faktor sosial (X1).

Penelitian Ngamel *et al.* (2013) dalam Suherman *et al.* (2020) di sebutkan bahwa kinerja operasional PPN Tual buruk dan untuk itu UPT PPN Tual harus meningkatkan produksi hasil tangkapan, jumlah kunjungan kapal, penyediaan perbekalan melaut, pelayanan prima kepada pengguna jasa dan kekuatan hasil tangkapan. Sementara itu, penelitian Kirwelakubun *et al.* (2018) yang di lakukan di PPP Tumumpa, menunjukkan bahwa kegiatan bongkar muat sana terganggu karena fasilitas rusak. Sementara untuk pelayanan administrasi, sudah sesuai SOP.

Hasil penelitian Kurnia *et al* (2019) dalam Suherman *et al.* (2020) bahwa terdapat 8 atribut pelayanan yang dianggap telah memenuhi kepuasan nelayan. Kedelapan atribut itu adalah keberadaan penerima keluhan, kecepatan perbaikan fasilitas, keterampilan petugas melayani, kemudahan prosedur pemesanan, penampilan petugas, harga yang ditetapkan, kondisi kebersihan, dan kondisi keamanan.

Satu lagi hasil penelitian yang bisa dijadikan rujukan adalah di PPS Lampulo-Aceh. (Rahmah *et al*, 2018) yang melakukan penelitian di Bungus menguji variabel keandalan pelayanan dengan empat indikator. Yaitu, penyediaan BBM bersubsidi untuk kebutuhan operasional penangkapan di kawasan pelabuhan, keoptimalan pelayanan yang diberikan pihak UPTD kepada nelayan, penyediaan es di kawasan pelabuhan, dan penyediaan air untuk kebutuhan operasional penangkapan di kawasan pelabuhan. Hasil pengujian, rata-rata tingkat kepuasan responden terhadap variabel keandalan berada tercatat rendah.

Indikator keandalan pelayanan lainnya disampaikan

Bayyinah *et al* (2016) dalam Suherman *et al.* (2020) yang melakukan penelitian di PPN Kejawan. Hasil penelitian, ada 8 atribut pelayanan yang dianggap telah memenuhi kepuasan nelayan yaitu kondisi fisik fasilitas; ketersediaan jumlah petugas; adanya prosedur pelayanan yang jelas; petugas memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan; kecepatan petugas dalam menangani pelayanan; kesigapan petugas dalam melayani nelayan; keramahan, perhatian dan sikap petugas; dan penyampaian informasi. Dari 8 atribut itu, 2 masih perlu ditingkatkan yaitu penanganan keluhan nelayan; dan petugas mengetahui, memahami kebutuhan dan keinginan nelayan. Secara keseluruhan nelayan sudah merasa sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak PPN Kejawan.

Secara umum, pelayanan tujuan utama pelayanan di PP adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha perikanan. Faktor utama yang berpengaruh adalah keahlian/keterampilan SDM pelaksana pelayanan yang harus sangat komprehensif. Mencakup berbagai aspek pemicu iklim usaha perikanan yang kondusif. Misalnya mengenai sistem sanitasi dan higienis bagi keseluruhan lingkungan pelabuhan termasuk pemahaman masyarakat tentang sanitasi dan higienis bagi kemajuan usaha serta kesejahteraannya (Suherman *et al.*, 2020).

Pemahaman tersebut kemudian diaplikasikan pada seluruh kegiatan usaha mereka seperti dalam hal penanganan ikan di atas kapal, penanganan ikan di PP, pengolahan dan distribusi/pemasaran hasil. Pengetahuan pelaksana untuk meningkatkan iklim yang kondusif di PP juga termasuk berbagai kelembagaan perikanan yang masih berlaku. Karena penyampaian pelayanan PP yang disampaikan menggunakan kelembagaan yang mereka anut akan lebih efektif hasilnya. Cara sosialisasi dan penyampaian harus menarik dan biasanya metoda yang umum digunakan adalah penyuluhan. Misalnya, dilakukan melalui kelompok-kelompok atau apabila sudah ada, melalui organisasi-organisasi di mana mereka menjadi anggota, sehingga masing-masing pimpinan kelompok atau organisasi

merupakan penghubung bagi para pelaksana pelayanan di PP. Petugas pelayanan sepenuhnya berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk itu, pengelola PP wajib memberi bukti dengan menjadikan sarana dan prasarana PP selalu dalam keadaan bersih dan sehat (Elpandi, 2000; Murdiyanto, 2004 dalam Suherman *et al.*, 2020).

BAB VII

Dampak Sosek Keberadaan PPN Pengambengan

Pelabuhan Perikanan memiliki fungsi sosial ekonomi. Menurut Choliq *et al.* (1999), ada dua manfaat yang diharapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, termasuk pengembangan PPN Pengambengan yakni, manfaat yang dapat dihitung atau dinilai dengan uang (*tangible benefit*), dan manfaat yang sulit dihitung atau dinilai dengan uang atau *intangible benefit*.

Evaluasi dampak sosek PPN Pengambengan sebagaimana ditulis oleh Suherman dan Dault (2009) ,menyebutkan bahwa ada 5 kelompok masyarakat yang dijadikan objek penelitian. Kelompok tersebut adalah kelompok masyarakat nelayan, pengolah, pemasar/bakul, pekerja lain yang berkaitan langsung dengan keberadaan PPN Pengambengan serta pengelola PPN Pengambengan.

7.1. *Tangible Benefit* (Manfaat Nyata)

Menurut Choliq *et al.* (1999), *tangible benefit* merupakan manfaat yang diperoleh dari kegiatan proyek yang dapat dihitung atau dinilai dengan uang. Ada dua jenis *tangible benefit*. Yaitu manfaat langsung (*direct benefit*) dan manfaat tidak langsung atau (*indirect benefit*).

Tabel 12. Jenis Pelayanan Jasa di Kawasan PPN Pengembangan

No	Uraian	Target	Realisasi
A	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	<u>71.120.200</u>	<u>219.312.142</u>
1	Kebersihan	51.000.000	41.590.760
	- Kios/Los	750.000	9.070.260
	- Kendaraan bongkar/muat	250.000	1.944.500
	- Bangunan Permanen Tertutup	50.000.000	30.576.000
2	Pas Masuk	10.500.000	50.269.000
	- Kendaraan Roda 4	4.000.000	12.080.000
	- Kendaraan Roda 2	6.500.000	38.189.000
3	Tambat labuh < 30 GT	2.670.000	21.081.000
4	Air	6.950.200	23.737.000
5	Es	1.570.610	82.634.382
B	Pendapatan Jasa Lainnya	<u>5.000.000</u>	<u>20.041.358</u>
1	Listrik	5.000.000	20.041.358
C	Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana	<u>38.172.750</u>	<u>52.944.655</u>
1	- Sewa Lahan Pengembangan	2.679.000	5.066.500
	- Sewa Lahan Prasarana	32.366.250	32.750.875
2	Sewa Bangunan Semi Permanen	2.752.500	14.902.280
3	Sewa Dump Truck	375.000	225.000
Jumlah Awal		115.863.560	292.298.155
Target Setelah Revisi		245.409.495	

Sumber: PPN Pengembangan, 2019

7.2. Direct Benefit (Manfaat Langsung)

Menurut Choliq *et al.* (1999), manfaat langsung adalah manfaat yang diterima dari kegiatan proyek secara langsung, seperti:

1. Kenaikan nilai produk yang dikarenakan beberapa sebab

misalnya karena kuantitas, kualitas dan kegunaan dari suatu produk.

2. Adanya penurunan biaya yang dikarenakan adanya penghematan seperti adanya penggunaan teknologi baru yang dapat menurunkan biaya.

Penggunaan fasilitas yang dikenakan biaya dalam pembangunan PPN Pengambangan merupakan manfaat yang diterima secara langsung dalam bentuk nilai manfaat. Seluruh penerimaan yang dikenakan dalam bentuk nilai manfaat. Seluruh penerimaan yang dikenakan dalam penggunaan maupun penerimaan dana modal investasi merupakan arus kas masuk. Fasilitas PPN Pengambangan yang memberikan manfaat berupa penerimaan antara lain TPI, sewa tanah dan gedung, *slipway/docking*, pas masuk, listrik, air bersih, solar dan penggunaan jasa dari fasilitas fungsional seperti keranjang ikan (Tabel 12).

Manfaat riil yang diterima dari fasilitas di PPN Pengambangan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini :

1. Penerimaan Dari Sewa Tanah dan Sewa Gedung

PPN Pengambangan menyediakan lahan yang digunakan untuk membangun kawasan industri perikanan. Dalam penggunaan lahan kawasan industri PPN Pengambangan mengenakan biaya jasa sewa tanah. Nilai biaya jasa sewa tanah tersebut dipungut berdasarkan PP. No. 62 Tahun 2002, kemudian sejak adanya PP no 19 tahun 2006 nilai biaya jasa sewa tanah tersebut di pungut berdasarkan PP tersebut. Pungutan tersebut merupakan penerimaan dari penggunaan lahan yang telah disediakan oleh PPN Pengambangan. Penerimaan PPN Pengambangan dari jasa sewa tanah sangat tergantung dari investor swasta yang masuk ke PPN Pengambangan.

2. Penerimaan Jasa Pas Masuk

Jasa pas masuk merupakan penerimaan berupa manfaat dari fasilitas yang telah disediakan oleh PPN Pengambengan berupa pos masuk yang berfungsi sebagai tempat pengawasan barang dan orang yang keluar masuk dan juga berfungsi sebagai tempat penjagaan keamanan kawasan PPN Pengambengan. Pungutan jasa pas masuk ke PPN Pengambengan sesuai dengan PP. No. 62 Tahun 2002 tentang Jasa dan Biaya Penggunaan Barang dan Fasilitas yang Menjadi Nilai Penerimaan Bagi PPN Pengambengan. Kemudian sejak keluarnya PP no 19 tahun 2006 nilai jasa pas masuk tersebut di pungut berdasarkan PP tersebut.

3. Retribusi Pelelangan Ikan

Penerimaan dari retribusi pelelangan ikan di TPI PPN Pengambengan merupakan penerimaan yang diperoleh dari penggunaan fasilitas fungsional karena merupakan nilai manfaat yang diterima dari jasa TPI. Retribusi pelelangan ikan di PPN Pengambengan yang dikelola oleh pihak KUD.

4. Penerimaan dari Jasa “Docking”

Penerimaan PPN Pengambengan dari penyediaan fasilitas fungsional berupa *docking/slipway* digunakan sebagai fasilitas pemeliharaan dan perawatan kapal ikan. Pungutan jasa *docking* di PPN Pengambengan sesuai dengan PP. No. 62 Tahun 2002 tentang Jasa dan Biaya Penggunaan Barang dan Fasilitas yang Menjadi Nilai Penerimaan Bagi PPN Pengambengan. Sejak adanya PP no 19 tahun 2006 nilai dari jasa *docking* tersebut dipungut berdasarkan PP tersebut.

5. Penerimaan dari Jasa Listrik

Penerimaan PPN Pengambengan dari jasa listrik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik sebagai penerangan dan tenaga penggerak dari peralatan-peralatan yang terdapat di dalam kawasan PPN Pengambengan. Pemakaian listrik tersebut dikenakan biaya jasa pemakaian yang dipungut berdasarkan jumlah nilai pemakai listrik sehingga nilai pemakaian jasa listrik tersebut dapat diketahui.

6. Penerimaan dari Jasa Penggunaan Air Tawar dan Es

Penerimaan PPN Pengambengan dari jasa penggunaan air tawar dan es yang dikenai pungutan berupa biaya jasa.

7. Penerimaan dari Sewa Bangunan

Dengan adanya penyediaan fasilitas fungsional PPN Pengambengan berupa TPI, balai pertemuan nelayan (BPN) dan gedung-gedung yang dimiliki oleh PPN Pengambengan akan memberikan manfaat dalam bentuk penerimaan dari sewa penggunaan fasilitas fungsional tersebut.

7.3. Indirect Benefit (Manfaat Tidak Langsung)

Menurut Choliq *et al.* (1999), *indirect benefit* adalah manfaat yang diperoleh dari kegiatan proyek secara tidak langsung. Biasanya berkenaan dengan dampak yang dirasakan pihak lingkungan sekitar proyek, seperti :

Dengan adanya PPN Pengambengan maka *indirect benefit* dapat dirasakan oleh 3 kelompok. Yaitu masyarakat yang bekerja di PPN Pengambengan, bakul ikan dan nelayan.

1. Masyarakat yang Bekerja di PPN Pengambengan

Keberadaan fasilitas fungsional PPN Pengambengan dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar untuk bekerja di PPN Pengambengan. Sehingga diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bakul Ikan

Keberadaan PPN Pengambengan yang digunakan sebagai unit penanganan dan pemasaran ikan yang didaratkan di PPN Pengambengan seperti TPI dapat berfungsi sebagai sarana dalam mempertahankan mutu ikan. Sehingga bakul ikan dapat memperoleh ikan segar dalam kondisi baik untuk dipasarkan kepada konsumen dan memperoleh keuntungan dari harga jual yang tinggi.

3. Nelayan

PPN Pengambengan dapat memberikan kemudahan bagi

nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan dan mendapatkan keuntungan yang layak dari harga lelang yang terbentuk pada saat dilakukan aktivitas pelelangan. Fasilitas fungsional berupa dok dan *slipway* dapat membantu nelayan dan pemilik kapal dalam melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kapal.

Fasilitas kios BBM, pabrik es, instalasi air dapat memberikan kemudahan bagi nelayan dan pemilik kapal dalam memenuhi kebutuhan operasional kegiatan penangkapan ikan dengan harga terjangkau. Manfaat tidak langsung PPN Pengambengan disajikan secara ringkas dan terperinci pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13. Beberapa Jenis Manfaat Tidak Langsung PPN Pengambengan

No	Jenis Manfaat	Fasilitas PPN Pengambengan
		Manfaat Aktual
1.	Pemasaran hasil perikanan oleh nelayan dan sebagai sarana dalam mempertahankan mutu ikan	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan harga ikan (adanya pelelangan) - pembeli (bakul ikan) banyak - lokasi dermaga bongkar dan TPI dekat (± 10 m) - akses ke pasar ikan dan ke industri pengolahan dekat - produksi ikan segar meningkat - penanganan ikan yang baik seperti cara pengangkutan dengan memperhatikan kualitas ikan yang akan dipasarkan - tersedianya sarana dan prasarana transportasi agar distribusi ikan secara cepat sampai ke konsumen
2.	Memudahkan dalam memenuhi kebutuhan operasional nelayan	<ul style="list-style-type: none"> - ketersediaan kebutuhan operasional nelayan (es, solar, - harga kebutuhan operasional terjangkau - dekat dengan kapal nelayan (adanya dermaga muat)

3. Adanya *multiplier effect* seperti peningkatan pendapatan pada sektor lain - bertambahnya usaha di luar kawasan PPN Pengembangan (warung makan dan minuman), tingkat kebutuhan nelayan yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan ikan
4. Adanya *economic of scale* seperti peningkatan skala usaha - peningkatan usaha dari skala kecil menjadi besar
5. Adanya *dynamic secondary effect* seperti terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat peningkatan produktivitas kerja tenaga kerja - waktu kerja, motivasi kerja, kemampuan kerja
 - jumlah nelayan,
 - pegawai pelabuhan (koperasi)
 - pedagang eceran atau kaki lima
 - karyawan bengkel
 - penjual makanan dan minuman
 - penjaga toko (waserda)
 - karyawan perusahaan perikanan (pengumpulan dan pengolahan ikan)
 - karyawan pabrik
 - bakul ikan

Sumber: Suherman, 2009

7.4. Intangible Benefit (Manfaat Tak Berwujud)

Menurut Choliq *et al.* (1999), *intangible benefit* merupakan manfaat yang diperoleh dari kegiatan proyek yang tidak dapat dihitung atau dinilai dengan uang.

Keberadaan fasilitas fungsional PPN Pengembangan diharapkan membawa manfaat lain yang tidak bisa dinilai dengan uang berupa pengembangan wilayah dan penambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Jembrana.

1. Manfaat bagi Pengembangan Wilayah di Sekitar PPN Pengembangan

Adanya pelabuhan perikanan diharapkan dapat membuat kawasan daerah sekitarnya menjadi sentra kegiatan baru yang akan

meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah ini, misalnya munculnya pedagang/toko yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, pedagang makanan dan minuman.

2. Manfaat bagi Penambahan Lapangan Pekerjaan

Dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan (*Pro Job*), PPN Pengambengan selain mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi nelayan juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi aktivitas penunjang dan turunannya seperti pedagang, bakul, tukang sortir, tukang becak, hingga perusahaan besar baik yang bergerak dalam industri hulu maupun hilir. Semua aktivitas tersebut akan lebih cepat lagi berkembang menjadi suatu kekuatan ekonomi apabila berada satu kawasan di pelabuhan perikanan diciptakan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan terpadu.

a. Lapangan kerja yang Langsung Terkait dengan Operasional PPN Pengambengan

Adanya kegiatan di PPN Pengambengan antara lain kegiatan penangkapan ikan di laut, proses pengolahan dan pemasaran ikan maka memerlukan fasilitas fungsional diantaranya yaitu TPI dan pabrik es dimana dalam operasionalnya diperlukan tenaga kerja misalnya kuli angkut barang dan supir angkutan barang.

b. Lapangan Kerja yang Tidak Langsung Terkait dengan Operasional PPN Pengambengan

Adanya penambahan kegiatan di PPN Pengambengan berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru untuk melayani kebutuhan para pegawai/pekerja pelabuhan, misalnya pedagang makanan/minuman dan tukang ojek.

3. Manfaat bagi Penambahan Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang berada di PPN Pengambengan berasal dari jumlah tenaga kerja di PPN Pengambengan, desa-desa sekitarnya. Tenaga kerja yang terdapat di PPN Pengambengan pada tahun 2019

berjumlah 5.905 sebagaimana tersaji pada Tabel 14 berikut ini:

Tabel 14. Penyerapan Tenaga Kerja di PPN Pengambengan tahun 2019

Unit Kerja (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja
UPT PPN Pengambengan	88
Dinas Perikanan (TPI)	14
POLAIR	14
TNI-AL	5
Satwas PSDKP	5
Adpel Perhubungan	1
Babinsa	1
Linmas	1
Nelayan/ABK Kapal	3.420
Pengurus Kapal	415
Panol/Buruh Pikul	1.250
Belantik (Penjual ikan)	125
Pedagang (Kios nelayan) dan Los Pasar Terbuka	120
PT. Dua Berjaya (SPBN)	10
Pengemudi Truk Angkut Ikan	80
Tukang Ojek	60
Montir/Tukang Las	10
Supplier Es dan pekerja	20
PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pengambengan	55
Pabrik Es dan Coldstorage Pemda	6
Pengurus Perahu	84
Gudang penyimpanan peralatan perahu	6
Toko penyedia Sparepart	6
Pencari sisik ikan	4
Pengumpul minyak ikan	6
Armada pengangkut ABK perahu	40
Armada pengangkut es dan garam	40
Pedagang musiman	6
Crew Alat Penghancur Es	4
Pensuplai garam dengan truk	4
Pembeli dari pihak UPI	10

Sumber: PPN Pengambengan, 2019

Kegiatan operasional pelabuhan perikanan juga tidak terlepas dari peranan unit-unit usaha yang ikut menyediakan kebutuhan nelayan PPN Pengambangan. Unit tersebut antara lain:

- Kios alat-alat perikanan yang menjual peralatan mesin, pancing, tali pancing, box ikan dan sebagainya.
- Unit perbekalan melaut yang menjual es balok, garam, jasa penggilingan es, *strum accu* dan lain-lain.
- Pedagang musiman
- Pencari sisik ikan
- Warung-warung makan dan minuman.

4. Manfaat bagi Penambahan Unit Usaha

Investor dan pengusaha pengolahan pasca tangkap merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung perkembangan pelabuhan. Dengan adanya investor dan unit-unit usaha maka kegiatan pasca penangkapan dan pengolahan hasil ikan dapat diakomodasi dengan baik, sehingga tidak ada kesulitan bagi nelayan untuk memasarkan hasil tangkapannya. Selain itu kebutuhan-kebutuhan yang menunjang dalam kegiatan penangkapan seperti perbekalan, suku cadang kapal, atau pun perlengkapan kegiatan penangkapan lainnya juga akan lebih mudah didapat oleh nelayan.

Selain perusahaan yang sudah berjalan, di PPN Pengambangan juga terdapat investor yang akan membangun usaha di kompleks pelabuhan (Tabel 15). Dengan adanya pelaku usaha baru diharapkan akan dapat lebih merangsang pertumbuhan PPN Pengambangan dan dapat merespon dengan baik rencana pengembangan PPN Pengambangan.

Tabel 15. Nama Perusahaan Berbadan Hukum di Lingkup PPN Pengambangan

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Produk (Ton)/Hari
----	-----------------	--------------	-------------------

1	PT. Intan Sakti	BBM	40
2	PT. Samudera Raya	Pengalengan Ikan	80
3	PT. Sumina Ekstrasindo	Pengalengan Ikan	-
4	PT. Indo Bali	Pengalengan Ikan	90
5	PT. Balimaya Permai	Pengalengan Ikan	120
6	PT. Pengambangan Raya	Pengalengan Ikan	-
7	PT. Indo Hamafish	Pengalengan Ikan	100
8	PT. Indo Citra	Pengalengan Ikan	75
9	CV. Jaya Baru	Tepung Ikan	40
10	CV. Bali Indah	Tepung Ikan	15
11	CV. Bali Indah	Pengalengan Ikan	30
12	UD. Hosana Buana Tunggal	Tepung Ikan	20
13	PT. Bumi Bali Mina	Tepung Ikan	-
14	PT. Dwipa Mina Nusantara	Tepung Ikan	15
15	PT. Wahana Baja Utama	Tepung Ikan	-

Sumber: Suherman (2011)

BAB VIII

Pelayanan

PPN Pengambengan

Pelayanan di PPN Pengambengan adalah hal penting, karena akan berpengaruh terhadap kelancaran operasional penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Karena itu, penting bagi pengelola pelabuhan untuk selalu mengetahui level pelayanan dengan sarana harus selalu menjadi pelayanan yang prima.

Untuk mengukur pelayanan, ada dua metode, yang pertama, dengan mengukur variabel keandalan pelayanan. Ada 4 indikator variabel keandalan, yaitu penyediaan BBM bersubsidi untuk kebutuhan operasional penangkapan di kawasan pelabuhan, keoptimalan pelayanan yang diberikan pihak UPTD kepada nelayan, penyediaan es di kawasan pelabuhan, dan penyediaan air untuk kebutuhan operasional penangkapan di kawasan pelabuhan. Hasil penelitian (Rahmah *et al*, 2018), menunjukkan rata-rata tingkat kepuasan responden terhadap variabel keandalan di PPN Pengambengan berada di tingkat kepuasan rendah

Metode lain adalah dengan mengukur atribut pelayanan, Ada delapan atribut pelayanan yang bisa diukur. Untuk PPN Pengambengan, hasil penelitian Bayyinah *et al* (2016), menunjukkan ada 6 dari 8 atribut pelayanan yang dianggap telah memenuhi kepuasan nelayan, yaitu kondisi fisik fasilitas; ketersediaan jumlah petugas; adanya prosedur pelayanan yang jelas; petugas memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan; kecepatan petugas dalam menangani pelayanan; kesigapan petugas dalam melayani

nelayan; keramahan, perhatian dan sikap petugas; dan penyampaian informasi. Dua atribut pelayanan yang masih perlu di tingkatkan yaitu penanganan keluhan nelayan; dan petugas mengetahui, memahami kebutuhan dan keinginan nelayan. Secara keseluruhan nelayan sudah merasa sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak PPN Pengambengan.

8.1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berorientasi Pelanggan

Pelayanan di dalam PP tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha perikanan. Keahlian/keterampilan tenaga pelaksana pelayanan sangat komprehensif meliputi berbagai aspek yang memungkinkan tumbuhnya iklim usaha perikanan yang kondusif misalnya mengenai sistem sanitasi dan higienis bagi keseluruhan lingkungan pelabuhan termasuk pemahaman masyarakat tentang sanitasi dan higienis bagi kemajuan usaha serta kesejahteraannya. Pemahaman tersebut kemudian diaplikasikan pada seluruh kegiatan usaha mereka seperti dalam hal penanganan ikan di atas kapal, penanganan ikan di PP, pengolahan dan distribusi/pemasaran hasil. Pengetahuan pelaksana untuk meningkatkan iklim yang kondusif di PP juga termasuk berbagai kelembagaan perikanan yang masih berlaku. Karena penyampaian pelayanan PP yang disampaikan menggunakan kelembagaan yang mereka anut akan lebih efektif hasilnya. Cara sosialisasi dan penyampaian harus menarik dan biasanya metode yang umum digunakan adalah penyuluhan. Misalnya dilakukan melalui kelompok-kelompok atau apabila sudah ada, melalui organisasi-organisasi di mana mereka menjadi anggota, sehingga masing-masing pimpinan kelompok atau organisasi merupakan penghubung bagi para pelaksana pelayanan di PP. Petugas pelayanan sepenuhnya berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk mewujudkan pengertian bahwa produksi ikan yang mereka usahakan harus berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan maka sarana dan prasarana PP juga harus selalu dalam keadaan bersih dan sehat

(Elpandi, 2000; Murdiyanto, 2004).

8.2. Pelayanan di PPN Pengambengan

Secara umum pelayanan di PP berupa pelayanan yang bersifat langsung kepada nelayan/pengusaha perikanan untuk menyediakan barang/jasa yang mereka butuhkan; pelayanan kepada masyarakat umum di dalam pelabuhan menggunakan pendekatan yang lebih bersifat massal agar supaya mereka (nelayan serta para pengusaha perikanan) lebih mampu memajukan usahanya dengan menggunakan berbagai fasilitas yang tersedia di PP (Elpandi, 2000; Murdiyanto, 2004).

8.2.1. Pelayanan Langsung Kepada Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan

Pelayanan untuk memenuhi keperluan pengguna jasa pelabuhan bersifat langsung. Pelayanan langsung sering memerlukan tenaga yang memiliki keterampilan tertentu (listrik, las, mesin diesel dan lain sebagainya) karena perhatian utama adalah supaya apa yang dikehendaki oleh pengguna jasa dapat segera dipenuhi dengan sebaik-baiknya (prima). Pelayanan yang diperlukan meliputi berbagai kegiatan mulai dari sarana produksi, pemasaran hasil sampai dengan distribusinya. Tenaga yang melakukan pelayanan dituntut memiliki keahlian tertentu yang diperkuat melalui suatu bentuk surat keterangan/sertifikat. Hal ini dimaksudkan agar dapat selalu dilakukan penjenjangan/akreditasi untuk mempertahankan atau meningkatkan keterampilan tersebut.

Dengan demikian pemberian pelayanan umum oleh PP menjadi semakin prima. Di samping itu semua, sertifikasi keterampilan juga dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayanan tetap berdasarkan atas asas efisiensi serta tidak melanggar etika profesi. Tanggung jawab pelayanan yang diberikan adalah sepenuhnya untuk kepentingan para pengguna jasa. Biaya/tarif pelayanan ditetapkan untuk imbalan jasa keahlian ditambah dengan

margin atas bahan-bahan yang telah diterima oleh pengguna jasa. Karena bersifat kasuistis dan langsung antara pemberi jasa kepada pihak yang menerima jasa maka masalah administrasi menjadi relatif sederhana (Elpandi, 2000; Murdiyanto, 2004).

Pelayanan umum yang diberikan langsung kepada para pengguna jasa (dapat dilakukan oleh manajemen pelabuhan sendiri, atau oleh swasta apabila biaya pelayanan terpaksa masih mahal, tetapi kemungkinan juga oleh keduanya apabila masih ada keahlian atau keterampilan-keterampilan tertentu yang belum sepenuhnya dapat dicukupi oleh pihak swasta. Prinsip, efisiensi antara lain ditempuh melalui tiadanya kemungkinan monopoli, supaya selalu tercipta iklim persaingan yang sehat sehingga prinsip pelayanan prima bisa terwujud. Berbagai ketentuan pelayanan umum harus jelas terbaca pada setiap tempat di mana masyarakat pengguna jasa sering berkumpul. Pengumumannya singkat dan tidak bersifat larangan serta mengandung segala persyaratan yang ditentukan untuk memperoleh pelayanan (Murdiyanto, 2004).

8.2.2. Pelayanan Ditujukan Kepada Masyarakat

Pelayanan umum bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam pelabuhan tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha perikanan sehingga pendapatan mereka betul-betul didasarkan atas teknologi berproduksi yang maju, bisnis yang sehat serta memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan usaha perikanan. Keahlian/keterampilan tenaga pelaksana pelayanan sangat komprehensif meliputi berbagai aspek yang memungkinkan tumbuhnya iklim usaha perikanan yang kondusif misalnya mengenai sistem sanitasi dan *higienis* bagi keseluruhan lingkungan pelabuhan termasuk pemahaman masyarakat tentang arti penting sanitasi dan *higienis* bagi kemajuan usaha serta kesejahteraannya. Pemahaman tersebut kemudian diaplikasikan pada seluruh kegiatan usaha mereka seperti dalam hal penanganan ikan di atas kapal, penanganan ikan di pelabuhan, pengolahan dan

distribusi/pemasaran hasil.

Pengetahuan pelaksana untuk meningkatkan iklim yang kondusif di PP juga termasuk berbagai kelembagaan perikanan yang masih berlaku. Karena penyampaian pelayanan umum pelabuhan yang disampaikan menggunakan kelembagaan yang mereka anut akan lebih efektif hasilnya. Cara sosialisasi dan penyampaian harus menarik dan biasanya metoda yang umum digunakan adalah penyuluhan (*extension education*); misalnya dilakukan melalui kelompok-kelompok atau apabila sudah ada, melalui organisasi-organisasi di mana mereka menjadi anggota, sehingga masing-masing pimpinan kelompok atau organisasi merupakan *contact persons* bagi para pelaksana pelayanan umum kepelabuhanan. Petugas pelayanan umum sepenuhnya berasal dari Pemerintah dan pelaksanaannya bersifat monopoli dan bukan merupakan jasa pelayanan yang memungut biaya. Untuk mewujudkan pengertian bahwa produksi ikan yang mereka usahakan harus berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan maka sarana dan prasarana pelabuhan juga harus selalu dalam keadaan bersih dan sehat. Apa yang ditekankan bahwa mutu hasil perikanan yang didaratkan di pelabuhan dapat dipertahankan apabila ditangani dan diolah menggunakan tenaga maupun peralatan yang bersih serta sehat (Elpandi, 2000; Murdiyanto, 2004).

BAB IX

WKOPP

PPN Pengambengan

9.1. Analisis Wilayah Kerja Darat PPN Pengambengan

Sesuai dengan batasan tentang wilayah kerja daratan PPN Pengambengan adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan PPN Pengambengan, konsep yang digunakan dalam menyusun dan menetapkan wilayah kerja darat disesuaikan dengan aktivitas yang akan berlangsung dalam kawasan darat PPN Pengambengan yang juga terkait dengan fasilitas darat. Beberapa fasilitas PPN Pengambengan yang diklasifikasikan sebagai fasilitas fungsional dan berada di darat antara lain:

- a) Tempat pelelangan ikan dan pasar penjualan ikan
- b) Fasilitas penyediaan air bersih
- c) Fasilitas es
- d) Fasilitas listrik
- e) Kantor pelabuhan dan pengawasan

A. Tempat Pelelangan Ikan dan Pasar Penjualan Ikan

Setelah hasil tangkapan dibongkar dari kapal, ikan untuk bahan konsumsi manusia biasanya langsung dibawa ke tempat pemasaran atau gudang di mana ikan tersebut dijual kepada saudagar yang mengurus transportasi *onward* dan pendistribusian ikan-ikan tersebut. Berbagai aktivitas yang nantinya dilakukan baik semua atau sebagian di tempat pemasaran atau gudang yaitu:

pembersihan, pemilihan, penentuan mutu, penimbangan, pengawetan kembali, pengemasan, pameran, pelelangan, pengepakan, dan pembongkaran. Fasilitas-fasilitas nantinya harus disediakan untuk pengemasan dan penyimpanan peralatan, transpor internal, tempat pendinginan sementara, ruangan lelang, kantor, ammeniti, dan kios pedagang.

B. Fasilitas Penyediaan Air Bersih

Fasilitas penyediaan air bersih PPN Pengambangan berupa Sumber air berasal dari sumur bor dengan kedalaman 200 m sebanyak 2 buah dengan kapasitas 6.000 liter dibuat pada tahun 2004 dan 2005.

C. Fasilitas Es

Kebutuhan es untuk menjaga kesegaran ikan sangat penting untuk dipenuhi, untuk itu sebuah pelabuhan perikanan yang baik selayaknya dapat memenuhi kebutuhan akan es tersebut. Pabrik es sebagai salah satu unit pelayanan dapat menyediakan kebutuhan es tersebut. Es tidak hanya diperlukan untuk persiapan ikan di kapal saja tetapi juga diperlukan untuk penyiapan ikan untuk keperluan lelang publik dan untuk ditransportasikan. Fasilitas Es di PPN Pengambangan saat ini adalah 240 m².

D. Fasilitas Listrik

Fasilitas Listrik, yang ada di PPN Pengambangan bersumber dari PLN berkapasitas 427 Kva. Di samping itu tersedia sebuah genset ± 150 KVA.

E. Kantor Pelabuhan

Kantor pelabuhan digunakan untuk kegiatan UPT Pelabuhan, pengawas perikanan dan lain-lain dengan rincian kantor pelabuhan seluas 240 m² dan kantor bina mutu seluas 100 m².

F. Fasilitas Penunjang

Beberapa fasilitas PPN Pengembangan yang diklasifikasikan sebagai fasilitas fungsional dan terkait dengan wilayah kerja darat antara lain:

- a) Balai Pertemuan nelayan
- b) Mess Operator
- c) Pos Jaga
- d) Tempat Peribadatan
- e) Kamar mandi umum
- f) Kios/toko
- g) WC Umum
- h) Rumah dinas

G. Mess nelayan dan Balai Pertemuan Nelayan

Balai pertemuan nelayan yang ada di PPN Pengembangan memiliki luas 250 m².

H. Pos Jaga

Bangunan ini disediakan untuk keperluan tempat peristirahatan bagi petugas keamanan (satpam) kawasan pelabuhan perikanan. Pada rencana pengembangan PPN Pengembangan, pos satuan pengamanan direncanakan dengan ukuran 27 m².

9.2. Analisis Wilayah Kerja Perairan PPN Pengembangan

Wilayah kerja Perairan PPN Pengembangan adalah suatu tempat yang merupakan bagian perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan PPN Pengembangan.

Luasan wilayah kerja perairan di PPN Pengembangan sangat ditentukan beberapa faktor penting antara lain:

- a. Dimensi Kapal (panjang, lebar dan *draft*)
- b. Manuver kapal
- c. Lalu lintas kapal
- d. Operasi bongkar muat

A. Area Tambat (*Idle Berthing*)

Luas areal tambat akan sangat dipengaruhi oleh jumlah kapal yang berlabuh pada suatu waktu. Jumlah kapal yang melakukan kunjungan setiap harinya di PPN Pengambangan yang berarti pula melakukan aktivitas tambat pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 29 unit kapal per hari. Hal ini menunjukkan bahwa kedepannya PPN Pengambangan akan semakin ramai dengan aktivitas kunjungan atau tambat kapal.

B. *Turning Basin* (Kolam Putar)

Radius *turning basin* diperkirakan sebesar 1,5 kali ukuran panjang kapal maksimum. *Turning basin* terletak di dalam kolam pelabuhan sehingga perlu diperhitungkan pula bentuk dan luas kolam pelabuhan sehingga kapal dapat bermanuver dengan aman di antara kapal-kapal lain yang sedang berlabuh di sekitarnya.

Besarnya *turning basin* akan diperhitungkan terhadap kapal ikan, mengingat fungsi utama dari pelabuhan ini adalah pelabuhan perikanan.

- Panjang kapal ikan = 50 meter
- Radius *turning basin* = $1,5 \times 50 = 75$ meter

Untuk keamanan manuver kapal-kapal lain, diambil radius *turning basin* sebesar 100 meter.

C. Kanal atau Lebar Inlet Pelabuhan

Kanal dan mulut pelabuhan (jarak antar *pierheads*) harus cukup lebar agar kapal dapat masuk dan keluar pelabuhan dengan aman. Selain itu untuk memberikan jarak aman pengurangan kecepatan atau pemberhentian kapal ditentukan panjang henti sebesar minimal 4 kali panjang maksimal kapal.

Lebar alur kolam didesain untuk dapat dilewati oleh 1 buah kapal PELNI dan 1 buah kapal ikan.

$$\text{Lebar alur} = (1,5 B_{\text{PELNI}} + 1,8 B_{\text{PELNI}}) + (1,5 B_{\text{ikan}} + 1,8 B_{\text{ikan}}) + C$$

$$\begin{aligned}
&= (1,5 \times 30 + 1,8 \times 30) + (1,5 \times 9 + 1,8 \times 9) \\
&\quad + 10 \\
&= 138,7 \text{ meter}
\end{aligned}$$

Diambil lebar alur sebesar 160 meter dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan.

D. Area Bongkar Muat

Area bongkar muat pelabuhan diperlukan untuk kegiatan berlabuh untuk bongkar muatan, persiapan operasi (*loading*), dan lain sebagainya. Diperkirakan luas pelabuhan tidak kurang dari perkiraan sebagai berikut:

$$L = 3 (n \times l \times b)$$

Dimana:

L = luas area bongkar muat yang dibutuhkan (m²)

n = jumlah kapal maksimum berlabuh di pelabuhan (m)

l = panjang kapal (m)

b = lebar kapal (m)

Dimensi kapal perikanan yang digunakan 50 x 9 (L x b), maka:

$$L = 3 (5 \times 50 \times 9)$$

$$L = 4050 \text{ m}^2$$

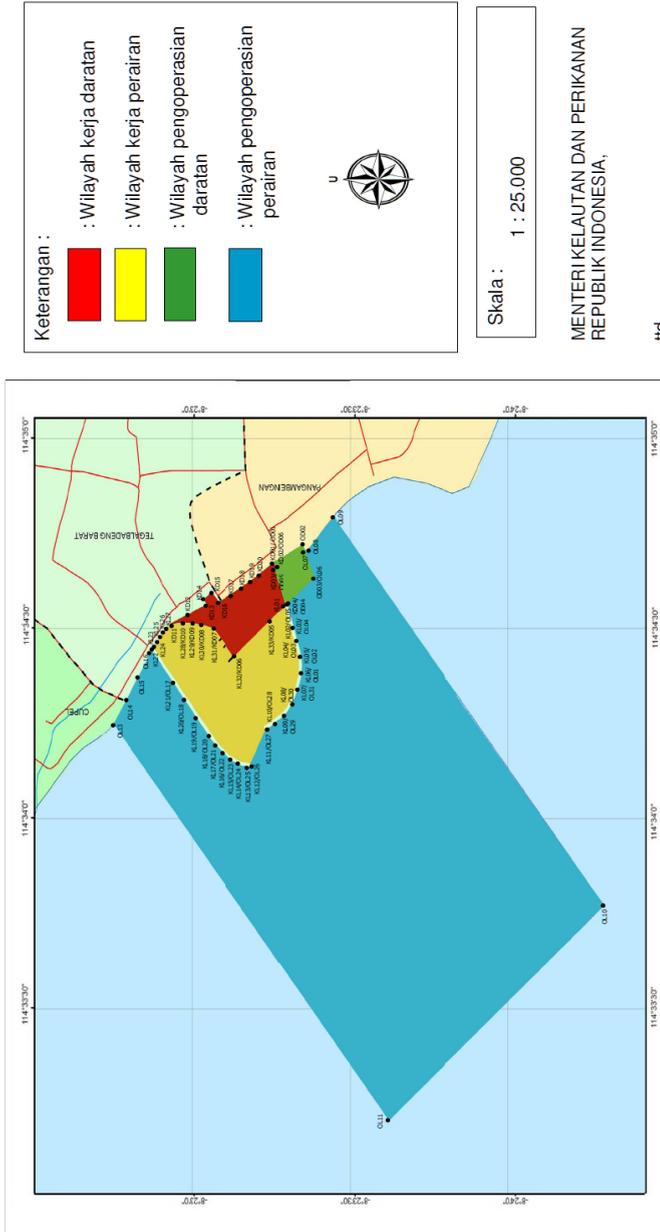
Tempat-tempat yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan di PPN Pengambengan disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Tempat yang Merupakan Bagian Perairan yang Dipergunakan Secara Langsung untuk Kegiatan PPN Pengambengan

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1.	Kolam pelabuhan			
	- luas	1.250	m ²	1
	- lebar	25	m ²	1
2.	Alur masuk / panjang	1.500	m	-
3	Rambu-rambu navigasi/lampu alur masuk pelabuhan	1	Unit	1
4.	Lampu tanda pelabuhan	1	Unit	1

Sumber : PPN Pengambengan (2019)

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan PPN Pengambengan, maka ditetapkan batas-batas wilayah kerja daratan dan perairan serta wilayah pengoperasian daratan dan perairan. Pada Gambar 34 digambarkan peta wilayah kerja dan wilayah pengoperasian PPN Pengambengan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 67 tahun 2010. Selanjutnya secara detail terkait WKOPP PPN Pengambengan di lampirkan pada Lampiran 1.



Gambar 34. Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
(Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 67 tahun 2010)

BAB X

Formulasi Strategi Pengembangan PPN Pengembangan

Melihat kondisi fasilitas PPN Pengembangan yang belum berfungsi secara optimal, dirasa perlu ada solusi untuk optimalisasi fasilitas pelabuhan. Hal itu bisa diawali dengan menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi PPN Pengembangan dengan menggunakan analisis SWOT yaitu, suatu cara analisis yang bisa dijadikan salah satu upaya untuk dapat memecahkan masalah dengan melihat aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi (Rangkuti, 2000).

Menurut Marimin (2004), tahap yang harus dilakukan dalam pembuatan analisis SWOT sebagai berikut:

- Tahap evaluasi data internal dan eksternal
- Tahap pembuatan matriks internal dan eksternal dan matrik SWOT
- Tahap pengambilan keputusan

10.1. Tahap Evaluasi Data Internal dan Eksternal

Dalam tahap ini, data internal dan eksternal diperoleh melalui wawancara kuesioner dengan pihak-pihak yang terkait dengan PPN Pengembangan. Pihak-pihak yang terkait tersebut adalah Kepala Pelabuhan PPN Pengembangan, Kepala TPI PPN Pengembangan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jembrana dan

Ketua Perhimpunan Nelayan Pengambengan. Selain itu, pengambilan data secara kuantitatif juga dilakukan.

10.2. Tahap Pembuatan Matriks Internal dan Eksternal dan Matrik SWOT

Menurut Marimin (2004), langkah-langkah pembuatan matriks internal eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Pada kolom 1 dilakukan penyusunan terhadap semua faktor-faktor yang dimiliki oleh perusahaan dengan membagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan eksternal.
- b. Pemberian bobot masing-masing faktor pada kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Bobot dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pembobotan.

Pembobotan dalam penelitian ini adalah dengan metode perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*).

- a. Pada kolom 3 diisi perhitungan rating terhadap faktor-faktor tersebut berdasarkan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Rentang nilai rating 1 berarti kurang berpengaruh sampai 4 berarti sangat berpengaruh.
- b. Kolom 4 diisi dengan cara mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3.
- c. Penjumlahan total skor pembobotan untuk masing-masing faktor internal (kekuatan-kelemahan) dan eksternal (peluang-ancaman). Untuk memperoleh strategi yang tepat bagi perusahaan yang bersangkutan maka nilai tersebut diletakkan pada kuadran yang sesuai untuk kemudian dilakukan pembuatan matrik SWOT yang akan menjelaskan alternatif strategi yang dapat dilakukan.

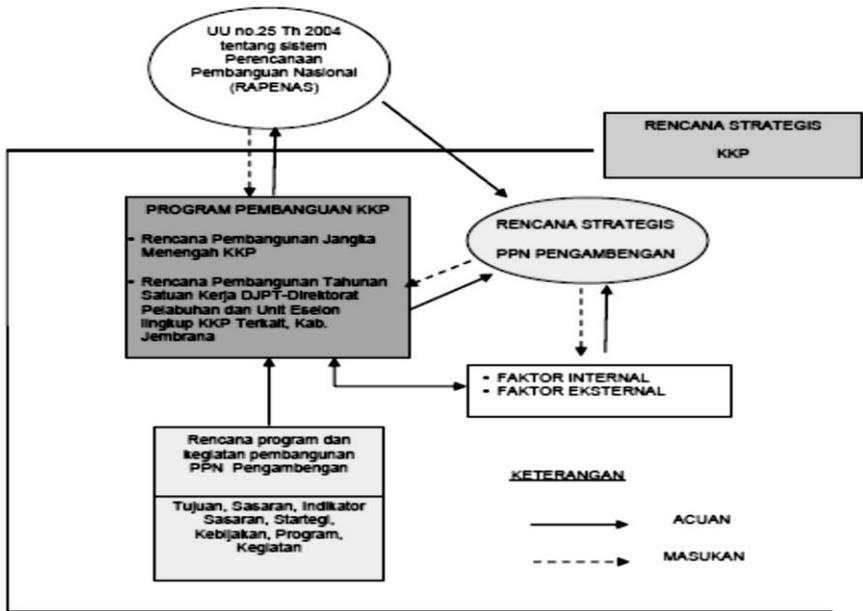
Pada Bab ini diulas terkait Strategi Pengembangan PPN Pengambengan dengan mengambil sebagian besar dari naskah yang sudah di publikasikan dalam jurnal Marine Fisheries Vol. Vol. 2, No. 1,

Mei 2011, dengan judul **“Formulasi Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Jembrana”**.

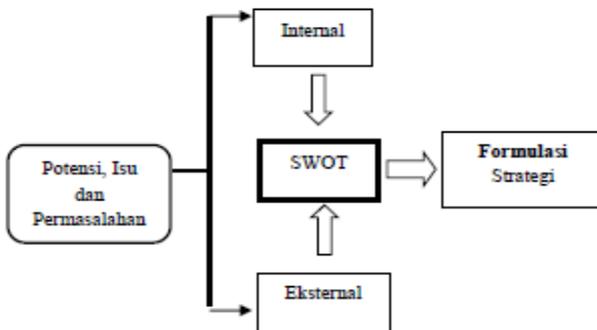
Strategi diperlukan oleh setiap Pelabuhan Perikanan PP agar memiliki arah yang jelas dalam mencapai sasaran yang diinginkan dan mengembangkan *competitive advantage*. Sehingga, PP tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga dapat memenangkan persaingan. Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan strategi pengembangan PPN Pengembangan. Metode penelitian adalah metode survei deskriptif yang bersifat studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi pengembangan PPN Pengembangan meliputi:

- 1 Peningkatan kualitas pelayanan di PPN Pengembangan,
- 2 Peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan,
- 3 Revitalisasi, penyempurnaan, pemeliharaan dan
- 4 pengembangan fasilitas di PPN Pengembangan untuk dapat menjadi pusat kegiatan perikanan terpadu,
- 5 Dukungan untuk peningkatan akses permodalan
- 6 usaha perikanan tangkap di PPN Pengembangan, dan
- 7 Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan di PPN Pengembangan.

Dalam perencanaan pengembangan PPN Pengembangan perlu strategi/analisis yang dapat memberikan masukan prioritas pengembangan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Hasil dari analisis lingkungan strategis ini adalah pengelompokan atau agregasi potensi serta isu dan permasalahan pengembangan PPN Pengembangan yang terdiri dari dua aspek yaitu internal dan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT (Rangkuti, 2000 dan Marimin, 2004), dari kedua aspek tersebut dapat diperoleh alternatif-alternatif strategi untuk pengembangan PPN Pengembangan. Posisi Strategi PPN Pengembangan dalam Proses Perencanaan (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat dilihat pada Gambar 35. Adapun skema tahapan penelitian tampak pada Gambar 36.



Gambar 35. Posisi Strategi PPN Pengambengan dalam Proses Perencanaan KKP (Suherman, 2011)



Gambar 36. Skema Tahapan Formulasi Strategi (Suherman, 2011)

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan dua cara, langsung dan tidak langsung. Pengambilan data langsung dilakukan mengikuti kaidah-kaidah yang dianut dalam sistem ahli berbasis

pengetahuan (*knowledge Based Expert*). Menurut Hart (1986), dalam proses akuisisi pengetahuan maka penetapan sumber informasi atau responden, yaitu ahli atau pihak yang terkait, didasarkan atas pertimbangan dan kriteria-kriteria yaitu: 1) Keberadaan “responden” dan keterjangkauan serta kesediaan untuk diwawancarai; 2) Mempunyai reputasi, kedudukan dan telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai ahli; 3) Telah berpengalaman dibidangnya. Penelitian diawali dengan melakukan studi literatur untuk mengetahui informasi yang terkait dengan kondisi PPN Pengambangan dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan pakar terkait untuk menentukan strategi pengembangan PPN Pengambangan beserta kriteria yang menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan strategi. Dari informasi yang diperoleh dibuat kuesioner kepada pakar. Pada penelitian ini, yang menjadi pakar adalah orang yang terlibat dan mengetahui permasalahan yang ada dalam pengembangan PPN Pengambangan. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder sebagai landasan teoritis penelitian meliputi data BPS, statistik PPN Pengambangan, laporan hasil penelitian terkait, jurnal, buletin, internet dan sebagainya.

10.3. Formulasi Strategi Pengembangan PPN Pengambangan

PPN Pengambangan dalam statusnya sebagai UPT Pusat yang operasionalnya berada di daerah, maka sudah selayaknya arah dan aktivitas organisasi diupayakan untuk senantiasa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat, serta berupaya untuk menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadi sinergi program dan kegiatan yang bermuara pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan.

Strategi pengembangan PPN Pengambangan meliputi: (1) Peningkatan kualitas pelayanan di PPN Pengambangan, (2) Peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan, (3) Revitalisasi, penyempurnaan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas di PPN

Pengembangan untuk dapat menjadi pusat kegiatan perikanan terpadu, (4) Dukungan untuk peningkatan akses permodalan usaha perikanan tangkap di PPN Pengembangan, dan (5) Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan di PPN Pengembangan. Adapun hasil analisis strategi pengembangan PPN Pengembangan dapat dilihat pada Tabel 16 dan Tabel 17.

1) Peningkatan Kualitas Pelayanan di PPN Pengembangan

Dalam kegiatannya, PPN Pengembangan bukan saja hanya terbatas pada masalah investasi pembangunan perangkat kerasnya saja melainkan harus memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat nelayan sebagai masyarakat pengguna dengan melaksanakan operasionalisasi fasilitas yang dibangun sesuai dengan fungsinya. Hal ini terkait dengan perkembangan pemasaran yang semakin modern sehingga menuntut para penyedia jasa, termasuk dalam hal ini PPN Pengembangan untuk memperbaiki kualitas pelayanannya.

2) Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Kelembagaan

Kelembagaan pada PPN Pengembangan yang masih menjadi UPT Pusat sudah mengalami penataan dan secara umum sudah dapat berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, kelembagaan PPN Pengembangan masih perlu penataan lebih lanjut untuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Peningkatan kapasitas kelembagaan PPN Pengembangan tersebut antara lain meliputi: status hukum, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta pemberdayaan lebih lanjut dari lembaga dimaksud. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dapat dimulai dengan melakukan inventarisasi keragaan, evaluasi, formulasi, penetapan dan sosialisasi untuk implementasinya. Selain peningkatan kapasitas kelembagaan, hal yang perlu diperhatikan adalah koordinasi antar lembaga.

3) Revitalisasi, Penyempurnaan, Pemeliharaan Dan Pengembangan Fasilitas di PPN Pengembangan untuk Dapat Menjadi Pusat Kegiatan Perikanan Terpadu

Untuk memperlancar aktivitas perikanan tangkap, khususnya usaha penangkapan ikan di laut, perlu pemeliharaan fasilitas operasional PP. Dalam upaya mengembangkan PPN Pengembangan sebagai kawasan pengembangan ekonomi berbasis perikanan tangkap, diperlukan pemeliharaan fasilitas operasional. Diharapkan pengelola PPN Pengembangan dapat melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas operasional, sehingga kapal-kapal dan nelayan serta *stakeholders* lainnya yang melakukan aktivitas di PPN Pengembangan akan mendapatkan pelayanan prima. Murdiyanto (2004) menyebutkan bahwa instansi PP merupakan instansi pemerintah yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur bagi basis kegiatan perikanan tangkap

4) Dukungan untuk Peningkatan Akses Permodalan Usaha Perikanan Tangkap di PPN Pengembangan

Investasi pembangunan prasarana harus dapat mendukung pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan produksinya dalam arti luas, meliputi peningkatan mutu produksi dengan penanganan dan pengolahan yang baik, memenuhi kebutuhan pasar dengan pemasaran yang kompetitif serta mengembangkan kehidupan masyarakat nelayan itu sendiri. Permasalahan yang menjadi kendala pengembangan usaha ekonomi di bidang perikanan tangkap adalah masalah permodalan. Di sini sangat diharapkan Peran PPN Pengembangan dalam meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat perikanan di lingkungannya

5) Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Dan Masyarakat Perikanan di PPN Pengembangan

Keberadaan PPN Pengembangan sebagai suatu lingkungan kerja diharapkan akan mampu menjadi pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan berbasis perikanan tangkap yang pada gilirannya diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Di samping itu, PPN Pengembangan juga mengemban tugas untuk meningkatkan kualitas SDM, baik aparatur maupun

masyarakat perikanan yang ada di lingkungannya.

Tabel 17. Hasil Analisis Strategi Pengembangan PPN Pengembangan Terhadap Penilaian Internal

Uraian Faktor-faktor Internal dan Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan			
1. Letak geografis strategis (<i>fishing ground</i> dan pemasaran).	0,637	4	2,548
2. Komitmen pemerintah pusat dan daerah yang tinggi di bidang pengembangan perikanan dan kelautan.	0,258	5	1,290
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang telah dioperasikan serta terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan master plan.	0,105	5	0,525
Kelemahan			
1. Organisasi, alokasi dana, dan tingkat koordinasi dengan instansi terkait masih terbatas.	0,349	4	1,396
2. Fasilitas yang belum mendukung kualitas produksi perikanan yang didaratkan.	0,204	4	0,816
3. Terbatasnya biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas prasarana pelabuhan.	0,173	5	0,865
4. Pengembangan dan penataan fasilitas belum sempurna dan masih banyak kekurangan.	0,120	4	0,480
5. Kurangnya SDM terampil untuk menghadapi perkembangan dan pertumbuhan yang akan datang.	0,078	3	0,234
6. Belum tersedianya fasilitas Laboratorium Mutu Hasil Perikanan dan Pos Karantina Ikan.	0,046	5	0,230
7. Belum tersedianya lahan yang memadai untuk pengembangan fasilitas Pelabuhan.	0,031	4	0,124
Total skor kekuatan-kelemahan			0,218
Peluang			
1. Tumbuh dan berkembangnya iklim usaha sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah	0,400	5	2,000

yang mendorong peningkatan investasi di wilayah kabupaten Jembrana.

2. Semakin meningkatnya pangsa pasar produk perikanan baik lokal maupun nasional, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengkonsumsi produk pangan yang bergizi dan menyehatkan.	0,293	4	1,172
3. Kebijakan Pemda yang akan merelokasi kapal ikan dari Benoa ke Pengambengan.	0,168	4	0,672
4. Didukung oleh 14 industri pengolahan ikan di sekitar pelabuhan yang membutuhkan bahan baku sekitar 250 ton per hari.	0,088	4	0,352
5. Keinginan investor untuk melakukan investasi di Pengambengan	0,050	5	0,250

Ancaman

1. Usaha perikanan masih didominasi nelayan kecil dan pemanfaatan yang bertumpu pada perairan pantai	0,467	5	2,335
2. Rendahnya kualitas SDM perikanan khususnya nelayan yang bisa dilihat dari rendahnya tingkat pendidikannya menyebabkan proses alih teknologi dan ketrampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan usaha.	0,268	4	1,072
3. Nelayan disekitar pelabuhan masih berorientasi lokal dan sulit menerima pengembangan iptek, keteraturan, dan kehadiran nelayan dari daerah lain.	0,154	4	0,616
4. Keterbatasan SDI di Selat Bali yang cenderung terus menurun.	0,071	5	0,355
5. Keterbatasan bahan baku industri tidak mencukupi dan beberapa pabrik tidak kontinyu memproduksi, atau merelokasi pabrik ke tempat lain.	0,041	5	0,205

Total skor peluang-ancaman	0,137
----------------------------	-------

Sumber: Suherman (2011)

Tabel 18. Matrik SWOT Strategi Pengembangan PPN Pengembangan

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Letak geografis strategis (<i>fishing ground</i> dan pemasaran). 2. Komitmen pemerintah pusat dan daerah yang tinggi di bidang pengembangan perikanan dan kelautan. 3. Tersedianya sarana dan prasarana yang telah dioperasikan serta terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan master plan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi, alokasi dana, dan tingkat koordinasi dengan instansi terkait masih terbatas. 2. Fasilitas yang belum mendukung kualitas produksi perikanan yang didaratkan. 3. Terbatasnya biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas prasarana pelabuhan. 4. Pengembangan dan penataan fasilitas belum sempurna dan masih banyak kekurangan. 5. Kurangnya SDM terampil untuk menghadapi perkembangan dan pertumbuhan yang akan datang. 6. Belum tersedianya fasilitas Laboratorium Mutu Hasil Perikanan dan Pos Karantina Ikan. 7. Belum tersedianya lahan yang memadai untuk pengembangan fasilitas Pelabuhan.
Faktor Eksternal		

Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
<p>1. Tumbuh dan berkembangnya iklim usaha sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong peningkatan investasi di wilayah kabupaten Jembrana.</p> <p>2. Semakin meningkatnya pangsa pasar produk perikanan baik lokal maupun nasional, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengkonsumsi produk pangan yang bergizi dan menyehatkan.</p> <p>3. Kebijakan Pemda yang akan merelokasi kapal ikan dari Benoa ke Pengambangan.</p> <p>4. Didukung oleh 14 industri pengolahan ikan di sekitar pelabuhan yang membutuhkan bahan baku sekitar 250 ton per hari.</p> <p>5. Keinginan investor untuk melakukan investasi di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan di Pengambangan • Menjadikan dan mendorong PPN Pengambangan sebagai pusat pertumbuhan melalui pengembangan fasilitas dan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil. • Pengembangan sistem informasi perikanan. • Penyempurnaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan antara lain perpanjangan <i>breakwater</i>, pengembangan <i>outer harbour</i>, pengerukan kolam dan alur pelabuhan secara periodik sesuai dengan kebutuhan. • Revitalisasi fasilitas pelabuhan yang dapat menjadi pusat kegiatan perikanan terpadu. • Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan. • Meningkatkan sosialisasi fungsi pelabuhan untuk didukung semua pihak. • Penyertifikatan lahan dan penentuan WP dan WK. • Menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih dan higienis.

Pengembangan

Ancaman (T)	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha perikanan masih didominasi nelayan kecil dan pemanfaatan yang bertumpu pada perairan pantai 2. Rendahnya kualitas SDM perikanan khususnya nelayan yang bisa dilihat dari rendahnya tingkat pendidikannya menyebabkan proses alih teknologi dan ketramplan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan usaha. 3. Nelayan disekitar pelabuhan masih berorientasi lokal dan sulit menerima pengembangan iptek, keterampilan, dan kehadiran nelayan dari daerah lain. 4. Keterbatasan SDI di Selat Bali yang cenderung terus menurun. 5. Keterbatasan bahan baku industri tidak mencukupi dan beberapa pabrik tidak kontinyu berproduksi, atau mere-lokasi pabrik ke tempat lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan di PPN Pengembangan • Peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan • Revitalisasi, penyempurnaan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas di PPN Pengembangan untuk dapat menjadi pusat kegiatan perikanan terpadu • Dukungan untuk peningkatan akses permodalan usaha perikanan tangkap di PPN Pengembangan • Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan di PPN Pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menekan nilai kerugian akibat <i>IUU fishing</i>. • Pemberdayaan masyarakat, tujuan dalam strategi ini adalah guna meningkatkan SDM. • Peningkatan akses permodalan. Peningkatan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan masyarakat perikanan terhadap cara mengakses permodalan bagi kegiatan usaha serta kerjasama dengan pihak perbankan yang khusus menangani hal tersebut. • Melakukan penyuluhan kepada masyarakat nelayan agar berpikiran terbuka dan berorientasi penangkapan lepas pantai • Revitalisasi fasilitas pelabuhan yang dapat menjadi pusat kegiatan perikanan terpadu • Melakukan pengawasan dan perlindungan SDI. • Menyediakan fasilitas laboratorium untuk bina mutu hasil perikanan.

-
- Menyediakan Pos Karantina Ikan sebagai pelayanan 1 atap.
 - Menghadirkan lembaga keuangan di pelabuhan dan pengembangan unit bisnis terpadu dalam penguatan usaha perikanan rakyat.
 - Peningkatan pelaksanaan K3
-

Sumber: Suherman, 2011

Sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan dan sasaran pembangunan PPN Pengambengan yang telah ditetapkan dengan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan strategis yang senantiasa berkembang dinamis. Analisis dimaksud mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, di mana masing-masing analisis ditinjau dari tiga aspek utama, yakni sosial, ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal (Tabel 18), terdapat kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Keempat unsur tersebut harus dapat “dinilai” sehingga dapat menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

10.4. Tahap Pengambilan Keputusan

Setelah mengetahui keadaan PPN Pengambengan, maka terdapat berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi PPN Pengambengan .

BAB XI

Penutup

Kegiatan Perikanan Tangkap di Pengambangan telah dimulai sejak Empat puluhan tahun yang lalu. Pada mulanya berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dibangun pada tahun 1976/1977. Secara bertahap dikembangkan dan oleh *Fisheries Infrastructure Sector Project*, dilakukan studi kelayakan melalui *Roger Consulting Marine Gmbh* pada tahun 1988. Berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B.2672/M.PAN/9/2009 tanggal 11 September 2008, peningkatan status kelas dari Pelabuhan Perikanan Pantai menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara dan diresmikan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan pada tanggal 6 Pebruari 2009.

Aktivitas operasional PPN Pengambangan terus mengalami peningkatan. Kunjungan kapal selama tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 17,8%. Volume produksi ikan yang didaratkan naik sebesar 99,6 %, Untuk nilai produksi naik sebesar 25,3 %. Kinerja Operasional berdasarkan pedoman yang ditetapkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2015 menunjukkan bahwa kinerja operasional PPN Pengambangan selama Januari 2019-Januari 2020 berkinerja Baik, pada bulan Maret, Mei, dan September 2019, bahkan kinerja PPN Pengambangan terkategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil pengujian SEM, Internal (pengelola, anggaran, nelayan dan produktivitas) mempunyai pengaruh paling besar terhadap kinerja PPN. Hal ini ini menunjukkan bahwa semakin tinggi internal maka semakin tinggi pula kinerja PPN. Untuk meningkatkan kinerja, manajemen PPN Pengambangan diharapkan dapat melakukan transformasi melalui peningkatan kualitas

pengelola berupa pendidikan, ketrampilan dan budaya kerja. Selain itu, juga diharapkan dilakukan peningkatkan alokasi anggaran PPN, meningkatkan kualitas nelayan/pengolah/pemasar berupa pelatihan, ketrampilan dan pengalaman, meningkatkan produktivitas nelayan berupa teknologi, pendapatan dan produksi.

Daftar Pustaka

- Bambang, A. N., dan A. Suherman. 2006. Tingkat Pemanfaatan PPS Cilacap Ditinjau dari Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan yang Tersedia. *Buletin PSP*, 15(6); 1-12.
- Bayyinah, A.A., I. Solihin, dan S.H Wisudo. 2016. Kepuasan Nelayan Terhadap Pelayanan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Cirebon. *Marine Fisheries*. Vol. 7, No. 1, Mei 2016. Hal 33-43.
- Biantoro, U. 2002. Pengaruh Praktek Manajemen Sumberdaya Manusia Terhadap Budaya Organisasi dan Kinerja Perusahaan. [Disertasi]. Surabaya: Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya. 358.
- Choliq, A., W. Rivai, dan H. Suwana. 1999. Evaluasi Proyek (Suatu Pengantar). Bandung: Pionir Jaya. 138 hlm.
- Deng, P., S. Lu, and H. Xiao. 2013. Evaluation of the Relevance Measure Between Ports and Regional Economy Using Structural Equation Modeling. *Journal Transport Policy* .27(2013):123-133.
- Diniah., M.P. Sobari, D. Seftian. 2012. Pelayanan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Terhadap Kebutuhan Operasi Penangkapan Ikan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 2(1): 41 – 49.
- Direktorat Jenderal Perikanan. 1981. Pembinaan Pelabuhan Perikanan. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2002. Pedoman Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. Jakarta, 109 hlm.
- Direktorat Prasarana Perikanan Tangkap. 2004. Peranan Pelabuhan Perikanan Dalam Penyediaan Data dan Informasi Perikanan. Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. 2015. Keputusan Direktur

- Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 20/KEPDJPT/ 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan
- Dubrocard, A., S. Thoron. 1998. Strategic Aspects of the Planning of Fishing Harbours. University of Toulon. 20 pp.
- Elpandi, K.S. 2000. Pelayanan Prima. Makalah diberikan pada Pelatihan Manajemen dan Operasional Pelabuhan/Pendaratan Ikan. 4 ~ 27 September 2000. Bogor.
- Fadhil, M. 2016. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Pada Balai Latihan Kerja Industri Makassar. Jurnal Perspektif, 1(1): 70-81.
- Ferdinand, A. 2006. Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ferdinand, A. 2014. Metode Penelitian Manajemen. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gannile, C., M.S.A.Yajid., A.Khatibi., S.M. F. Azam. 2020. *Systemic Review on Impact of Strategic Human Resources Management on Organizational Performance in Insurance Industry. European Journal of Human Resource Management Studies* 4 (2): 145-168.
- Ghozali, I. 2014. Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guswanto. B., I. Gumilar, dan H. Hamdani. 2012. Analisis Indeks Kinerja Pengelola Dan Indeks Kepuasan Pengguna Di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Jakarta. Jurnal Perikanan Dan Kelautan. 3(4):151-163.
- Hart, A. 1986. Knowledge Acquisition for Expert Systems. Mc Graw-Hill Book Company. New York.
- Israel, DC, Roque RMGR. 2000. Analysis of Fishing Port in The Philippines. 60 hlm.
- Kamaluddin, LM. 2002. Pembangunan Ekonomi Maritim di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 331 hlm.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2010. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2010 tentang Wilayah

- Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. 18 hlm.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. 20 hlm.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan. 15 hlm.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 411 hlm.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2018. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. 49 hlm.
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 2009. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.
- Kirwelakubun, N., M.E Kayadoe, J.F Polii, F.F Kaparang, dan F.P.T Pangalila. 2018. Studi tentang pelayanan terhadap kapal perikanan Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa Kota Manado. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap* 3(1): 32-40, Juni 2018. Hal 32-40.
- Kriyantono, R. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.134 hlm.
- Kurnia, N., Syaifuddin, dan J. Zain. 2019. Tingkat Kepuasan Nelayan Terhadap Pelayanan Jasa Tambat Labuh di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Hal 1-13.
- Kusumastanto, T. 2002. *Reposisi Ocean Policy Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah* [orasi ilmiah guru

- besar]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. 134 hlm.
- Lubis, E. 1999. Pola Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta dan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke. Buletin PSP. Volume VIII No. 2.
- Lubis, E., dan A.B Pane. 2012. An Optimum Model of Fish Auction In Indonesian Fishing Ports in Accordance With The Characteristics of Fisherman. *Journal of Coastas Development*. Volume 15, Number 3, Juni, 2012. Hal 282-296.
- Lubis, E., dan A.B Pane. 2017. Institusional Model of Fish Auction Refunctionalization in Indonesia Fishing Ports. *AACL Bioflux*, 2017, Volume 10, Issue 6. Hal 1456 1465.
- Marimin. 2004. Teknik Aplikasi Pengambilan Keputusan Majemuk. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Murdiyanto, B. 2004. Pelabuhan Perikanan (Fungsi, Fasilitas, Panduan Operasional, Antrian Kapal). Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Institut Pertanian Bogor. 143 hlm.
- Ngamel, Y.A., E. Lubis, A.B Pane dan I. Solihin. 2013. Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. 4(2): 155-172.
- Nugroho, T, I. Solihin, Fathurohim. 2012. Faktor-Faktor Penentu Kinerja Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dadap Di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Marine Fisheries*. 3(1) Hal: 91-101.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009. Tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- PPN Pengambengan, 2019. Laporan Tahunan PPN Pengambengan Tahun 2019. 92 hlm.
- Purnomo, A.H., S.H Suryawati, Y Hikmayani dan E Reswati. 2003. Model pengembangan industri perikanan terpadu (studi kasus di wilayah pengembangan utama iii, Jawa Tengah). *Jurnal*

- Penelitian Perikanan Indonesia. 9(6): 35-56.
- Rahmah, A, M. Rizayani, dan C. Chaliluddin. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo terhadap Kelancaran Operasional Penangkapan Ikan. *Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan*. 7(1): 1-8.
- Rangkuti F. 2000. *Analisa SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia. 188 hlm.
- Simanjuntak, S., A.H Yani, R.M. Hutauruk. 2018. Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 193 hlm.
- Suherman, A. 2007. *Rekayasa Model Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap*. [Disertasi]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. 307 hlm.
- Suherman, A., dan A. Dault. 2009. Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan Jembrana Bali. *Jurnal Saintek Perikanan*. 4(2) : 24-32.
- Suherman, A. 2011. Formulasi Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Jembrana. *Marine Fisheries*, 2(1): 87-99.
- Suherman, A., Boesono, H., Kurohman, F., Mudzakir, A. 2020. Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Jembrana Bali. *Jurnal Saintek Perikanan*, 16 (2): 123-131.
- Suyono, R. P. 2005. *Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*. Penerbit PPM
- Triyonggo, Y., M. S. Maarif., A. Sukmawati., L.M. Baga. 2016. Analisis Situasional Kompetensi Praktisi Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi MEA 2015. *Jurnal Manajemen Teknologi* 14(1) : 100 – 112.
- Umar, Husein. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis, Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- UNCTAD. 1976. Port Performance Indicators. United Nations Publication No E76.II.D.7. United Nations. Geneva.
- _____. 1987. Measuring and Evaluating Port Performance and Productivity. UNCTAD Monographs and Port Management No 6. United Nations. Geneva.

Lampiran I

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. 67/MEN/2010

WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 41 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan;
 - b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik

Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Jembrana Nomor 523/4008/KAN/PKL, tanggal 27 Oktober 2008, hal Rekomendasi Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Pengembangan;
 2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 22.01.02.11.4.00006, tanggal 5 November 1997;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANTENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN.

KESATU : Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, meliputi:

a. wilayah kerja terdiri dari:

1. wilayah kerja daratan seluas 19,20 Ha (sembilan belas koma dua puluh hektar); dan
2. wilayah kerja perairan seluas 20 Ha (dua puluh hektar);

b. wilayah pengoperasian terdiri dari:

1. wilayah pengoperasian daratan seluas 3,80 Ha (tiga koma delapan puluh hektar); dan
2. wilayah pengoperasian perairan seluas 270 Ha (dua ratus tujuh puluh hektar);

dengan batas-batas dalam koordinat geografis sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan peta sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran I : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor:

KEP. 67/MEN/2010

tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan
Perikanan Nusantara Pengambengan.

BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS WILAYAH KERJA
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

A. Batas-batas Wilayah Kerja Daratan seluas 19,20 Ha (sembilan
belas koma dua

puluh hektar) dimulai dari titik KD01 dengan koordinat:

114° 34' 40,41" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
menuju ke titik

08° 23' 15,56" LS

KD02 dengan koordinat :

114° 34' 39,76" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
menuju ke titik

08° 23' 16,01" LS

KD03 dengan koordinat :

114° 34' 39,49" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
menuju ke titik

08° 23' 15,76" LS

KD04 dengan koordinat:

114° 34' 33,55" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
menuju ke titik

08° 23' 17,68" LS

KD05 dengan koordinat:

114° 34' 31,54" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
menuju ke titik

08° 23' 15,19" LS

KD06 dengan koordinat:

114° 34' 25,55" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
menuju ke titik

08° 23' 7,96" LS

KD07 dengan koordinat:

114° 34' 29,95" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
menuju ke titik

08° 23' 4,22" LS

KD08 dengan koordinat:

114° 34' 30,57" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
menuju ke titik

08° 23' 2,03" LS

KD09 dengan koordinat :

114° 34' 30,91" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara
menuju ke titik

08° 22' 59,43" LS

KD10 dengan koordinat:

114° 34' 30,85" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara
menuju ke titik

08° 22' 57,18" LS

KD11 dengan koordinat:

114° 34' 30,65" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 23' 4,31" LS

KD12 dengan koordinat:

114° 34' 33,79" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 23' 2,74" LS

KD13 dengan koordinat:

114° 34' 34,54" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
menuju ke titik

08° 23' 2,22" LS

KD14 dengan koordinat:

114° 34' 35,76" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 23' 3,64" LS

KD15 dengan koordinat:

114° 34' 34,19" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya

menuju ke titik
08° 23' 5,08" LS

KD16 dengan koordinat:
114° 34' 35,27" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik
08° 23' 7,27" LS

KD17 dengan koordinat:
114° 34' 36,48" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik
08° 23' 9,51" LS

KD18 dengan koordinat:
114° 34' 37,79" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik
08° 23' 11,70" LS

KD19 dengan koordinat:
114° 34' 39,19" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik
08° 23' 13,84" LS

KD20 dengan koordinat:
114° 34' 32,28" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik
08° 22' 59,36" LS

KD01 dengan koordinat:

114° 34' 40,41" BT

08° 23' 15,56" LS

B. Batas-batas Wilayah Kerja Perairan seluas 20,00 Ha (Dua puluh hektar) dimulai dari titik KL01 dengan koordinat :

114° 34' 33,50" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju ke titik

08° 23' 17,63" LS

KL02 dengan koordinat:

114° 34' 33,65" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik

08° 23' 18,07" LS

KL03 dengan koordinat:

114° 34' 28,09" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik

08° 23' 19,86" LS

KL04 dengan koordinat:

114° 34' 25,39" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik

08° 23' 20,65" LS

KL05 dengan koordinat:

114° 34' 22,63" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
menuju ke titik

08° 23' 20,63" LS

KL06 dengan koordinat:

114° 34' 20,34" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
menuju ke titik

08° 23' 19,99" LS

KL07 dengan koordinat:

114° 34' 18,68" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
menuju ke titik

08° 23' 19,17" LS

KL08 dengan koordinat:

114° 34' 17,08" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
menuju ke titik

08° 23' 18,13" LS

KL09 dengan koordinat:

114° 34' 15,99" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
menuju ke titik

08° 23' 16,98" LS

KL10 dengan koordinat:

114° 34' 14,74" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut

menuju ke titik

08° 23' 15,32" LS

KL11 dengan koordinat:

114° 34' 14,06" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut

menuju ke titik

08° 23' 14,11" LS

KL12 dengan koordinat:

114° 34' 8,28" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara

menuju ke titik

08° 23' 10,78" LS

KL13 dengan koordinat:

114° 34' 8,35" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut

menuju ke titik

08° 23' 10,15" LS

KL14 dengan koordinat:

114° 34' 8,95" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut

menuju ke titik

08° 23' 8,34" LS

KL15 dengan koordinat:

114° 34' 9,47" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut

menuju ke titik

08° 23' 7,29" LS

KL16 dengan koordinat:

114° 34' 10,36" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
menuju ke titik

08° 23' 6,03" LS

KL17 dengan koordinat:

114° 34' 11,26" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
menuju ke titik

08° 23' 4,95" LS

KL18 dengan koordinat:

114° 34' 12,32" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
menuju ke titik

08° 23' 3,81" LS

KL19 dengan koordinat:

114° 34' 15,21" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
menuju ke titik

08° 23' 1,56" LS

KL20 dengan koordinat:

114° 34' 18,72" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
menuju ke titik

08° 22' 58,76" LS

KL21 dengan koordinat:

114° 34' 21,72" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
menuju ke titik

08° 22' 56,35" LS

KL 22 dengan koordinat:

114° 34' 27,78" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 22' 52,03" LS

KL23 dengan koordinat:

114° 34' 28,34" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 22' 52,50" LS

KL24 dengan koordinat:

114° 34' 29,05" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 22' 53,22" LS

KL25 dengan koordinat:

114° 34' 29,68" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 22' 54,00" LS

KL26 dengan koordinat:

114° 34' 30,22" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara

menuju ke titik

08° 22' 54,84" LS

KL27 dengan koordinat:

114° 34' 30,65" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
menuju ke titik

08° 22' 55,69" LS

KL28 dengan koordinat:

114° 34' 30,85" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
menuju ke titik

08° 22' 57,18" LS

KL29 dengan koordinat:

114° 34' 30,91" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
menuju ke titik

08° 22' 59,43" LS

KL30 dengan koordinat:

114° 34' 30,57" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
menuju ke titik

08° 23' 2,03" LS

KL31 dengan koordinat:

114° 34' 29,95" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
menuju ke titik

08° 23' 4,22" LS

KL32 dengan koordinat:

114° 34' 25,55" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 23' 7,96" LS

KL33 dengan koordinat:

114° 34' 31,54" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 23' 15,19" LS

KL01 dengan koordinat:

114° 34' 33,50" BT

08° 23' 17,63" LS

Lampiran II : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor:

KEP. 67/MEN/2010

tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan
Perikanan Nusantara Pengembangan

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS WILAYAH PENGOPERASIAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN**

A. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Daratan Pelabuhan Perikanan
Nusantara

Pengembangan seluas 23 Ha (dua puluh tiga hektar) dimulai dari titik
OD01 dengan

koordinat:

114° 34' 40,41" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 23' 15,56" LS

OD02 dengan koordinat :

114° 34' 43,18" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
menuju ke titik

08° 23' 20,92" LS

OD03 dengan koordinat :

114° 34' 37,99" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
menuju ke titik

08° 23' 23,10" LS

OD04 dengan koordinat:

114° 34' 33,55" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
menuju ke titik

08° 23' 17,68" LS

OD05 dengan koordinat:

114° 34' 39,49" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 23' 15,76" LS

OD06 dengan koordinat:

114° 34' 39,76" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
menuju ke titik

08° 23' 16,01" LS

OD01 dengan koordinat:

114° 34' 40,41" BT

08° 23' 15,56" LS

B. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Perairan Pelabuhan Perikanan Nusantara

Pengembangan seluas 270 Ha (dua ratus tujuh puluh hektar) dimulai dari titik OL01

dengan koordinat :

114° 34' 20,34" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik

08° 23' 19,99" LS

OL02 dengan koordinat:

114° 34' 22,63" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik

08° 23' 20,63" LS

OL03 dengan koordinat:

114° 34' 25,39" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik

08° 23' 20,65" LS

OL04 dengan koordinat:

114° 34' 28,09" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut

menuju ke titik

08° 23' 19,86" LS

OL05 dengan koordinat:

114° 34' 33,65" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 23' 18,07" LS

OL06 dengan koordinat:

114° 34' 37,99" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
menuju ke titik

08° 23' 23,10" LS

OL07 dengan koordinat:

114° 34' 43,187" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
menuju ke titik

08° 23' 20,92" LS

OL08 dengan koordinat:

114° 34' 42,44" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 23' 21,89" LS

OL09 dengan koordinat:

114° 34' 47,67" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
menuju ke titik

08° 23' 26,73" LS

OL10 dengan koordinat:

114° 33' 46,23" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut
menuju ke titik

08° 23' 78,22" LS

OL11 dengan koordinat:

114° 33' 12,51" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut
menuju ke titik

08° 23' 37,42" LS

OL13 dengan koordinat:

114° 34' 15,57" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 22' 45,70" LS

OL14 dengan koordinat:

114° 34' 18,24" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 22' 48,01" LS

OL15 dengan koordinat:

114° 34' 21,72" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 22' 51,01" LS

OL16 dengan koordinat:

114° 34' 24,65" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
menuju ke titik

08° 22' 53,97" LS

OL17 dengan koordinat:

114° 34' 21,72" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
menuju ke titik

08° 22' 56,35" LS

OL18 dengan koordinat:

114° 34' 18,72" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
menuju ke titik

08° 22' 58,76" LS

OL19 dengan koordinat:

114° 34' 15,21" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
menuju ke titik

08° 23' 1,56" LS

OL20 dengan koordinat:

114° 34' 12,32" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya
menuju ke titik

08° 23' 3,81" LS

OL21 dengan koordinat:

114° 34' 11,26" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya

menuju ke titik

08° 23' 4,95" LS

OL22 dengan koordinat:

114° 34' 10,36" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya

menuju ke titik

08° 23' 6,03" LS

OL23 dengan koordinat:

114° 34' 9,47" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya

menuju ke titik

08° 23' 7,29" LS

OL24 dengan koordinat:

114° 34' 8,95" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya

menuju ke titik

08° 23' 8,34" LS

OL25 dengan koordinat:

114° 34' 8,35" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan

menuju ke titik

08° 23' 10,15" LS

OL26 dengan koordinat:

114° 34' 8,28" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara

menuju ke titik

08° 23' 10,78" LS

OL27 dengan koordinat:

114° 34' 14,06" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 23' 14,11" LS

OL28 dengan koordinat:

114° 34' 14,74" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 23' 15,32" LS

OL29 dengan koordinat:

114° 34' 15,99" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 23' 16,98" LS

OL30 dengan koordinat:

114° 34' 17,08" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 23' 18,13" LS

OL31 dengan koordinat:

114° 34' 18,68" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik

08° 23' 19,17" LS

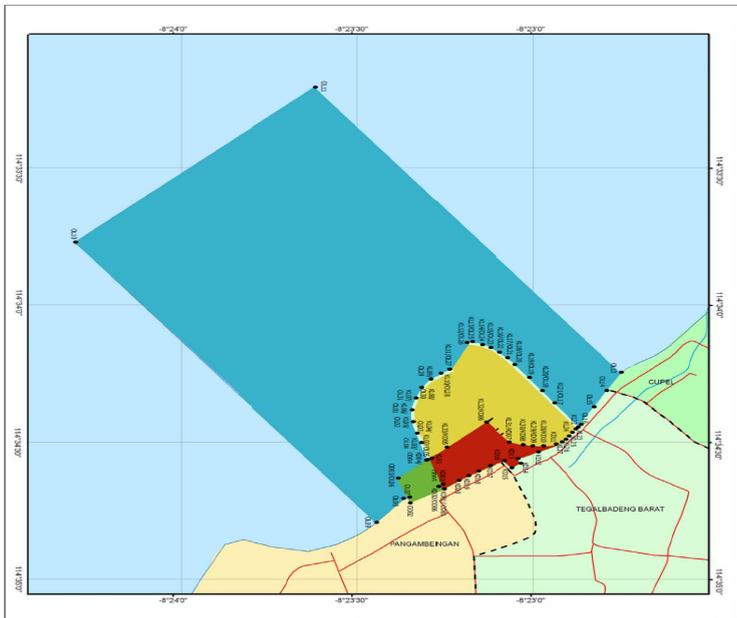
OL01 dengan koordinat:

114° 34' 20,34" BT

08° 23' 19,99" LS

Lampiran III : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.67/MEN/2010 Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.

PETA WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN



FADEL MUHAMMAD

tdl

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA.

Skala :
1 : 25.000

Keterangan :

- Wilayah kerja daratan
- Wilayah kerja perairan
- Wilayah pengoperasian daratan
- Wilayah pengoperasian perairan

Tentang Penulis



Agus Suherman lahir di Lampung, 3 Agustus 1976. Pendidikan dasar sampai menengah di tempuh di Tulang Bawang-Lampung. Tahun 1994 Penulis di terima di Universitas Diponegoro melalui Jalur Program Seleksi Siswa Berpotensi (PSSB) Lulus Strata 1 tahun 1998. Tahun 2000 penulis memperoleh kesempatan untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang S2 dengan beasiswa BPPS dan diterima di Program Studi Teknologi Kelautan IPB Lulus tahun 2002. Pada tahun 2003 Penulis melanjutkan program Doktor dengan beasiswa BPPS Lulus tahun 2006. Penulis saat ini bekerja sebagai staf pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro (UNDIP) mulai tahun 1999 dengan Mata Kuliah Pelabuhan Perikanan. Tahun 2008-2010 Penulis ditugaskan sebagai Staf Ahli Pembantu Rektor Undip Bidang Pengembangan dan Kerjasama, selain sebagai Staf Ahli Pembantu Rektor Undip Penulis juga ditugaskan sebagai Kepala Laboratorium Pengembangan Wilayah Pantai-Undip. Akhir tahun 2010-2013 penulis dipekerjakan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai Kepala Bidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan. Di samping tugas tersebut, sejak tahun 2011-2013 penulis menduduki posisi komisaris PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Tahun 2013-2015 Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, 2015-2017 Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015-2017, 2019 Kepala Sekretariat Satgas 115, 2017-2019 Direktur Kapal dan Alat

Penangkapan Ikan, 2018-2019 plt Direktur Perizinan dan Kenelayanan, 2017-2019 Komisaris PT Undip Maju (Persero), 2019 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2019 plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2019-2020 Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 2019-2020. Komisaris PT Banda Ghara Reksa Logistik (Persero) 2019-2020.

Tentang Penulis



Abdul Kohar Mudzakir lahir di Kota Surakarta Hadiningrat, Jawa Tengah, Pendidikan dasar sampai menengah atas di selesaikan di Kota Surakarta. Tahun 1993 penulis diterima di Universitas Diponegoro melalui jalur UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri lulus strata satu (S1) sebagai Sarjana Perikanan (S.Pi) tahun 1998. Pada Tahun 1999 diterima PNS sebagai dosen di Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan dengan konsentrasi Ekonomi Sumberdaya Perikanan.

Tahun 2000 penulis memperoleh kesempatan melanjutkan studi ke strata 2 (S2) pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN) Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan beasiswa BPPS (Beasiswa Program Pasca Sarjana) Penuh dari Dikti (Dirjen Pendidikan Tinggi) Kementerian Pendidikan Nasional dan lulus sebagai Magister Sains (M.Si) pada tahun 2003. Pada tahun 2004 kembali penulis mendapatkan beasiswa dari BPPS Dikti untuk melanjutkan studi ke strata 3 (S3) pada program Studi Teknologi Kelautan (TKL) dan lulus sebagai Doktor (Dr.) pada tahun 2009. Pada tahun 2010 penulis berkesempatan mengikuti khursus yang diselenggarakan Kementian Pertahanan RI sebagai wakil dari dosen Universitas Diponegoro sebagai calon pemimpin masa depan dari kalangan sipil dan militer. Sampai saat ini penulis masih berkarier sebagai dosen dengan jabatan fungsional sebagai lector kepala sejak tahun 2015. Adapun tugas-tugas tambahan penulis antara lain sebagai sekretaris Laboratorium Pengembangan Wilayah Pantai (LPWP) Kampus Undip di Kabupaten Jepara tahun 2010-2013, sebagai sekretaris Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip tahun 2013-2015, sebagai Ketua Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip tahun 2015-2016, sebagai Sekretaris Departemen Perikanan Tangkap FPIK Undip Tahun 2016-2020, dan sebagai Ketua Departemen Perikanan Tangkap

FPIK Undip 2020 sampai sekarang. Disamping tugas-tugas tersebut penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di daerah-daerah pengembangan sector perikanan baik di Jawa Tengah maupun di tempat yang lain, juga sebagai tim ahli di beberapa kementerian dan dinas di Jawa Tengah.

Tentang Penulis



Dendy Umbara Hadi lahir di Banyuwangi, 4 Februari 1978. Pendidikan dasar sampai menengah ditempuh di Banyuwangi. Tahun 1995-1996 penulis pernah berkecimpung di dunia usaha Pembenihan Ikan Bandeng (Hatchery Nener) milik sendiri di Gondol, Desa Penyabangan-Buleleng. Pada tahun 1996 penulis melanjutkan pendidikan program Diploma III jurusan Agribisnis Perikanan di Universitas

Brawijaya Malang dan lulus pada tahun 1999. Pada tahun 1999-2000 bekerja sebagai Teknisi pada PT. Suri Tani Pemuka Devisi Tambak di Banjarmasin. Tahun 2001-2005 penulis bekerja di CO-FISH Project, dimana project tersebut adalah Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dan Asian Development Bank (ADB) dalam bidang Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Banyuwangi. Pada tahun 2002 penulis mendapat kesempatan melanjutkan kuliah Strata 1 di Universitas Wisnuwardhana Malang dan lulus di tahun 2003. Penulis saat ini bekerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan-Bali satker UPT Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai staf perencanaan sejak tahun 2006. Tahun 2014 penulis dapat kesempatan melalui program Inpassing menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda. Di tahun 2017 penulis ditugaskan menjadi Kepala Unit Pelabuhan Perikanan Ukurlaran, Saumlaki di Provinsi Maluku. Dan pada bulan Maret 2018 penulis ditugaskan kembali pada Pelabuhan Perikanan

Nusantara Pengambengan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha sampai dengan sekarang.

Tentang Penulis



Lukman Hadi lahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada 19 Februari 1982. Menempuh pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas di Banyuwangi lulus tahun 2000. Pada february 2005 diterima menjadi CNPS di Kementerian Kelautan dan Perikanan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Tahun 2009 penulis

mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta dan lulus pada tahun 2013. Penulis saat ini bekerja sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) Ahli Pertama di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan mulai tahun 2019. Tahun 2005-2009 ditugaskan sebagai staf pengelola Barang Milik Negara (BMN), selain ditugaskan sebagai staf pengelola BMN penulis juga ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan sebagai Panitia Lelang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Setelah menempuh pendidikan selama 4 tahun, pada tahun 2014-2018 penulis kembali bertugas sebagai staf operasional pelabuhan di bagian Operator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) dan Kehumasan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Pada tahun 2018-2019 penulis ditugaskan sebagai staf operasional pelabuhan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan di bagian operator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Enumerator dan Kehumasan.

